



KPK INTAI HARTA PEJABAT

PEMBERANTASAN
KORUPSI
TAK PERNAH
SURUT
PRABOWO
BAHAS KERJA
SAMA MILITER
DENGAN
3NEGARA

BERIKAN YANG
TERBAIK UNTUK
PALEMBANG



HATI HATI
MAINKAN
BIAYA HAJI
MINYAK GORENG
HARUS TERSEDIA
PRODUSEN BISA
TETAP LABA



Rp75.000,-

info indonesia

INOVASI UNTUK NEGERI



IKLAN BACK COVER

RP 75.000.000

IKLAN DISPLAY/HAL

RP 50.000.000

IKLAN ADVERTORIAL/HAL

RP 65.000.000

CENTER SPREAD

RP 80.000.000



*Kami Hadir
Memberikan
info Tersebut*

▶ **BEBERAPA MANFAAT DAN KEUNTUNGAN
PASANG IKLAN DI MAJALAH INFO INDONESIA**

▶ **IKLAN LEBIH AKURAT DAN TERTARGET
SESUAI DENGAN TOPIK PEMBAHASAN YANG ADA.**

▶ **LOKASI IKLAN YANG PRODUKTIF SEHINGGA MUDAH
DI LIHAT PARA PEMBACA INFO INDONESIA.**

▶ **HARGA YANG TERJANGKAU DAN BANYAK DISKON
UNTUK PARA PELANGGAN**



**JALAN MPR III NO. 5B KELURAHAN CILANDAK BARAT,
KECAMATAN CILANDAK, JAKARTA SELATAN (12430), Telp 021-27812397**

PARPOL & NOMOR URUT PESERTA PEMILU 2024



EDISI
BULAN
MARET
2023

DAFTAR ISI



7

INFO UTAMA

Pada satu sisi Komisi Pemberantasan Korupsi berada di jalur penegakan hukum. Namun, pada sisi lain, penegakan hukum itu dapat berdampak buruk terhadap kinerja pemerintahan, lembaga eksekutif, tempat KPK bernaung.



22

INFO SUMSEL

Kegigihan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) di bawah duet kepemimpinan Gubernur H Herman Deru dan Wakil Gubernur H Mawardi Yahya (HDMY) dalam menurunkan angka stunting, membuahkan hasil positif.



38

INFO KALTIM

Ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi manfaat bagi daerah tersebut meraup banyak peluang ekonomi. Salah satunya pada sektor pertanian, termasuk sektor hortikultura untuk menyediakan buah-buahan untuk penduduk IKN.



48

INFO NASIONAL

Minyak goreng lagi-lagi jadi soal. Persoalan minyak goreng ini tahun lalu membuat Muhammad Lutfi dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Perdagangan. Awal 2023, jelang puasa dan Lebaran, pasokan minyak goreng harus jadi perhatian jika, Zulkifli Hasan, tak ingin kena masalah besar.



68

INFO KEMENAG

Ibadah haji bisa jadi sesuatu yang seksi pada waktu yang tepat. Termasuk menjelang tahun-tahun politik. Biaya haji yang baru-baru ini disahkan bisa jadi salah satunya.



87

INFO KHUSUS

Kebakaran Depo Pertamina di Plumpang, Koja, Jakarta Utara, 2 Maret 2023, menjadi penghakiman bagi Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati. Dari insiden yang merenggut 19 nyawa itu, Nicke layak untuk dievaluasi, bahkan dicopot dari jabatan.



76

INFO SPORT

PSSI bisa apa? Pertanyaan itu kerap menjadi sindiran masyarakat Indonesia melihat prestasi sepak bola yang tak kunjung membaik, bahkan menunjukkan kemunduran. Pertanyaan itu kini jadi tugas Erick Thohir untuk menjawabnya dengan memperbaiki prestasi sepak bola dari hulu hingga hilirnya.

3 DARI REDAKSI

18 OPINI

30 INFO NUSANTARA

34 INFO PALEMBANG

42 INFO NUSA TENGGARA BARAT

44 INFO SULAWESI SELATAN

46 INFO SAMARINDA

60 INFO ISTANA

64 INFO MUBA

72 INFO POLITIK

80 INFO WISATA

84 INFO SELEBRITI

86 KAJI

SENGAJA

In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way.

Dalam politik, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Jika terjadi, Anda bisa bertaruh memang sudah direncanakan seperti itu. Kalimat itu beberapa kali diucapkan oleh Franklin Delano Roosevelt, Presiden ke-32 Amerika Serikat, yang berkuasa antara 1933-1945.

Perhatikan, Roosevelt menjadi Presiden AS lebih dari 12 tahun. Ya, ia bukan hanya terkenal karena ucapan yang masyhur itu, melainkan juga karena kepemimpinannya yang sangat populer. Tapi, ketika ia memerintah di paruh pertama Abad XX itu, memang belum ada batasan maksimal menjabat Presiden AS lebih dari dua periode. Batasan dua periode di AS baru berlaku pada 1951, memasuki paruh kedua Abad XX.

Toh memang Roosevelt adalah Presiden luar biasa. Ia membawa AS keluar dari Depresi Besar (Great Depression) yang terjadi 10 tahun antara 1930-1939 dan berdampak global termasuk penderitaan para petani tebu di Hindia Belanda yang kala itu menjadi eksportir gula terbesar di dunia. Dari Roosevelt pula program 100 hari pemerintahan Presiden AS terpilih menjadi patok banding (benchmark) para pemimpin dunia yang terpilih melalui pemilihan demokratis.

Banyak lagi pelajaran dan pengetahuan terkait politik yang terinspirasi oleh Roosevelt. Lebih dari itu, ungkapan tak ada yang kebetulan dalam politik, seakan menjadi rujukan termudah jika melihat dinamika politik. Termasuk dinamika tahun politik menjelang berbagai pemilihan Indonesia yang direncanakan berlangsung pada 2024.

Malah peristiwa penganiayaan oleh seorang anak pejabat kantor pajak menggelinding bagaikan bola salju yang kian besar dalam konteks dinamika politik. Ya, memasuki Maret 2023, bola salju itu makin membesar dengan terkuaknya dugaan kejahatan pencucian uang (money laundering) oleh para petugas pajak maupun bea cukai yang dengan sendirinya merupakan aparat negara di Kementerian Keuangan.

Apakah bola salju itu menggelinding secara kebetulan? Dengan mengutip Roosevelt, jawabannya jelas tidak.

Memang ada tafsir bahwa ucapan Roosevelt itu menunjukkan keterlibatannya dalam manuver dan manipulasi politik guna mencapai tujuan kekuasaan. Namun, tafsir lain mengemukakan bahwa kutipan tersebut juga dapat dilihat sebagai seruan untuk transparansi dan akuntabilitas lebih besar dalam politik. Alasannya, mana mungkin dinamika politik diterima begitu saja sebagai kebetulan, padahal terjadi karena adanya pengambilan keputusan dan tindakan sengaja.

Begitulah, di tahun politik 2023, gelindingan bola salju itu akan menjadi perhatian berkelanjutan. Termasuk yang sengaja redaksi sajikan di edisi kali ini. ●



ALAMAT REDAKSI/IKLAN/ PEMASARAN:

Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati,
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12750

- TELP 021-791 96781
- FAX 021-791 96786

Twitter : @Infoindonesia

Facebook : infoindonesia.id

Instagram : @infoindonesia.idn

Email : redaksi@infoindonesia.id

PENDIRI: Usman Rizal **DIREKTUR/PEMIMPIN UMUM:** Usman Rizal

PEMIMPIN PERUSAHAAN: Zulfahmi Jamba **PEMIMPIN REDAKSI:** Gunawan Effendi **WAKIL PEMIMPIN**

REDAKSI: Rahmad Romli **REDAKTUR PELAKSANA:** Rusdiyono **REDAKTUR** : Raden Mohd Solehin,

Nurkhamida, Irma Yani, Rusdiyono, Rosyda, Ega Tri Gustina **REPORTER:** Desi Wulandari, Anugrah Dany,

Rifky Ilmi, Pras Budi Prasetya, Ahmad Yani, Yuni Watiana, Mario Ananta, Rahmad KR, Iwan Fals, Heni Elsa

Wulandari, Dedy Sagita, Nina Iskandar, Jifran, Boyke Parningotan Hutapea (Bekasi), Dian Taresa (Kalimantan

Tengah), Zaki (Kalimantan Timur), Basri (Kalimantan Utara), Lalu Suparman Ambakti (Nusa Tenggara Barat),

Abu Bakar Usman (Kepulauan Bangka Belitung) **EDITOR & GRAFIS:** Al Amin, Achilles **TATA LETAK:** Sujatmiko

MEDIA SOSIAL: Haidir Ali **KEUANGAN:** Dra Nurhamida **SEKRETARIS REDAKSI** : Niken Rizky Apriandani

PENGEMBANGAN BISNIS: RM Solehin, Zul Jamba **DISTRIBUSI:** Abdul Muchtar **BANK ACCOUNT:** A/N : PT.

Wahana Multimedia, BCA : No Rek : 553-041-4321, KCP Otista Jakarta Timur



PARADOKS FIRLI MEMBERANTAS KORUPSI

Pada satu sisi Komisi Pemberantasan Korupsi berada di jalur penegakan hukum. Namun, pada sisi lain, penegakan hukum itu dapat berdampak buruk terhadap kinerja pemerintahan, lembaga eksekutif, tempat KPK bernaung. Maka Ketua KPK senantiasa berada dalam posisi paradoks.



Rafael Alun Trisambodo tampak tertekan di ruang tunggu menjelang pemeriksaan yang dijadwalkan pada pukul 09.00 WIB. Namun ia telah tiba di Gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi sejak pukul 07.52 pada Rabu, 1 Maret 2023 itu.

KPK mengundang mantan pejabat pajak Kanwil Jakarta Selatan Rafael Alun Trisambodo agar hadir dalam undangan klarifikasi atas laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke KPK, pada Rabu, 1 Maret 2023. Lembaga yang diketuai Komisaris Jenderal Firlu Bahuri itu hendak mengklarifikasi laporan harta kekayaan Rafael Alun sebagai pejabat pajak.

Dalam LHKPN Rafael Alun Trisambodo pada 17 Februari 2022 untuk periode 2021, total kekayaannya tercatat sekitar Rp56 miliar. Tentu saja klarifikasi itu termasuk namun tak terbatas hanya mendalami dari mana harta berasal.

Toh mungkin Rafael belum akan datang ke KPK jika saja tak ada peristiwa penganiayaan yang melibatkan anak-

ya, Mario Dandy Satrio, 20, terhadap Cristolino David Ozora Latumahina, 17, remaja putra pengurus GP Ansor hingga menyebabkan koma.

Peristiwa penganiayaan itu berlangsung pada Senin, 20 Februari 2023. Beberapa hari kemudian, rekaman video itu viral di media sosial. Selain video penganiayaan, ikut tersebar juga rekaman anak dan istri Rafael beserta aneka harta benda yang menunjukkan kekayaannya.

Nah, urusan Rafael pun meluas dari sebagai orang tua Mario hingga statusnya sebagai aparat sipil negara di bidang perpajakan. Sampai-sampai, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pejabat tertinggi di instansi induk tempat Rafael bekerja, menyebut kekayaan Rafael tak masuk akal.

"Terhadap yang bersangkutan (Rafael) ini doesn't make sense, kami juga tahu itu gak makes sense. Saya bilang ke irjen untuk sampaikan ke publik, selama ini anda kontrol itu," kata Sri Mulyani dalam CNBC Economic Outlook, Selasa, 28 Februari 2023, sehari sebelum Rafael

datang ke KPK.

Bu Menkeu pun mengungkapkan tersirat dilema penanganan kasus Rafael yang berstatus pejabat eselon III di Kanwil Pajak Jakarta Selatan. "Kami bekerja bukan berdasarkan emosi, berdasarkan data evidence, tapi pemihakan kepada masyarakat itu penting," ungkapnya.

Pada satu sisi, Menkeu Ani mengatakan harus membela anak buahnya yang sudah bekerja keras. Namun, ia juga harus bersikap tegas termasuk soal LHKPN DJP.

Alhasil, Bu Menkeu mencopot Rafael dari jabatannya dan memerintahkan Inspektur Jenderal Kemenkeu untuk melakukan penyelidikan, terutama terkait harta yang berjumlah fantastis. Lantas Menteri Ani juga mengecam gaya pamer kemewahan di lingkungan Kemenkeu.

Apapun, dilema yang dihadapi Bu Menkeu kian terhubung dengan paradoks KPK setelah diketahui bahwa sebenarnya nama Rafael Alun Trisambodo sebelumnya pernah dilaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ke KPK pada 2013



karena diduga memiliki harta kekayaan tak wajar.

Adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang sanggup mengungkapkannya secara gamblang. Terlebih lagi, dengan jabatannya itu, Mahfud juga menjadi Ketua Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang.

Mahfud mengungkapkan, Ketua KPK Firlil Bahuri terkejut setelah mengetahui kasus aliran dana mencurigakan di Kemenkeu tak disentuh KPK. Padahal, kasus itu sudah dilaporkan PPATK sejak 2013.

"(Saya berbicara ke Kepala PPATK) 'Mas, itu kekayaan orang kok luar biasa? Kamu punya....', 'Oh Pak, nggak, sudah saya tracking, tahun 2013 itu sudah banyak keanehan-keanehan, dan sudah saya kirim suratnya ke KPK, nggak ditindaklanjuti,'" ungkap Mahfud di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Rabu, 8 Maret 2023.

Jadi, lanjut Mahfud, laporan PPATK itu sudah sampai ke KPK sejak lembaga antikorupsi itu dipimpin oleh Abraham

Samad. Namun, hingga Firlil Bahuri menduduki kursi tertinggi di KPK, kasus itu tak tersentuh. "Ini sudah ada laporan pencucian uang, tapi dibiarkan. Itu zamannya Abraham Samad, sejak zaman Samad terus dibiarkan," ucapnya.

"Saya tanya pak Firlil 'Ada atau nggak laporan itu?', 'Tidak', 'Coba periksa laporan nomor sekian tahun sekian', wah kaget. Sudah 10 tahun lebih, kenapa baru



Terhadap yang bersangkutan (Rafael) ini doesn't make sense, kami juga tahu itu gak makes sense. Saya bilang ke irjen untuk sampaikan ke publik, selama ini anda kontrol itu.

dibuka, kan?" sambung Mahfud menengang.

Menko Polhukam itu melanjutkan, pernah menemukan pula kasus serupa dengan Rafael Alun Trisambodo. Malah, kata dia, sebanyak 69 pegawai Kemenkeu dilaporkan ke Bu Menkeu pada 2019. "Saya kirim lagi ke Bu Sri Mulyani, ada 69 pegawai pajak yang sudah dilaporkan oleh PPATK, diduga melakukan pencucian uang," ucap Mahfud MD menengang.

Laporan itu merupakan tindak lanjut dari keanehan dalam transaksi para pegawai Kemenkeu yang ia temukan sebagai Ketua Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang. "Dilaporkan oleh PPATK ke Irjen Kemenkeu pada September 2019," ujarnya.

Menyusul transaksi 69 pegawai Kemenkeu itu muncul lagi temuan terbaru yang melibatkan transaksi sekitar Rp300 triliun. Menko Mahfud menjelaskan, sebagian besar transaksi mencurigakan itu berada di lingkungan Ditjen Pajak serta Ditjen Bea dan Cukai.

"Saya sudah dapat laporan terbaru



tadi pagi, malah ada pergerakan mencurigakan senilai Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai,” ujar Pak Menko.

Temuan terbaru ini, lanjut Mahfud, di luar transaksi Rp500 miliar milik rekening mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya.

Tentu saja data transaksi Rp500 miliar terkait dengan Rafael itu sudah di tangan KPK. Tak mengherankan jika Rafael sampai minta dikasihani sesuai pemeriksaan di Gedung Merah Putih pada Rabu petang, 1 Maret 2023.

Saat keluar dari gedung KPK sekitar

“Jadi saya telah memenuhi kewajiban saya untuk memberikan klarifikasi atas undangan yang diberikan oleh KPK kepada saya,” ujarnya.

Selebihnya, Rafael kembali menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga D, remaja yang menjadi korban penganiayaan anaknya, Mario Dandy Satriyo. Ia juga meminta maaf kepada keluarga besar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Gerakan Pemuda Ansor, dan Banser.

Pejabat eselon III tersebut mendoakan agar D segera sembuh dan pulih. “Saya saat ini mendoakan untuk ananda D, supaya ananda D agar secara sembuh pulih kembali seperti sedia kala,”

Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Palembang. Selain Firl, hadir pula di acara itu antara lain Kepala BNN RI Komjen Petrus Reinhard Golose, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar, dan Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo.

Di acara itu pesan-pesan Firl malah dapat ditafsirkan sebagai cerminan dilema Ketua KPK dan lembaga yang dipimpinnya dalam menangani kasus-kasus korupsi. “KPK hanya melaksanakan tugas sebagaimana ketentuan hukum dan perundang-undangan,” kata Firl.

Ia menjelaskan, asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK terdiri dari akunta-



pukul 17.39 WIB, Rafael tak menjawab berondongan pertanyaan terkait materi pemeriksaan, termasuk sejumlah perusahaannya di Minahasa Utara. “Saya sudah sampaikan itu. Saya sudah lelah, dari pagi (diperiksa) tolong kasihani saya. Saya sudah lelah, saya sudah lelah,” kata Rafael saat keluar dari gedung Merah Putih KPK.

kata Rafael.

Nah, di hari pemeriksaan Rafael, Ketua KPK Firl Bahuri ternyata berada di luar kota. Ia menjadi salah satu pembicara dalam Dialog Publik War On Drugs dengan Tema Optimalisasi Peran BNN, KPK, BNPT, dan LPSK dalam Kompleksitas Penanganan Permasalahan Narkoba, Terorisme dan Korupsi di Auditorium

bilitas, transparansi, demi kepentingan umum, tidak memihak, dan menjunjung prinsip hak asasi manusia.

Jadi, sambungnya, KPK tidak menarget seseorang menjadi tersangka. “KPK tidak memiliki target dan tidak pernah ada, karena sesungguhnya apa yang terjadi di KPK adalah proses penegakan hukum. Tidak ada proses lain, kecuali

proses penegakan hukum,” tegas Firli.

Segala sesuatu yang dilakukan KPK dalam rangka pemberantasan korupsi, tambahanya, tunduk kepada semua ketentuan hukum dan perundang-undangan. “Sekalipun sulit, KPK tetap akan bekerja, begitu jauhnya para pelaku korupsi tetap akan KPK kejar dan sudah kita buktikan. Contohnya, ada delapan kepala daerah di Papua tertangkap oleh KPK,” ungkapnya.

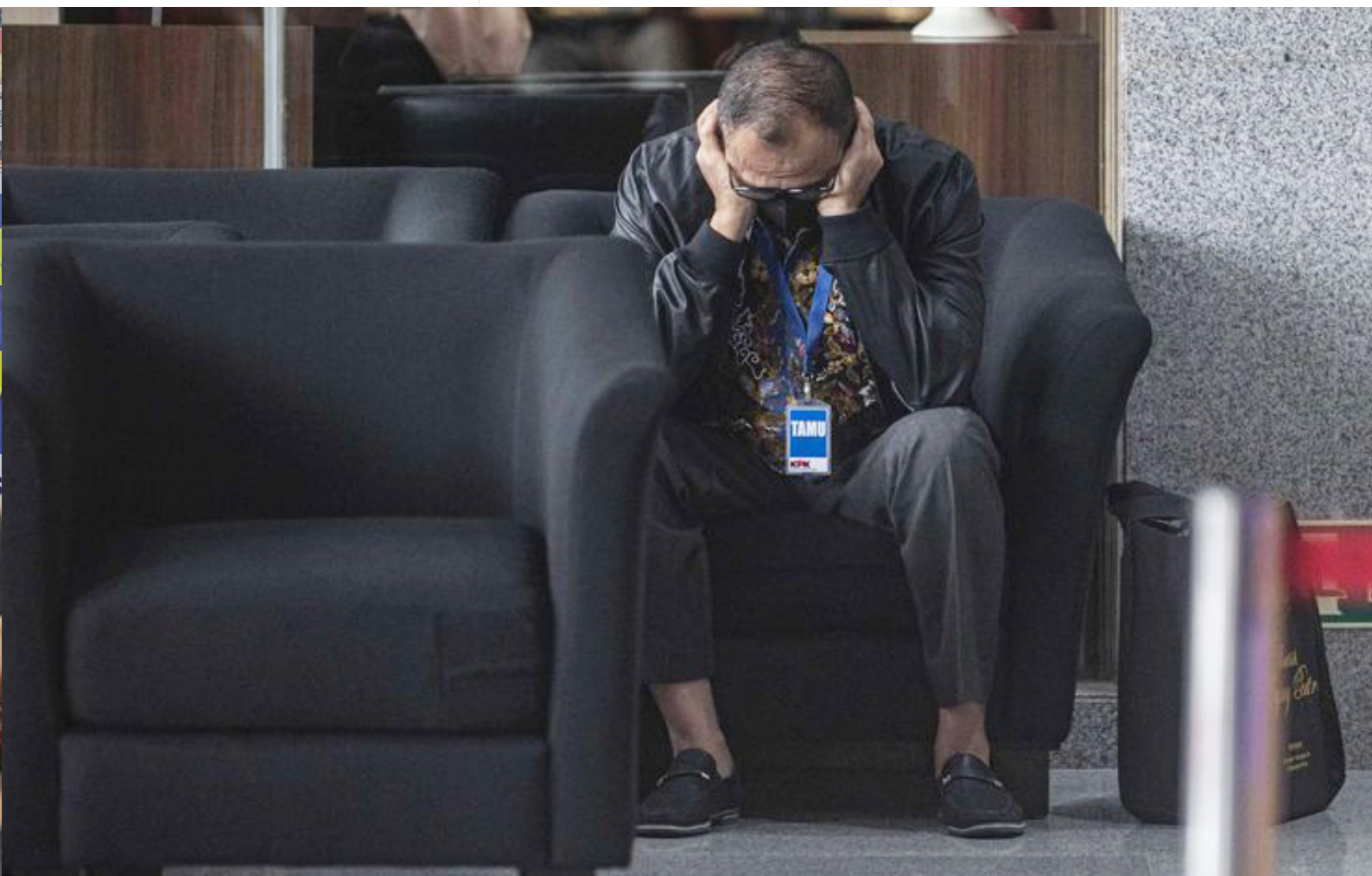
Ia menambahkan, KPK sendiri memiliki model pemberantasan korupsi tidak hanya secara penegakan hukum. Tetapi KPK juga harus memelihara keamanan dan menghormati hak asasi manusia

prinsipnya KPK tidak pernah menetapkan seseorang menjadi tersangka. Sesungguhnya tersangka itu ada karena perbuatan seseorang itu sendiri. Jadi, tersangka ada karena perbuatannya atau keadaannya,” ujarnya.

Terlepas dari pandangan Firli yang menempatkan penegakan hukum sebagai ruang vakum yang tak saling mempengaruhi dengan dinamika masyarakat secara keseluruhan, yang jelas KPK mulai menindaklanjuti hasil pemeriksaan Rafael. Selain sudah meningkatkan statusnya ke penyelidikan, KPK yang dipimpin Firli pun memanggil petugas pajak Wahono Saputro yang is-

hamnya ini selain istri RAT, ada lagi istri orang pajak juga. Kita sebut namanya saudara Wahono Saputro,” ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahlala Nainggolan, Rabu 7 Maret 2023.

Wahono pada 2023 tercatat sebagai Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur. Sebelum kasus Rafael Alun, ia sempat menjadi saksi dalam kasus suap PT EK Prima Ekspor Indonesia (EKP) saat menjabat sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus pada 2017 lalu. Dalam kasus tersebut, mantan penyidik pegawai negeri sipil DJP Handang Soekarno divonis



serta menjamin kepastian hukum dan keadilan juga menjamin keselamatan jiwa manusia.

“Keselamatan jiwa manusia adalah hukum tertinggi dan keadilan harus ditegakkan sekalipun langit runtuh. Itulah yang dipegang oleh KPK,” tandasnya

KPK lanjut Firli, bekerja tanpa pandang bulu, juga tidak terbang pilih, “Pada

trinya memiliki saham pada perusahaan terkait istri dari Rafael.

“Dari hasil analisa kita di data LHKPN, ternyata saudara RAT kan istrinya tercatat sebagai pemegang saham di dua perusahaan yang bergerak di Minahasa Utara yang punya perumahan. Kita lihat detailnya, ternyata ada lagi, bahwa perusahaan yang dua ini pemegang sa-

10 tahun penjara.

Penelusuran lebih jauh terhadap kasus EK Prima Ekspor ini akan menunjukkan betapa rumitnya tali-temali penegakan hukum dan dilema pemerintahan secara keseluruhan. Sedangkan kasus Rafael dan rentetannya, masih harus menunggu proses penegakan hukumnya. ●

MENGHADAPI POLITISASI BERBALUT TIK

KPK sudah memiliki norma, aturan, bahwa salah satu tugas pokok dan fungsinya yang utama adalah menegakkan hukum. Bagaimana hubungan KPK dengan penyelenggaraan negara secara keseluruhan dalam menjalankan fungsinya, itulah politisasi. Pemanfaatan TIK pun menyeruak ke permukaan.

Pertengahan Februari 2023, sekelompok anak muda berusia di bawah 40 dengan atribut Pengurus Besar Komunitas Aktivitas Muda Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung KPK. Mereka menuntut Ketua KPK Firli Bahuri mengundurkan diri.

Aksi demonstrasi itu mulai berlangsung sekitar pukul 13.00 WIB. Sekitar puluhan massa yang memadati area depan gedung KPK menyampaikan aspirasinya. Terlihat mereka membawa bendera hingga poster yang berisi tuntutan kepada Firli. Salah satu poster bertulisan 'Kami Bersuara Menuntut Firli Bahuri Mundur dari Jabatan Ketua KPK'.

Tak lupa, para pengunjuk rasa membawa bahan tertulis untuk awak media

yang meliput aksi. Tertulis tiga tuntutan yang satunya berisi permintaan Dewan Pengawas (Dewas) KPK memeriksa Firli dalam dugaan gratifikasi sewa helikopter. Tuntutan tambahan, para pengunjuk rasa mendesak dilakukan pemeriksaan gratifikasi baliho terhadap Firli.

Apa yang menjadi tuntutan itu sebenarnya sudah diselesaikan. Peristiwa itu pun berlangsung pada 2020 terkait helikopter, sedangkan baliho berlangsung pada 2022.

Dewas juga dituntut memeriksa Firli terkait dugaan gratifikasi baliho. Massa pendemo lalu turut menuntut Firli mengundurkan diri dari jabatan Ketua KPK.

Soal helikopter Firli telah menjalani sidang etik Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada September 2020. Saat itu De-



was memutuskan Firli melakukan pelanggaran kode etik ringan.

Saat itu, sidang putusan Firli digelar di gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis, 24 September 2020. Sidang putusan ini merupakan tindak lanjut laporan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) kepada Dewas KPK soal adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Firli karena naik helikopter mewah.

"Menghukum terperiiksa sanksi ringan berupa teguran tertulis 2 agar terperiiksa tidak mengulangi perbuatannya," kata Ketua Dewan Pengawas KPK, Tumpak Panggabean, membacakan amar putusan dalam sidang etik Ketua KPK, Rabu (24/9/2020).

Hal yang memberatkan adalah Firli tidak menyadari perbuatannya terkait naik helikopter mewah itu melanggar kode etik. Sedangkan hal yang meringankan adalah Firli belum pernah dihukum akibat pelanggaran kode etik.

Dengan putusan ini, Firli dilarang melakukan perbuatan serupa selama

kurun waktu enam bulan. Jika melakukan pelanggaran dalam kurun enam bulan, Firli akan langsung mendapatkan sanksi yang lebih berat berupa sanksi kategori sedang.

Dalam Peraturan Dewas KPK Nomor 02 Tahun 2020 disebutkan, ada tiga jenis sanksi. Salah satunya sanksi kategori ringan dalam bentuk tertulis II seperti yang dijatuhkan kepada Firli.

Atas putusan itu Firli menyampaikan permohonan maaf karena menggunakan helikopter saat berkunjung ke Sumatera Selatan. Firli, yang saat itu menerima sanksi, berjanji tidak akan pernah mengulanginya. "Saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mungkin tidak nyaman," kata Firli saat sidang Dewas KPK di Gedung KPK.

"Putusan saya terima. Saya pastikan saya tidak akan pernah mengulanginya," sambungnya.

Sedangkan mengenai baliho, awal 2022 lalu terpampang antara lain di kawasan kabupaten Lampung Selatan. Beberapa bulan kemudian, masih pada 2022, baliho serupa pun muncul lagi.

Hingga awal 2023, belum terang dan jelas, siapa di balik pemasangannya. Namun tangkapan layar baliho kemudian viral di media sosial termasuk aplikasi pesan ringkas dengan ragam komentar. Pada titik inilah faktor teknologi informasi dan komunikasi menambah kompleksitas politisasi terhadap KPK, dan dengan sendirinya Firli sebagai pejabat tertinggi di lembaga itu.

Soal baliho tadi, Firli menegaskan tidak mengetahui siapa yang berada di balik pemasangan membuat baliho dengan foto wajahnya yang mencolok dan slogan-slogan antikorupsi.

Firli menilai, baliho yang berada di sisi jalan tersebut merupakan bentuk dukungan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi yang dikerjakan oleh KPK. "Terus terang saya tidak tahu siapa dan di mana itu semua dipasang," ujar Firli, Jumat, 17 Februari 2022.

Toh Firli mengucapkan terima kasih kepada pihak yang memasang baliho tersebut. Terlebih jika itu dilakukan untuk mendukung kerja-kerja lembaga



• INFO UTAMA

yang dipimpinnya.

Ia juga menegaskan KPK merupakan lembaga yang independen dan tidak akan terpengaruh oleh pihak manapun. Namun, mantan Kapolda Sumatera Utara itu tetap membutuhkan dukungan masyarakat untuk terus memberantas korupsi di Tanah Air.

"KPK sungguh memahami bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat hanya dilakoni oleh hanya satu lembaga

sedikit saja bahkan tak pernah ditindaklanjuti KPK.

Nuansa politik berbalut TIK pun menyuarakan kembali. "Jadi kalau ada pertanyaan, 'apakah mekanisme pemeriksaan di KPK atau klarifikasi LHKPN di KPK menunggu viral?'. Tentu kami jawab tidak. Ada mekanisme yang secara berkala kami lakukan untuk pemeriksaan atau klarifikasi kepada penyelenggara negara yang dalam

tersebut. Itu bisa jadi salah satu alasan kami untuk bisa lakukan klarifikasi," timpalnya.

Ipi mengatakan ada 380 ribu LHKPN yang masuk ke KPK tiap tahunnya. Dia mengatakan setiap laporan selalu diverifikasi lebih dulu oleh KPK.

"Kami cek kesesuaian isian data hartanya, kami cek kelengkapan dokumennya termasuk surat kuasanya, dan step berikutnya kami bisa periksa yang



ga karena perlu pelibatan masyarakat. Mari kita lawan para pencuri uang negara," ujarnya.

Sekitar setahun setelah Firli berkommentar soal baliho yang viral itu, kompleksitas politisasi berbalut TIK, terjadilah unjuk rasa dengan atribut Aktivis Muda. Beberapa hari kemudian, viral pula video penganiayaan oleh Mario Dandy yang akhirnya menyeret ayahnya, Rafael Alun Trisambodo dan menggelinding bagaikan bola salju yang jelas-jelas menimbulkan pertanyaan tentang kinerja KPK setelah diketahui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang mencurigakan sejak 2009 hingga 2023

verifikasi administratif, kemudian yang kami temukan ada yang tidak wajar," ujar Jubir Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 8 Maret 2023.

Ipi menjelaskan ketidakwajaran harta seorang penyelenggara negara bisa dilihat dari besaran nilai hartanya. Apabila seseorang memiliki harta yang fantastis tapi jabatannya tidak terlalu mentereng, hartanya patut dicurigai.

"Apa yang tidak wajar? Tidak wajar bisa kita lihat dari besaran nilainya. Sangat kecil untuk profil jabatan tertentu atau bisa jadi sangat besar untuk profil jabatan tertentu, yang pada intinya tidak match antar profil jabatan

sifatnya substantif. Yang kemudian dapat kami tindaklanjuti dengan tahapan klarifikasi," sambung Ipi.

Harta para pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun kian menjadi sorotan. Juga viral di media sosial. Antara lain harta Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono yang disebut tidak sesuai dengan profilnya.

KPK pun telah menerima laporan hasil analisis (LHA) terkait harta Andhi Pramono. Gedung Merah Putih pun telah memanggil Andhi Pramono.

Sedangkan Deputy Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan LHA milik Andhi Pramono telah diterima pihaknya sejak

Maret 2022. Laporan itu akan ditindaklanjuti.

"Hari ini kita juga dapat informasi ada di media sosial itu ya Bea cukai Makassar saudara APR. LHA sudah kirim laporan ke KPK Maret 2022 dan sudah kita tindaklanjuti," kata Pahala.

Pahala mengatakan proses klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Andhi Pramono akan dilakukan. KPK akan melakukan

mencakup 160-an laporan dan melibatkan 460 orang. "Itu tahun 2009 sampai 2023, taruhlah 160 laporan lebih sejak itu. Itu tidak ada kemajuan informasinya," ujar Mahfud di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Rabu, 8 Maret 2023.

Kadang kala, lanjut Mahfud MD, respons itu muncul sesudah menjadi kasus, seperti kasus eks Kepala Bagian Umum Ditjen Pajak Jakarta Selatan Rafael Alun Trisambodo. "Kayak yang

Menumpuknya laporan menurut Mahfud MD bukanlah karena Sri Mulyani. Sebab laporan tersebut sudah dari 2009. "Tapi menumpuk sebanyak itu bukan karena Sri Mulyani. Itu ganti menteri sudah empat kali kan sejak tahun 2009 tidak bergerak dan keir-jenan baru memberikan laporan kalau dipanggil kali. Sehingga Pak, Pak, itu hanya kecil-kecil nggak ada masalah gitu, ternyata kalau dianggap nggak



klarifikasi kepada Andhi Pramono pekan depan. "Kita klarifikasi kepada saudara APR, Andhi Pramono ya, mungkin minggu depan akan kita undang," ujar Pahala, Rabu, 8 Maret 2023.

Politisasi berbalut TIK yang melekat dengan KPK itu tampaknya masih akan berlanjut. Apalagi banyak fakta baru yang telah beredar di tengah masyarakat sebagaimana yang dikemukakan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

Mahfud mengungkapkan, pergerakan uang mencurigakan sekitar Rp300 triliun di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Rafael, itu jadi kasus lalu dibuka, lho ini sudah dilaporkan kok didiemin. Dulu Angin Prayitno, sama enggak ada yang tahu sampai ratusan miliar. Diungkap oleh KPK baru dibuka. Nah itu saya kira karena kesibukan yang luar biasa sehingga perlu sistem aja menurut saya," tegasnya.

Toh Mahfud menyatakan salut dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Alasannya Sri Mulyani sudah sejak lama berusaha membersihkan hal-hal seperti itu di lingkungan kementerian. "Saya sangat hormat dan salut pada Bu Sri Mulyani yang begitu hebat untuk membersihkan itu sudah lama mengambil tindakan-tindakan cepat," ungkapnya.

ada masalah, sekarang ada masalah," tukasnya.

Masalah buat KPK juga tentunya. Bayangkan harus menelusuri, katakanlah mengundang 460 orang untuk mengklarifikasi LHKPN-nya. Jika sehari satu orang, maka setahun pun belum selesai.

Dengan tahun politik, ketika transisi kekuasaan berlangsung, di pucuk penyelenggara negara hingga birokrasi kementerian dan lembaganya, politisasi berbalut TIK terhadap KPK semakin sulit terhindarkan. Bagaimana kantor Gedung Merah Putih dan Ketua KPK Firlil Bahuri menghadapinya, pada saatnya akan menjadi kisah lain yang kelak menjadi catatan dan sejarah. ●



DARI PPATK KE KPK

**Dari mana
hendak ke mana
Dari Istana Cipanas
berlanjut ke
Tampaksiring
Kalau boleh rakyat
bertanya
Ada apa uang panas
berlanjut *money laun-
dering***

Salah satu makna leksikon (kamus) uang panas adalah dana yang diperoleh dengan mudah dan biasanya tidak sah. Sedangkan money laundering atau pencucian uang adalah proses melepaskan atribut tidak sah agar dana dapat ditransaksikan dan berubah menjadi sah.

Uang panas dan pencuciannya melekat erat dengan kasus pergerakan dana senilai Rp300 triliun dan melibatkan hampir 500 orang dari berbagai latar belakang. Belum banyak yang terungkap. Namun, beberapa sudah muncul ke permukaan. Bermula dari Rafael Alun Trisambodo.

Koordinator Kelompok Hubungan Masyarakat PPATK M. Natsir Kongah menjelaskan, pencucian uang oleh Rafael melibatkan sindikasi atau kerja sama sejumlah profesional, termasuk spesialis pencucian uang, konsultan pajak, tenaga ahli hukum, hingga jasa berbadan hukum lainnya.

"Itu temuan dari penelusuran PPATK terhadap transaksi atau aliran dana senilai Rp 500 miliar dari 40 rekening yang terkait dengan Rafael Alun," ungkap Natsir Kongah, Rabu, 8 Maret 2023.

Dari sisi hukum, kata bekas wartawan yang mendalami bidang keuangan itu, tidak semua profesional pencucian uang terlibat tindakan pidana pencucian uang (TPPU). Namun, sambungnya, yang menyediakan jasa untuk Rafael Alun ini bisa terjerat dalam pasal suap atau gratifikasi.

"Jadi para profesional ini backgroundnya macam-macam latar belakangnya ada akuntan, ahli hukum, ini yang engineering uang hasil kejahatan tadi. Jadi seolah-olah tampak sah, ini kan pencucian uang yang berusaha mengaburkan," ujar Natsir lagi.

Natsir menjelaskan asal muasal temuan PPATK terhadap transaksi keuangan mencurigakan itu berasal dari laporan lembaga jasa keuangan yang menemukan kejanggalan. Pejabat Humas yang mulai bekerja di masa Kepala PPATK Yunus Husein (2002-2011) itu mencontohkan, kewajiban lembaga penyedia jasa keuangan harus melaporkan kepada PPATK jika ada satu profil nasabah yang melakukan transaksi Rp 500 juta dalam sehari.

Nah, kejanggalan dapat terendus jika para pelaku bertransaksi dengan memecahnya dari berbagai bank, namun, rekening penampungannya tetap. "Dia pecah-pecah kecil-kecil Rp 100 juta pagi di bank ini, Rp 100 juta di bank lain, siangnya, sorenya, dipecah lagi di beberapa bank Rp 300 juta," ungkapnya.

Dari sanalah PPATK menganalisis dengan mendalami sosok Rafael Alun. Ini tahap profiling.

Selanjutnya PPATK memeriksa secara keseluruhan profil sang nasabah yang sedang dianalisis; apa pekerjaannya dan berapa penghasilannya per bulan. Dengan menganalogikan kasus Rafael Alun, PPATK akan meli-

hat keseluruhan transaksi sehingga menemukan kejanggalan antara profil penghasilan dengan nilai transaksi yang berselisih sangat jauh.

Natsir mengandaikan, misalnya saja dengan profil Rafael Alun yang memiliki gaji pokok Rp 5 juta, tunjangan hingga Rp 70 juta, kemudian secara tiba-tiba mendapatkan aliran dana Rp 10 miliar. Hal itu lah yang dinilai PPATK sebagai transaksi yang mencurigakan.

kening milik Rafael Alun sendiri, ada indikasi persoalan-persoalan pajak di dalamnya. Itu baru satu dari sekian banyak pola pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun.

"Kalau secara kasat mata pelaku money laundering sederhana bisa terdeteksi. Tapi, ini caranya diputar-putar dulu sampai ke rekening terduga," jelas Natsir.

Sehingga aliran dana itu tidak lang-

Pun yang dalam proses pencucian uang Rafael Alun melibatkan banyak pihak. Mulai dari ahli hukum, bisnis usaha, hingga konsultan pajak. Sehingga modus pola pencucian uang yang digunakan Rafael cukup beragam.

"Pencucian uang seperti smurfing, memecah-mecah transaksi banyak, pelaku ada juga modus yang selanjutnya upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi, sehingga lebih kecil transaksinya," jelas Natsir.

Modus memecah rekening itu, kata Natsir agar Rafael dan kawanannya bisa melakukan transaksi Rp 500 juta per hari. Sehingga perbankan tidak perlu melaporkan ke PPATK.

"Ini ada kewajiban penyedia jasa keuangan dan jasa itu menyampaikan Rp 500 juta per hari, supaya tidak dilaporkan bank ke PPATK. Makanya dia pecah-pecah," ujar Natsir.

"Makanya dia pecah-pecah, siang bank mana, sore bank mana. Ini untuk menghindari pelaporan ini dilaporkan bank sebagai transaksi mencurigakan," jelas Natsir lagi.

Sejauh ini PPATK memang terus menganalisis pola pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael Alun. Ini adalah bagian dari analisis PPATK terhadap 69 pegawai Ditjen Pajak yang memiliki indikasi LHKPN-nya berselisih jauh dengan nilai transaksi keuangannya.

"Jadi, mutasi debit kredit dari terduga ke pihak-pihak terkait itu, masuk-keluar dihitung sampai saat ini. Tentu kemungkinannya akan bertambah senilai Rp 500 miliar," ungkap Natsir.

"Ada juga konsultan pajak. Jadi, memang menariknya di kasus ini pelaku menggunakan profesional money laundering," kata dia.

PPATK juga mendapat informasi dari masyarakat mengenai sosok dalam konsultan pajak yang terkait harta jumbo Rafael melarikan diri ke luar negeri. Tambahan pula, sejumlah profil pegawai Ditjen Pajak telah viral di media sosial. Bahkan ada yang sudah dipanggil untuk mengklarifikasinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Salah satunya adalah Wahono Saputro yang menduduki jabatan Kepala Kantor Pajak Madya Jaktim



"Bank kemudian sampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan ke PPATK dan PPATK analisis ada pemberian seseorang misalnya," ujar Natsir mencontohkan.

Hasil analisis PPATK, ditemukan bahwa Rafael Alun menggunakan banyak pola pencucian uang. Natsir menjelaskan dari transaksi debit re-

sung ke Rafael Alun, tapi ke pihak yang sudah melakukan kerja sama dengan Rafael atau nominee (perantara) lain.

Nah, fungsi sang profesional money laundering ini, kata Natsir yang menetapkan badan hukum yang sah atau yang dibuat seolah-olah sah. Sehingga penempatan dana Rafael Alun terkesan legal.

saat kasus Rafael merebak. Baik Rafael maupun Wahono mendapat undangan KPK untuk mengklarifikasi LHKPN dan transaksi keuangannya.

Wahono Saputro mulai dikaitkan dengan kasus Rafael setelah istrinya tercatat ikut memiliki saham di perusahaan milik istri Rafael di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengemukakan temuan itu tengah dipelajari oleh tim Direktorat LHKPN KPK.

Sebelumnya, Wahono juga pernah diperiksa KPK sebagai saksi kasus suap pengelolaan pajak pada 2016. Kala itu ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi yang menjerat eks Country Director PT EK Prima Ekspor, Ramapanicker Rajamohanan, dan eks Kasubdit Bukti Permulaan Pajak Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kemenkeu, Handang Soekarno.

Kala itu, Wahono Saputro diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan DJP Khusus Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan Handang akhirnya dikenai sanksi tindak pidana dengan vonis hukuman 10 tahun penjara.

Sementara Rafael dan Wahono adalah aparat Ditjen Pajak, di media sosial viral pula gaya hidup mewah pegawai Ditjen Bea dan Cukai. Salah satunya adalah Eko Darmanto yang telah dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta.

Eko datang ke KPK pada Selasa, 7 Maret 2023 untuk mengklarifikasi LHKPN dan transaksinya. Dalam pemeriksaan tersebut, terungkap berbagai fakta baru. Namun sebelum pemeriksaan, media sosial telah memviralkan gaya hidupnya seperti memamerkan mobil antik hingga pesawat Cessna.

Dari hasil klarifikasi KPK, Eko memperoleh pemasukan dari profesinya sebanyak Rp 500 juta per tahun. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan bahwa berdasarkan informasi di LHKPN, Eko tidak memiliki kekayaan yang fantastis. Namun ada mobil antik yang langka keberadaannya di Indonesia.

Mobil tersebut adalah mobil yang diproduksi tahun 1950-an. Mobil itu bermerek Chevrolet bekas Bel Air pada tahun 1955 senilai Rp200 Juta, dan Dodge Fargo Tahun 1957 senilai Rp150 Juta, serta Chevrolet Apache tahun 1957 senilai Rp200 juta, kemudian ada pula Ford bonco tahun 1972 senilai Rp150 juta.

Berdasarkan laman LHKPN yang dilaporkan oleh Eko pada 31 Desember 2021, ia memiliki utang Rp9 miliar. Utang tersebut dinilai mencurigakan karena pemasukkanya Rp500 juta per tahun dan Pahala akan mengklarifikasi persoalan utang tersebut.

Selain Eko, ternyata sang istri juga turut diklarifikasi oleh KPK. Dalam for-

hun ikut menyebar luas. Dalam tangkapan layar, anak Andhi beberapa kali muncul dengan busana yang terbilang mahal, meski usianya masih tergolong muda. Misalnya aksesoris jepit rambut bernilai jutaan, juga busana bermerek produk Italia berharga puluhan juta rupiah.

Mengenai transaksi Andhi, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan lembaganya sudah menyampaikan temuan pegawai Bea dan Cukai itu kepada KPK sejak awal 2022.

"Sejak awal 2022 lalu, sudah setahun lalu (dilaporkan). Karena ada indikasi itu makanya kami serahkan," kata Ivan, Kamis, 9 Maret 2023.

Menurut Ivan, riwayat transaksi



mulir LHKPN itu terdapat wajib lapor dengan tiga nama. Nama-nama tersebut dapat merupakan penyelenggara negara, pasangannya, dan sang anak.

Satu lagi aparat Ditjen Bea dan Cukai yang viral di media sosial adalah Andhi Pramono. Jabatannya Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar, Sulawesi Selatan. KPK juga sudah menjadwalkan pemanggilannya.

Dalam video yang viral di media sosial, Andhi Pramono terkait dengan rumah mewah seperti istana di daerah Cibubur yang menyebar melalui saluran TikTok. Selain itu rekaman Andhi mengenakan batu safir biru dan jam tangan mahal ikut viral pula.

Bahkan gambar anak perempuan Andhi yang masih berusia belasan ta-

yang ditemukan PPATK menunjukkan pegawai Bea Cukai itu kerap menerima setoran uang panas. "Banyak setoran tunai dari perusahaan-perusahaan," katanya.

Mengenai nilai transaksinya, Ivan membandingkannya dengan modus yang dilakukan Rafael. "Seperti bus AKAP, saling salip," ujar Ivan.

Dari temuan PPATK, kemudian aneka kemewahan yang viral di media sosial, selanjutnya beban KPK mencegah dan memberantas korupsi semakin bertambah. Yang tampil di sini baru empat dari 69 profil yang telah dilaporkan PPATK. Belum lagi jika penelusuran lebih jauh antara 2013-2023. Baik sumber uang panasnya maupun pencuciannya.. •

PUTUSAN KELIRU PENUNDAAN PEMILU

Tak banyak terendus oleh publik, tiba-tiba putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menunda pelaksanaan tahapan pemilu selama 2 tahun 4 bulan 7 hari.

Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN. Jkt.Pst terkait gugatan Partai Prima telah menjadi putusan yang sangat ajaib dan sukar dipahami secara nalar hukum. Setidaknya ada empat kekeliruan mendasar dalam putusan ini.

Pertama, soal kompetensi. Partai Prima telah membawa persoalan serupa ke Bawaslu dan pengadilan tata usaha negara (PTUN) dan semua ditolak. Di UU Pemilu jelas diatur bahwa



Oleh:

ZAINAL ARAFIN MOCHTAR

Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM
Anggota Constitutional and Administrative Law Society
(CALS)

sengketa pemilu harus melalui koridor Bawaslu dan PTUN. Sengketa dalam hal proses, administrasi, dan hasil punya koridor berbeda. Sengketa sebelum pencoblosan, jika terkait dengan proses administrasi, harus selesai di Bawaslu. Sementara jika berkaitan dengan kepesertaan dapat ditempuh hingga PTUN. Partai Prima telah melakukannya, dan semua ditolak.

Menjadi luar biasa karena kasus ini dibawa lagi ke pengadilan negeri. Ini seperti mengusahakan cara apa pun meski itu bukan koridor yang dibenarkan. Dalam istilah antropologi hukum, ini dikenal sebagai window shopping.

Herannya, window shopping ini dibiarkan oleh hakim. Pembiarannya pun terkesan mengada-ada. Putusan tersebut sering mengutip UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tetapi malah menegaskan ketentuan penyelesaian yang koridornya diatur di UU itu dengan membiarkan penggugat melayangkan gugatan melalui koridor yang tak dibenarkan menurut UU. Ada kesan ketiadaan pemahaman utuh atas UU Pemilu.

Gejala window shopping memang bukan khas di wilayah ini saja. Di banyak perkara, ini sering kali menjadi trik yang dilakukan oleh pengacara, pemohon, ataupun penggugat untuk mencari berbagai jalan hukum yang disediakan meski itu bukan jalan yang seharusnya dilewati. Karena itu, di titik inilah keanehannya. PN Jakarta Pusat justru membuka diri untuk digunakan, padahal ia bukan koridor untuk penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pemilu.

Adalah benar, seorang hakim memiliki kemandirian dan keyakinan dalam memutus suatu perkara, tetapi bukan berarti ia bisa akrobatik, tanpa memedulikan ketentuan perundang-undangan, doktrin, dan teori hukum. Belum lagi soal implikasi putusan. Perkara yang telah diputuskan oleh lembaga yang memiliki kompetensi seakan kemudian dimentahkan oleh putusan ini. Pertanyaannya, mana yang mengikat dan harus dilaksanakan?

Kedua, persoalan substansi perkara. Taruhlah, misalnya, kita baik sangka dan menganggap ini adalah penggunaan judicial activism yang dapat dibenarkan. Judicial activism adalah tendensi kekuasaan kehakiman untuk masuk ke dalam kewenangan yang dimiliki oleh kelembagaan lain.

Namun, jangan dilupakan bahwa kodrat dari pengadilan ini adalah perkara perdata. Perkara perdata terbentuk dari relasi antar-individu. Memang benar ada konsep lama tentang "perbuatan melawan hukum oleh penguasa", tetapi tetap saja dikaitkan dengan kerugian yang dilakukan oleh seorang pejabat publik dan mengakibatkan kerugian bagi pihak penggugat.

Sesungguhnya, ini pun sudah sangat berkurang semenjak kehadiran PTUN pada 1986. Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2019 juga ikut mengatur dan mendetailkan hal itu. Oleh karena itu, perbuatan melawan hukum menjadi jauh lebih sempit karena hanya dikaitkan pada kerugian keperdataan.

Nah, di sinilah menariknya. Artinya, walaupun kompetensinya dianggap dapat diterima, paling akhir ia hanyalah bisa memerintahkan KPU untuk melakukan verifikasi atas Partai Prima. Hal yang langsung berkaitan dengan hak Partai Prima untuk ikut dalam pemilu.

Di titik ini, kritik juga harus dilontarkan ke Partai Prima yang dalam gugatannya justru meminta penundaan pemilu hingga 2 tahun 4 bulan 7 hari. Bagai gayung bersambut, PN Jakarta Pusat mengiyakan. Padahal, permintaan Partai Prima tentu

tidak tepat. Namun, ketidaktepatan itu malah dibenarkan dan dijadikan sandaran untuk memutuskan oleh ketiga hakim yang ada. Tentu ini adalah kekeliruan kedua yang tak kalah penting.

Belum lagi jika diperpanjang perdebatannya hingga soal perbuatan melawan hukum jenis apa yang diminta. Karena sesungguhnya yang mungkin adalah perbuatan melawan hukum oleh penguasa, yang dalam putusan ini tidak mengarah ke sana.

Jika soal kompetensi, alasan judicial activism masih mungkin digunakan oleh para hakim berapologi, tetapi pada jenis kekeliruan yang kedua ini sungguh teramat fatal. Sulit untuk dipercaya jika hakim malah tidak memiliki kemampuan substantif yudisial untuk hal yang sesederhana ini.

Ketiga, kekeliruan fatal yang masih berkaitan dengan substansi perkara adalah apa mungkin putusan perdata yang seharusnya mengembalikan hak Partai Prima berakibat sangat substansial bagi hukum publik, yakni pelaksanaan pemilu dan hak-hak yang menyertai di dalamnya. Misal, hak partai-partai lain peserta pemilu ataupun hak pemilih.

Seperti halnya dengan kesalahan yang kedua, mustahil hal ini tidak disadari oleh para hakim. Bagaimana bisa hak keperdataan Partai Prima ia tegakkan, dengan membiarkan pelanggaran terhadap begitu banyak hak lain dari banyak pihak lain. Lagi-lagi karena putusan pada rezim keperdataan yang sangat berbeda sifatnya dengan hukum publik. Sulit diterima akal sehat, demi Partai Prima, hak-hak lain dari banyak pihak lain tak apa untuk dilanggar.

Keempat, yang tidak kalah keliru adalah ketika memaksakan bahwa putusan ini harus dilaksanakan meskipun dengan pertaruhan penundaan pemilu. Dengan jumlah yang diputuskan hakim berdasarkan gugatan, pemilu terlempar hingga pertengahan 2025.

Adalah benar, seorang hakim memiliki kemandirian dan keyakinan dalam memutuskan suatu perkara, tetapi bukan berarti ia bisa akrobatik, tanpa memedulikan ketentuan perundang-undangan, doktrin, dan teori hukum.

Kerja mengawasi

Memang putusan ini belum inkraacht, masih sangat bergantung pada pihak KPU, apakah akan melakukan banding atau tidak. Namun, jika sudah tetap, maka berimplikasi pada penundaan pemilu.

Padahal, pemilu tak dapat dimundurkan karena pemilu sangat berkaitan dengan agenda ketatanegaraan dan pengisian jabatan kenegaraan yang ada di dalamnya, khususnya pada sistem pemerintahan presidensial, yakni presiden dan parlemen. Termasuk di dalamnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal-hal yang berkaitan dengan itu diatur di dalam UUD yang secara tegas memberikan masa jabatan dan waktu limitatif pelaksanaan pemilu.

Oleh karena itu, putusan hakim ini tak hanya membongkar UU Pemilu serta jadwal rigid kepemiluan yang sudah disepakati pemerintah dan DPR, tetapi lebih jauh juga menghancurkan aturan dasar di dalam UUD yang menyatakan pemilu haruslah dilaksanakan setiap lima tahun, menyesuaikan dengan masa jabatan pemerintah dan parlemen.

Menjadi sangat tidak wajar, pengadilan negeri, yang dalam hal ini adalah pengadilan perdata, memberikan putusan yang malah berefek menunda pemilu yang domainnya jelas di dalam UUD ataupun UU. Ajaran dasar konstitusionalisme menegaskan, semua orang harus taat pada konstitusi. Termasuk di dalamnya bukan hanya aturan konstitusi, melainkan juga nilai-nilai, yang salah satunya adalah limitasi kekuasaan. Dengan kata lain, putusan ini sesat, teramat keliru, serta mengada-ada.

Sekali lagi, sulit untuk percaya bahwa hakim tidak memahami prinsip-prinsip sederhana dalam peradilan dan perkara perdata yang memang sudah menjadi makanan mereka sehari-hari. Muncul dugaan, jangan-jangan ada sesuatu di belakangnya. Dan karena alasan inilah sistem-sistem pengawasan hakim haruslah bekerja atas putusan ajaib ini.

Mahkamah Agung (MA), biar bagaimanapun, masih memegang kontrol atas hakim yang berada di bawahnya. MA harus memeriksa apakah ini benar-benar lahir dari "logika dan pendapat" hakim ataukah karena hal lain.

Termasuk di dalamnya bagaimana MA bisa memastikan bahwa langkah hukum lanjutan dari putusan keliru ini bisa mengembalikan putusan ke jalur yang benar dengan konsep yang tepat. Hakim pengadilan tinggi, tatkala KPU melakukan banding, harus menempatkan kembali kerangka-kerangka dasar dan konsepsi dasar, dan tak membiarkan putusan ajaib ini berlanjut.

Tagihan atas peran MA juga tidak berhenti sampai di sini. Harus ada langkah konkret MA untuk membatasi gejala window shopping. Praktik yang terjadi sudah terlalu banal dan diperlihatkan di berbagai tingkatan dan jenis peradilan sehingga seakan-akan suatu kasus tidak punya koridor pasti dan segala cara dipakai untuk mencoba-coba.

Alih-alih menjaga hak konstitusional pencari keadilan, sangat mungkin hal itu malah berubah menjadi involusi keadilan manakala dibiarkan terlalu banyak jalan yang terbuka.

Kedua, Komisi Yudisial (KY). Meskipun senantiasa ada perdebatan mendasar sejauh mana KY bisa melakukan pemeriksaan jika dikaitkan dengan substansi putusan, saya kira tindakan hakim dengan putusan ajaib ini sangat berpotensi berkelindan dan mengganggu kehormatan, keluhuran, martabat, dan perilaku hakim. Di sinilah KY harus kembali bekerja dan menunjukkan serta menegakkan mandat konstitusinya.

Jangan biarkan pemilu ditunda

Tagihan yang paling utama sesungguhnya adalah pada komitmen semua komponen bangsa ini dalam menyelenggarakan pemilu, termasuk KPU, DPR, bahkan Presiden. Mereka harus serius untuk memastikan pemilu tetap berlangsung. Kerja-kerja mereka selama ini dalam upaya memastikan bahwa pemilu tetap terselenggara adalah hal yang harus dilanjutkan.

Pemilu adalah agenda bersama yang memang membutuhkan komitmen bersama. Jangan lagi dibiarkan agenda peralihan kekuasaan menjadi agenda kepentingan politik tertentu yang bisa merusak agenda kepemiluan. Kita semua harus mengawal dan menyukseskan, karena kesuksesan pemilu menjadi salah satu syarat dalam menyelesaikan transisi demokrasi dari otoritarian menuju demokrasi yang terkonsolidasi. ●



MASUK 3 BESAR PROVINSI YANG BERHASIL TURUNKAN ANGKA STUNTING

Kegigihan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) di bawah duet kepemimpinan Gubernur H Herman Deru dan Wakil Gubernur H Mawardi Yahya (HDMY) dalam menurunkan angka stunting, membuahkan hasil positif.

Terbukti Sumsel masuk dalam tiga besar di Indonesia sebagai provinsi dengan penurunan angka stunting 6,2 persen melebihi capaian nasional di 2022.

Menteri Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin dalam acara Rakernas Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Banggakencana) dan Penurunan Stunting yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo, di Auditorium BKKBN Halim PK Jakarta

Timur, Rabu (25/1) pagi, merinci berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, penurunan stunting di Provinsi Sumsel mencapai 6,2 persen.

Dimana sebelumnya pada tahun 2021 sebesar 24,8 persen sehingga menjadi 18,6 di tahun 2022.

"Saya ucapkan terimakasih, terutama ke Gubernur, bupati / walikota, target ini terjadi masa pandemi bukan masa biasa. Mudah-mudahan masa pandeminya sudah terkendali, tahun ini bisa lebih baik. khususnya Provinsi Sumsel, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan, turunnya kepala di atas 5 persen itu saya ucapkan terimakasih," katanya.

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan capaian Provinsi Sumsel tersebut sangat baik bahkan melebihi capaian nasional.

"Jauh di atas capaian nasional yang 2,8 persen. Tentu ada langkah-langkah terobosan yang berhasil dilakukan oleh Sumatera Selatan," ujarnya.

Namun lanjut Muhadjir, ada juga beberapa provinsi yang tidak mengalami penurunan atau bahkan kasus bertambah sehingga perlu menjadi perhatian bersama.

"Ada beberapa provinsi yang justru mengalami kenaikan. Namun bukan berarti belum ada upaya yang keras untuk menurunkan stunting. Faktor di luar kendali manusia bisa menjadi penyebab antara lain terpaan bencana yang bertubi-tubi seperti terjadi di NTB dan Sumatera Barat," jelasnya.

Dia menegaskan, model dan inovasi



cara penurunan stunting Sumatera Selatan bisa ditularkan di berbagai provinsi agar penurunannya bisa tercapai.

"Sebagian terobosan bisa diaplikasikan di tempat lain, sebagian bisa dengan modifikasi, tetapi ada yang tidak bisa diaplikasikan karena lebih terkait dengan budaya dan kearifan lokal," tutur Muhadjir.

Sementara Gubernur Sumsel H Herman Deru menyampaikan apresiasinya atas kerjasama berbagai pihak dalam menekan angka stunting di Sumsel. Sebab lanjut dia sinergitas antara Pemprov dengan Pemkab/Pemkot merupakan suatu keharusan di samping peran dari TP PKK, Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan organisasi wanita lainnya yang telah turut andil dalam menurunkan stunting.

"Apa yang dicapai Pemprov Sumsel merupakan akumulasi dari hasil kerja para Bupati/Walikota serta kalangan organisasi wanita termasuk petugas penyuluh kesehatan yang ada di desa-desa," tegas Herman Deru.

Untuk diketahui sejumlah upaya dilakukan Pemprov Sumsel bersama dengan Pemkab dan Pemkot dalam menekan angka stunting diantaranya dengan memasifkan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) yang merupakan satu terobosan dalam mengubah pola pikir masyarakat dari sebelumnya sebagai konsumen menjadi penghasil.

Artinya, masyarakat dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga dengan cara menghasilkan pangan sendiri untuk pemenuhan gizi keluarga.

Selain itu Pemprov Sumsel mengoptimalkan Satuan Tugas Tenaga Pendamping Keluarga (TPK) untuk menekan angka kasus kekerdilan atau gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis (stunting) dengan mengoptimalkan Satgas TPK yang didukung tenaga bidan, kader PKK, dan kader Keluarga berencana.

Revitalisasi posyandu yang tersebar di pelosok Sumsel diikuti dengan peremajaan timbangan digital keseluruhan pusat layanan kesehatan tersebar di 17 Kabupaten/kota, serta penyediaan ruangan khusus bagi ibu menyusui di tempat kerja.

Bahkan di tahun anggaran 2020 lalu, Pemprov Sumsel mengalokasikan Rp10,4



miliar untuk pencegahan stunting melalui pemberian makanan tambahan (PMT) pada balita kurus dan ibu hamil kurang energi kronis (KEK) pada enam kabupaten/kota prioritas pencegahan dan penurunan stunting di Sumsel.

pemberian penghargaan kepada Gubernur Herman Deru yang diserahkan oleh Penyuluh KB Ahli Utama BKKBN RI Drs. Eli Kusnaeli disela-sela pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Forum Koordinasi Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana

nifikan," tegas Eli Kusnaeli.

Lebih jauh dia menambahkan, angka stunting Provinsi Sumsel yang sebelumnya 24,8 persen pada Tahun 2021 dapat diturunkan dengan cepat sebesar 6,2 persen atau menjadi 18,6 persen di Tahun 2022.

"Angka ini sebelumnya tidak pernah dicapai, ini merupakan hasil dari kepemimpinan Bapak Gubernur yang tentu saja kepemimpinan dari para bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota di Sumatera Selatan," tambahnya.

Dia menilai Sumsel saat ini sudah mulai memiliki banyak bonus demografi. Sebab kedepan jumlah penduduk yang besar adalah aset pembangunan



Alhamdulillah dengan kepemimpinan Pak Gubernur Herman Deru, angka stunting Provinsi Sumatera Selatan cepat menurun. Turunnya pun sangat signifikan

yang luar biasa, dengan catatan jumlah penduduk harus berkualitas. Karena itu penurunan stunting tergantung dengan penduduk yang berkualitas.

"Upaya meningkatkan kualitas Sumber daya manusia yang efektif dan efisien, berbicara mengenai stunting kita harus multi program, kata kuncinya kolaborasi dan sinergitas," tandasnya.

Gubernur Herman Deru mengakui suksesnya penurunan angka stunting yang pesat di Sumsel bukan hanya buah dari kerja keras dari Pemprov Sumsel saja. Melainkan melibatkan semua pihak, mulai dari Bupati/Walikota, stakeholder, TNI/Polri dan dukungan seluruh masyarakat.

"Kita bisa terus jalan bekerja secara kolaboratif, artinya dengan momen ini, mari kita laksanakan kerja baik, meskipun dianggap jadul, Sumsel terbaik penurunan stunting, tidak mungkin bekerja



Penghargaan dari Kepala BKKBN RI

Atas keberhasilannya menurunkan angka stunting ini Gubernur Sumsel H Herman Deru mendapatkan apresiasi langsung dari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang telah berhasil menurunkan angka stunting sangat signifikan sebesar 6,2 persen dalam percepatan penurunan stunting di Indonesia Tahun 2022.

Apresiasi Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) tersebut berupa

na (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi tahun 2023 yang dipusatkan di Ballroom Hotel Novotel Palembang.

Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo pemberian penghargaan kepada Gubernur Herman Deru yang diserahkan oleh Penyuluh KB Ahli Utama BKKBN RI Drs. Eli Kusnaeli.

"Alhamdulillah dengan kepemimpinan Pak Gubernur Herman Deru, angka stunting Provinsi Sumatera Selatan cepat menurun. Turunnya pun sangat sig-

tanpa peran serta Bupati/walikota dan stakeholder. Ini menjadi tugas berat bagi kita untuk mempertahankannya,” tegas Herman Deru.

Gubernur menambahkan jauh sebelum membahas persoalan untuk menurunkan angka stunting, harus lebih dulu mengetahui tujuan dan targetnya. Yakni mempersiapkan generasi menghadapi bonus demografi pada 25 hingga 30 tahun mendatang, dimana penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar dibanding usia nonproduktif.

“Alangkah baiknya setelah kita sukses menurunkan 6,2 persen, kita sukses besar, pasti orang akan mencari resep kita. Kita jangan mati gerak, jangan star syndrome. Peran ibu-ibu sangat dibutuhkan, ayo sama-sama mencegah dan mengatasi masalah ini, target kita tetap 1 digit,” tegasnya.

Sementara Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumsel, Mediheryanto, mengaku optimis Sumsel akan berhasil mencapai target menurunkan angka stunting sesuai dengan target Presiden Joko Widodo yakni menurunkan angka stunting sebesar 14 persen pada tahun 2024.

“Alhamdulillah berkat kerja Pak Gubernur dan dukungan semua pihak Sumsel bisa menurunkan stunting 6,2

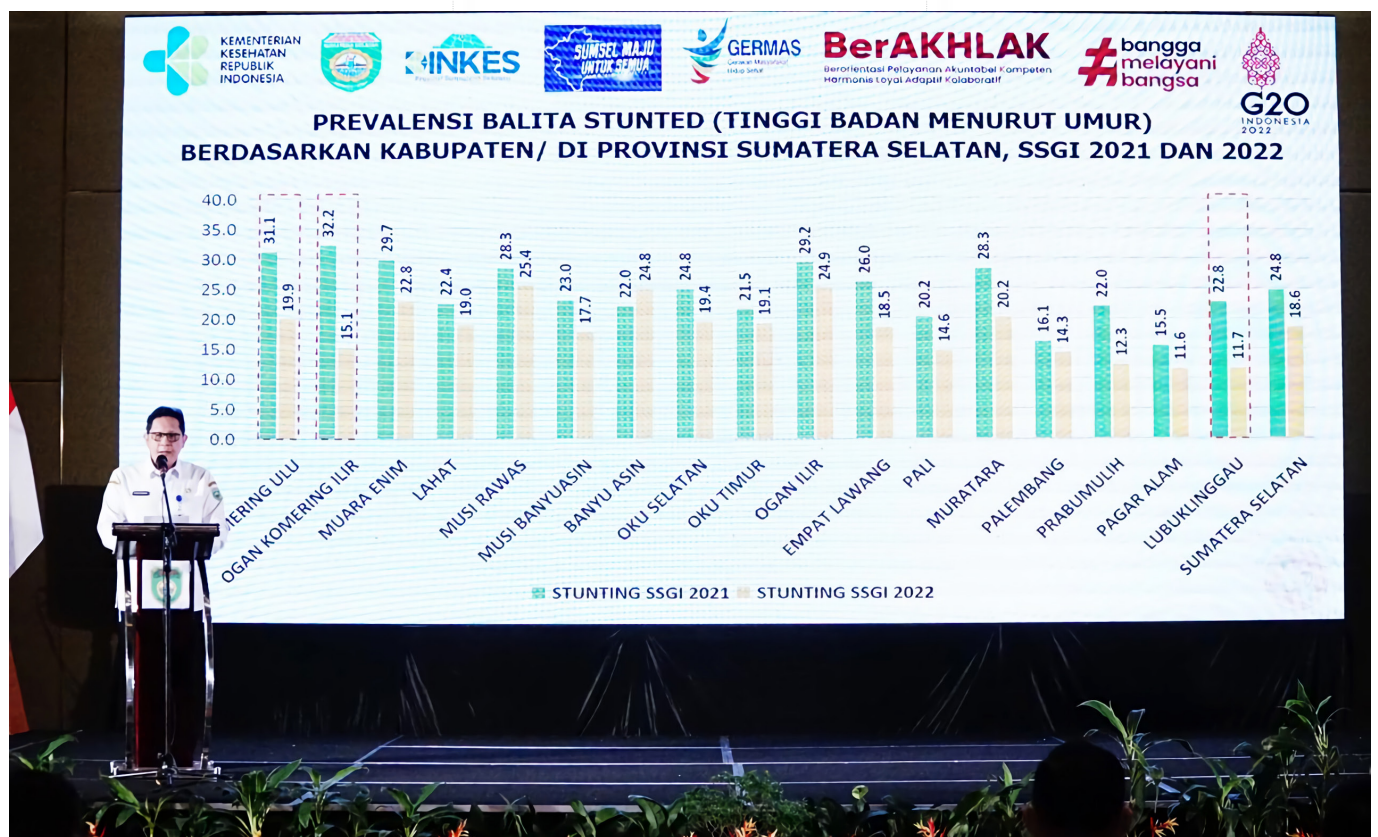


persen itu tertinggi se-Indonesia pada Tahun 2022. Kita ditargetkan Bapak Presiden menurunkan angka stunting di 2024 turun sebesar 14 persen. Posisi sekarang 18,6 persen jadi hanya tinggal 4,6 persen lagi, kita masih punya waktu 2 tahun harapan kita Sumsel bisa menurunkan angka stunting di bawah 14 persen,” tandasnya.

Dalam kesempatan ini juga diumumkan Hasil Survei Status Gizi Indonesia Tahun 2022 oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, dimana Kabupaten

Ogan Komering Ilir (OKI) berhasil menurunkan stunting 17,1 persen, Kabupaten Ogan Komering Ulu 11,2 persen, dan Kota Lubuk Linggau sebanyak 11,1 persen berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan.

Dilanjutkan dengan serahkan mobil operasional oleh Gubernur kepada Ketua Ikatan Penyuluh KB se-Sumsel, serta Penyerahan Penghargaan atas partisipasi Kabupaten/kota yang dalam program percepatan penurunan stunting di Sumsel. •rhd/***



RASIO LISTRIK HINGGA PELOSOK SUMSEL CAPAI 99,01 PERSEN

Pemerataan pembangunan infrastruktur berupa jalan, jembatan termasuk kebutuhan listrik masyarakat sampai ke pelosok desa sudah menjadi komitmen Gubernur Sumsel H Herman Deru. Bahkan untuk menunjukkan komitmen itu Gubernur Herman Deru terjun langsung ke pelosok desa untuk melihat kondisi pembangunan di wilayah tersebut.

Salah satunya saat Gubernur Herman Deru resmikan listrik masuk desa yang dipusatkan di Lapangan Desa Ulak Kembang Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Muba, Kamis (26/1). Adapun jaringan listrik yang diresmikan tersebut meliputi Desa Ulak Kembang, Desa Sungai Angit Kabupaten Muba. Selanjutnya listrik masuk Desa Harisan Jaya Kabupaten OKU Timur dan Desa Perajen Jaya Kabupaten Banyuasin.

Dengan diresmikannya listrik masuk desa tersebut maka rasio listrik di Sumsel sudah tercapai 99,01 persen.

Sejumlah warga yang dimintai tanggapannya terkait dengan peresmian listrik masuk desa oleh Gubernur Sumsel H Herman Deru ini, mengaku sangat

bersyukur dan ucapan terimakasih untuk Herman Deru.

Seperti yang diungkapkan Saiful warga desa Ulak Kembang misalnya, dia mengaku sudah lama warga desa setempat menantikan listrik sebab hampir puluhan tahun warga sekitar mengandalkan penerangan genset. Setelah ada listrik masuk desa dirinya akan sangat terbantu dalam memutar roda ekonomi. Anak-anak sekolah juga bisa belajar dengan lebih giat dengan adanya penerangan listrik.

"Tahun 2008 lalu tiang listriknya dipasang. Alhamdulillah hari ini diresmikan penggunaannya oleh pak Gubernur. Terimakasih nian kami berkat perhatian pak Herman Deru desa kami terang benderang terpasang listrik," katanya.



Hal yang sama juga diungkapkan Romaidah warga lainnya yang mengaku senang desanya sudah masuk listrik.

"Berkat dipimpin Gubernur Herman Deru cita-cita masyarakat terwujud. Alhamdulillah tahun ini sudah masuk listrik. Kami sangat senang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata," imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru dalam arahannya mengatakan program listrik masuk desa merupakan komitmennya yang berkeinginan mewujudkan Sumsel 100 persen teraliri listrik.

"Kenapa PLN kita dorong, selain Sumsel lumbung energi tujuan kita juga menjadikan Sumsel terang teraliri listrik 100 persen. Karena dengan listrik masuk desa ini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat," imbuhnya.

Menurut Herman Deru banyak sekali manfaat listrik masuk desa selain dapat meningkatkan produktivitas masyarakat tapi juga memberikan efisien biaya kebutuhan sehari-hari.

"Saya bilang ke PLN kita jangan memikirkan kota saja tapi desa juga membutuhkan listrik untuk kebutuhan sehari-hari. Alhamdulillah PLN menyambut baik," ungkapnya.

Herman Deru menyebutkan dalam pemasangan listrik masuk desa tentu tidak mengeluarkan biaya yang sedikit maka itu dia ingin masyarakat dapat memanfaatkan dengan baik. Bahkan dengan diresmikannya listrik masuk desa tersebut lanjut dia merupakan akhir dari penantian masyarakat setempat selama puluhan tahun.

"Listrik ini jauh lebih murah jika dibandingkan menggunakan mesin genset. Nah ini yang saya harapkan sisa uang itu untuk keperluan biaya sekolah dan biaya lainnya. Listrik ini banyak manfaat seperti keperluan pendidikan, ibadah dan ekonomi," imbuhnya.

Gubernur Herman Deru berharap dengan teraliri listrik kemajuan desa dan kawasan lainnya akan terangkat dan maju sejajar dengan desa lainnya.

Karena itu dia mengajak warga untuk mendukung program Sumsel Mandiri Pangan.

"Listrik sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Sebab dengan adanya listrik kita akan lebih produktif dalam mewujudkan Sumsel mandiri pangan," tambahnya.

Kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari lanjutnya, dapat tercapai dengan cara mengubah mindset yang tadinya membeli menjadi penghasil melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP).

"Tadi saya lihat setiap rumah tadi ada pot-pot. Nah saya minta beberapa pot-pot itu ditanamkan cabe dan tanaman untuk kebutuhan sehari-hari, inilah untuk mengubah pola pikir namanya Program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)," tuturnya.

Sementara itu, Senior GM PLN UID S2JB, Jaka Sumantri mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Herman Deru sudah berkontribusi dan menam-



bah rasio listrik salah satunya di 4 Desa di Sumsel yang akan diresmikan ini.

Dia menyebutkan dalam memenuhi listrik di 4 Desa di tiga Kabupaten di Sumsel ini, PLN membangun saluran tegangan menengah sepanjang 56,63 kms, jaringan pembangunan saluran tegangan rendah sepanjang 34,62 kms

trik sehingga akan meningkatkan rasio menjadi 99,38 persen.

"Kami akan terus berusaha untuk melayani masyarakat dalam menerangi negeri. Ini bentuk komitmen PLN kepada masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Semoga rasio teraliri listrik di Sumsel bisa mencapai

masuk desa ini memang program PLN namun tentu juga atas izin dan restu pak Gubernur Herman Deru dalam pemerataan pembangunan di Sumsel.

Di Kabupaten Muba, kata Apriadi masih ada 3 desa yang masih memerlukan program listrik desa, bahkan ada satu desa sangat sulit dijangkau karena berada di tengah hutan kawasan yaitu Desa Sako Suban Kecamatan Batang Hari Leko.

Termasuk Desa Epil Barat Kecamatan Lais, juga belum teraliri listrik karena terletak di seberang sungai.

"Kami mohon dukungan Pak Gubernur bersama PLN di tahun 2023 dapat di program listrik masuk desa sehingga Muba khususnya Sumsel 100 persen teraliri listrik bisa terealisasi dengan baik," harap Apriadi.

Terjang Jalan Berlumpur, Wujudkan Mimpi Warga Desa

Upaya pemerataan pembangunan yang dikatakan Gubernur Herman Deru bukan hanya sekedar ucapan belaka. Saat mendengar ada desa yang belum teraliri listrik dan terisolasi, Gubernur langsung bergerak cepat.

Dengan menyusuri jalan berlumpur parah sejauh kurang lebih 5 kilometer tak menyurutkan langkah Gubernur Herman Deru demi menyambangi Dusun Saluran, Desa Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang viral lantaran disebut tak tersentuh listrik dan pembangunan sejak puluhan tahun silam.

Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, Gubernur Herman Deru turut mengajak GM Unit Induk Distribusi (UID) PLN S2JB, Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Pemprov Sumsel Dharma Budhy, Kepala Dinas PU Perkim Ir H Basyaruddin Akhmad, Kepala Dinas PSDA Provinsi Sumsel, Ir. Herwan dan Kepala Dinas PUBM meninjau langsung Dusun Saluran, Rabu (15/2) siang.

"Awalnya medsos saya beberapa waktu lalu dikirim informasi tentang dusun ini. Saya sempat berkomunikasi dengan pemilik akun tersebut, namun setelah beberapa kali akhirnya hilang komunikasi. Mungkin dia takut saya marah. Padahal tidak, saya justru mau berteri-



dan 24 unit gardu distribusi dengan total investasi senilai Rp. 15,5 miliar.

Dengan sudah terbangunannya aliran listrik empat desa tersebut maka capaian rasio teraliri listrik di Sumsel meningkat dari 98,98 persen tahun 2021 menjadi 99,01 persen pada tahun 2022.

PLN pada tahun 2023 menargetkan 12 desa baru di Sumsel untuk teraliri lis-

100 persen. Insya Allah kita akan mencapai di tahun 2024," ungkapnya.

Ditempat yang sama, Pj. Bupati Musi Banyuasin, H Apriadi mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Herman Deru yang sudah berkenan dan hadir disini sekaligus meresmikan aliran listrik masuk desa.

Apriadi mengatakan program listrik

makasih. Berkat informasinya saya sampai kesini dan melihat langsung,” ujarnya saat berdialog dengan warga setempat.

Setelah menginjakkan kaki langsung ke dusun yang dihuni sekitar 500 jiwa itu, Gubernur Herman Deru pun tak menunggu lama dan spontan merespon keinginan warga untuk merasakan aliran listrik dan akses jalan beraktivitas sehari-hari yang belum juga terwujud sejak 30 tahun lebih.

“Ini GM UID S2JB, orang nomor satunya saya bawa langsung kesini. Untuk apa? Supaya bisa melihat langsung dan dapat menjawab keinginan dan mimpi bapak/ibu. Sudah dengarkan tadi, paling lambat semester satu tahun ini listrik sudah bisa masuk kesini,” jelas Herman Deru langsung disambut tepuk tangan riuh warga yang sudah lama menantikan sambungan listrik di dusun tersebut.

Tak hanya mengupayakan aliran listrik untuk warga setempat. Terkait permintaan pembangunan akses jalan berlumpur yang sempat membuatnya tergelincir dalam perjalanan ke Dusun Saluran, ia pun berkomitmen menjawab mimpi masyarakat itu secepatnya.

“Untuk akses jalan kita akan usahakan tahun ini. Namun karena jalan ini banyak terdiri dari jembatan mungkin dilakukan bertahap dulu agar bisa dilalui kendaraan roda dua menggunakan Bangubsus. Secepatnya akan kita penuhi,” ujarnya yang langsung disambut gembira oleh warga.

Menurut Herman Deru, pembangunan akses jalan ini akan diupayakan Pemprov Sumsel secepatnya agar masyarakat tidak lagi kesulitan mengangkut hasil bumi untuk didistribusikan ke pasar-pasar tradisional. Karena seperti diketahui sebagian besar masyarakat Dusun Saluran bekerja sebagai petani sayur-sayuran, buah dan padi.

Jika musim hujan, mereka terpaksa mengangkut hasil bumi menggunakan perahu getek karena satu-satunya akses jalan darat kerap terendam air dan sulit untuk dilewati. Hal ini cukup memberatkan mereka karena untuk menggunakan getek mereka harus menyediakan ongkos yang lebih besar.

Selain mengupayakan Desa Saluran segera terang benderang teraliri listrik, dan membangunkan akses jalan untuk warga, dalam kesempatan itu Gubernur

Herman Deru juga membantu bedah rumah untuk lima rumah warga yang sudah tidak layak huni.

General Manager (GM) Unit Induk Distribusi Sumsel, Jambi dan Bengkulu (UID S2JB), Amris Adnan dalam sambutannya mengatakan support Gubernur Sumsel H. Herman Deru luar biasa untuk pemerataan listrik di Sumsel.

Salah satunya adalah peninjauan yang dilakukan hari ini, sehingga mereka bisa langsung melihat kondisi di lapangan.

“Perjuangannya lumayan untuk sam-

Merekapun berharap dengan kedatangan Gubernur Sumsel Herman Deru langsung kali ini, sisa jalan tersebut dapat diselesaikan hingga ke dalam dusun.

“Kami mengajukan proposal ke kabupaten dan diteruskan ke provinsi. Alhamdulillah dapat Bangubsus, dan dibangun sepanjang 1,4 kilometer. Harapan kami normalisasi jalan ini bisa sampai ke dalam” jelasnya.

Menurutnya warga pun merasa senang semua saat mendapat informasi bahwa Gubernur Herman Deru datang langsung hari ini.



pai kesini. Hal ini berkat Pak Gubernur yang mengajak kesini. Insya Allah bisa kami bangun (sambungan listrik) disini semester 1. Namun karena banyak pohon kami mohon dukungannya untuk ini agar dibantu ditebang,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Dusun Saluran, Kabupaten Banyuasin, Hidayat mengatakan sebenarnya jalan ke Dusun Saluran ini belum tersentuh pembangunan 30-35 silam.

Selain berlumpur jalan juga cukup sulit dilalui karena banyak berlubang dan terpaksa ditambah warga dengan kayu dan bambu seadanya.

Pembangunan itu baru terasa pada tahun 2022 melalui Bantuan Khusus Gubernur (Bangubsus). Dimana jalan utama mereka menuju Kota Palembang yang diajukan sepanjang 3 Km telah dibangun separuhnya sejauh 1,4 kilometer.

“Warga senang semua, seperti mendapat rezeki karena harapan warga untuk jalan ini sudah 30 tahun lebih,” ujarnya sumringah.

Mewakili warga Dusun Saluran, ia berharap Bangubsus dari Gubernur Herman Deru dapat membuat peningkatan jalan ini dapat dilakukan sepanjang 4,5 Km lagi dan rampung sampai ke dalam dusun mereka.

Menurut Hidayat, selama ini warga kesulitan karena jalan tersebut. Baik untuk pergi sekolah maupun menjual hasil panen ke pasar-pasar. Sementara untuk menggunakan getek.

Termasuk jika ada warga yang sakit dan mendesak untuk dibawa ke rumah sakit. Untuk itu mereka sangat berharap Bangubsus Gubernur Herman Deru dapat mewujudkan mimpi warga Dusun Saluran yang sudah terpendam sangat lama. •rhd/**



PRABOWO BAHAS KERJA SAMA MILITER DENGAN 3 NEGARA

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto baru-baru ini membahas kerja sama strategis di bidang militer dengan tiga negara. Ketiga negara tersebut yakni Australia, Singapura, dan Uni Emirate Arab (UEA)

Kerja sama dengan Australia, Menhan Prabowo membahasnya dengan Panglima Angkatan Bersenjata Australia (Australian Chief of the Defence Force), General Angus Campbell. Hal tersebut dilakukan Menhan Prabowo saat ia menerima kunjungan kehormatan Panglima Angkatan Bersenjata Australia tersebut di Kemhan Jakarta, Senin (6/3/2023).

Dalam kesempatan tersebut, mereka berdiskusi mengenai berbagai isu penting dalam kerja sama pertahanan kedua negara, khususnya bidang pendidikan.

Dalam kerja sama pendidikan dan pelatihan, ungkap Menhan Prabowo, sampai saat ini, hampir 3.300 personel TNI, baik militer maupun sipil, telah mengikuti program pendidikan dan pelatihan di Australia sejak tahun 1967.

"Kami berkomitmen untuk mendukung penuh latihan bersama antara TNI dan ADF serta menggali setiap peluang potensial untuk meningkatkan kemampuan kedua negara dalam menghadapi ancaman dan tantangan bersama," kata Menhan Prabowo.

Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Australia yang telah memberikan pelatihan selama 18 bulan kepada empat Kadet TNI Angkatan Darat di Royal Military College (RMC) Duntroon.

"Program kadet merupakan investasi besar karena hubungan antar pribadi merupakan kunci untuk meningkatkan kerja sama pertahanan Australia-Indonesia," tegas Menhan Prabowo.

Menhan Prabowo berharap di masa mendatang semakin banyak taruna dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang dapat

bergabung dengan rekan-rekannya belajar di RMC dan ADFA.

"Saya berharap dapat bekerja sama dengan Anda untuk memperkuat hubungan Indonesia-Australia, khususnya di bidang pertahanan. Saya juga berharap kerja sama serta persahabatan antara kedua negara akan terus berlanjut dan tumbuh dalam semangat saling menghormati dan percaya terhadap kepentingan nasional kita masing-masing, dalam kerangka kemitraan strategis yang komprehensif," ujar Menhan Prabowo.

"Bersama-sama, Australia dan Indonesia dapat memberikan kontribusi penting bagi perdamaian dan stabilitas kawasan," lanjutnya

Sedangkan dengan Singapura, Menhan Prabowo Subianto membahas kerja sama militer kedua negara, ketika ia menerima kunjungan kehormatan Panglima Angkatan Bersenjata Singapura (Chief of the Defence Force Republic of Singapore) Lt Gen Melvyn Ong di Kemhan, Jakarta, Senin (27/2/2023).

Dalam pertemuan ini dibahas mengenai hubungan kerja sama militer antara Indonesia dan Singapura yang telah terjalin diberbagai bidang dan peningkatannya.

"Kementerian Pertahanan mendukung penuh kerja sama militer yang erat antara Indonesia dan Singapura yang dibangun dengan prinsip kesetaraan, saling menguntungkan dan penghormatan penuh terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan hukum Internasional," kata Menhan Prabowo.

Menhan Prabowo optimistis setelah penerapan perjanjian pertahanan (Defence Cooperation Agreement / DCA) antara Indonesia dan Singapura,



Menhan Prabowo bertemu Perdana Menteri dan Putra Mahkota Bahrain HRH Salman bin Hamad Al Khalifa di Qasr Al Bahr Majlis, Abu Dhabi.

interaksi kerja sama pertahanan kedua negara akan semakin signifikan. Hal ini juga akan bermuara pada peningkatan SDM pertahanan kedua negara.

Menhan Prabowo menegaskan Kemhan RI berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama pertahanan yang telah ada antara kedua negara menjadi lebih signifikan untuk perdamaian di kawasan dan di dunia.

“Diharapkan kerja sama pertahanan kedua negara dapat berkembang lebih signifikan dan saling menguntungkan, sehingga nantinya kerja sama ini dapat memberikan kontribusi bagi stabilitas kawasan,” ungkap Menhan Prabowo.

Menhan Prabowo menjelaskan, salah satu prioritas kerja sama pertahanan dengan Singapura adalah bidang pendidikan. Kemhan bermaksud untuk mengembangkan kerja sama yang lebih intensif di bidang ini.

Untuk itu, akan segera dibentuk forum tahunan komite kerja sama pertahanan RI-Singapura dimana sub-komite militer akan menjadi bagian di dalamnya. Diharapkan kedua Angkatan Bersenjata dapat menggunakan forum ini untuk membahas lebih lanjut kerja sama militer di berbagai bidang, dan kemungkinan-kemungkinan menciptakan bidang kerja sama baru.

Kerja sama militer dengan Singapura ternyata tak hanya dibahas dengan Panglima Angkatan Bersenjata Singapura (Chief of the Defence Force Republic of Singapore) Lt Gen Melvyn Ong.

MenhanPrabowo juga membicarakan hal serupa saat menerima kunjungan kehormatan Senior Minister and Coordinating Minister For National Security, Republic Of Singapore H.E. Mr. Teo Chee Hean, di Kemhan Jakarta, Selasa (28/2/2023).

Dalam pertemuan ini Menhan Prabowo menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Singapura yang telah menyelesaikan persyaratan dalam negeri bagi kerja sama pertahanan kedua negara.

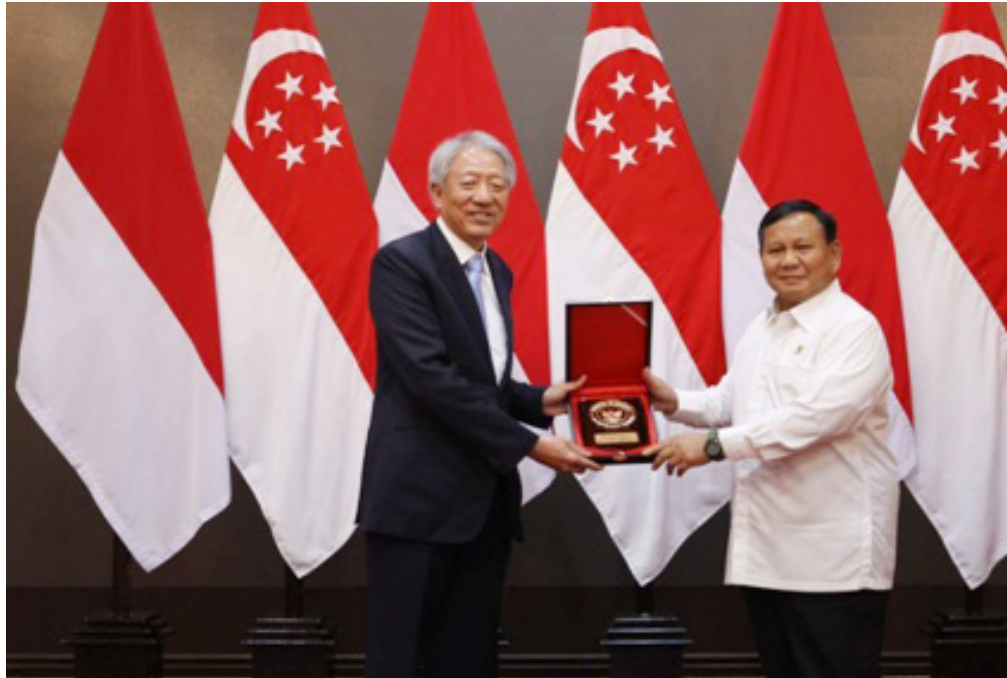
“Kami menyambut baik setiap upaya untuk memperkuat dan menciptakan kerja sama pertahanan yang harmonis antara kedua negara dan terbuka untuk menjajaki seluruh potensi kerja

sama pertahanan yang memberikan manfaat bersama,” kata Menhan Prabowo.

Mengenai hubungan kerja sama pertahanan kedua negara, Menhan Prabowo menegaskan, sebagaimana

sama di bidang pertahanan melalui dialog kebijakan bilateral dan konsultasi masalah keamanan yang menjadi kepentingan bersama.

Menhan Prabowo menyarankan agar Implementing Arrangement (IA)



Panglima Angkatan Bersenjata Singapura (Chief of the Defence Force Republic of Singapore) Lt Gen Melvyn Ong bersama Menhan Prabowo Subianto.



Menhan Prabowo Subianto menerima kunjungan Panglima Angkatan Bersenjata Singapura, Lt Gen Melvyn Ong di Kemhan, Jakarta.

yang tertuang pada Pernyataan Bersama Januari 2022, Kementerian Pertahanan berkomitmen untuk mempertahankan dan memperkuat kerja

untuk Military Training Area (MTA) menjadi topik prioritas. Selain itu juga bidang pendidikan.

“Salah satu prioritas kerja sama den-

gan Singapura adalah bidang pendidikan, dan Kementerian Pertahanan bermaksud mengembangkan kerja sama di bidang ini lebih intensif," tegas Menhan Prabowo.

Menhan Prabowo kemudian mengundang personel Angkatan Bersenjata Singapura untuk mengambil program magister di Universitas Pertahanan RI. Unhan RI menawarkan sejumlah program pendidikan seperti Diplomasi Pertahanan, Peperangan Asimetris, Manajemen Pertahanan dan program lainnya. Hingga saat ini, Unhan RI telah menerima mahasiswa internasional dari Australia, China, India, Malaysia, dan beberapa negara

Dalam pertemuan tersebut, Menhan Prabowo menyampaikan salam Presiden Joko Widodo kepada Presiden UEA dan menyampaikan harapannya untuk kemajuan dan kemakmuran UEA.

Dalam pertemuan tersebut juga dibicarakan mengenai hubungan kerja sama pertahanan dan koordinasi bersama kedua negara di bidang pertahanan dan militer, serta upaya meningkatkan kerja sama untuk mencapai kepentingan bersama.

Selain itu, dibicarakan pula sejumlah isu pertahanan, industri pertahanan dan teknologi militer modern.

Kedua belah pihak juga menyeng-

informasi dan pandangan di bidang kerja sama pertahanan dan mengenai berbagai permasalahan lain yang menjadi kepentingan bersama terkait keamanan nasional, regional dan internasional, kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri pertahanan, peningkatan kapasitas termasuk pengembangan sumber daya manusia, dan bidang lainnya.

Kerja sama pertahanan antara Indonesia dan UEA saat ini terjalin erat di bawah Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani pada 24 Februari 2020 di Abu Dhabi. Menhan kedua negara pada 30 Juni 2022 juga telah menandatangani protokol kerja sama pengembangan industri pertahanan antara Indonesia dan UEA di Kementerian Pertahanan UEA.

Protokol kerja sama pengembangan industri pertahanan ini bertujuan untuk menyediakan jalan ke depan untuk



Menhan Prabowo disambut Presiden UEA, -Mohammed bin Zayed (MbZ).

lainnya.

Sedangkan kerja sama militer dengan Pemerintah UEA, Menhan Prabowo membahasnya saat dia memenuhi undangan Presiden Mohammed bin Zayed (MbZ) dan menghadiri 16th International Defense Exhibition (IDEX) 2023 yang sedang berlangsung di Abu Dhabi Uni Emirat Arab dari tanggal 20 sampai dengan 24 Februari 2023.

Dalam kesempatan tersebut Menhan Prabowo bertemu langsung Presiden MBZ yang didampingi Perdana Menteri dan Putra Mahkota Bahrain HRH Salman bin Hamad Al Khalifa di Majelis, Abu Dhabi, Kamis (23/2/2027).

gung pula mengenai IDEX 2023 yang merupakan peluang baik untuk membangun kemitraan antara industri pertahanan dan keamanan internasional demi stabilitas dan perdamaian dunia.

"Kerja sama di bidang pertahanan, khususnya industri pertahanan sangat penting bagi kedua negara, terutama untuk pengembangan industri pertahanan di masa depan," ujar Menhan Prabowo.

Ruang lingkup kerja sama pertahanan Indonesia dan UEA selama ini meliputi beberapa hal, di antaranya saling kunjung delegasi pertahanan dan Angkatan Bersenjata pada berbagai tingkatan, pertukaran



Kami menyambut baik setiap upaya untuk memperkuat dan menciptakan kerja sama pertahanan yang harmonis antara kedua negara dan terbuka untuk menjajaki seluruh potensi kerja sama pertahanan yang memberikan manfaat bersama.

memajukan dan mengembangkan kerja sama bilateral di bidang industri pertahanan antara kedua belah pihak, serta perencanaan dan pengembangan kemampuan industri yang saling menguntungkan.

Sebelumnya, pada Juli 2022, Menhan Prabowo mengunjungi UEA untuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo bertemu Presiden MBZ dan pada Juni 2022 juga sempat berkunjung ke Zayed Military University di Abu Dhabi. ●

PERANAN PULAU-PULAU STRATEGIS DALAM POSTUR PERTAHANAN NEGARA

Pembangunan postur pertahanan negara diarahkan pada tercapainya penyelarasan antara pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter dalam kerangka Sishankamrata yang bercirikan kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan, dengan mengedepankan penguatan pertahanan negara di pulau-pulau strategis yang menjadi prioritas program pembangunan nasional.

Perihal mengenai arah postur pertahanan negara tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Sekjen Kemhan RI) Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto saat menjadi nara sumber pada acara Focus Group Discussion (FGD) Kajian Urgent dan Cepat tentang “Arah Pembangunan Kekuatan Pertahanan Darat Menghadapi Spektrum Ancaman Perang Masa Depan dalam rangka Membentuk Pertahanan Indonesia” di Lemhannas RI, Jakarta baru-baru ini.

Dalam penjelasannya Sekjen Kemhan mengatakan, bahwa sistem pertahanan negara bersifat semesta, yang menurut Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2020-2024 diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara. Salah satunya melalui implementasi konsep pertahanan pulau-pulau besar.

Lebih lanjut dia mengungkapkan bahwa Rencana Jangka Panjang Pembangunan Sistem Pertahanan Negara 2020-2024 mengenai gelar TNI AD, wilayah pertahanan darat dibagi menjadi 5 kompartemen strategis mata darat yaitu, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi-Maluku, Jawa-Bali Nusa Tenggara, dan Papua. Kekuatan TNI yang tergelar harus mampu melaksanakan operasi secara mandiri di wilayah kompartemennya.

“Karena itulah dibutuhkan penambahan jumlah Kodam sesuai jumlah provinsi dan Kodim di sejumlah Kabupaten/Kota sesuai sasaran kebijakan pembangunan kekuatan pokok TNI Tahun 2020-2024. Sasaran tersebut yaitu terwujudnya wilayah pertahanan yang bertumpu pada pertahanan pulau-pulau besar secara mandiri sesuai



Sekjen Kemhan RI, Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto



FGD Kajian Urgent dan Cepat tentang “Arah Pembangunan Kekuatan Pertahanan Darat Menghadapi Spektrum Ancaman Perang Masa Depan dalam rangka Membentuk Pertahanan Indonesia”, di Lemhannas.

kompartemen strategis dan Kawasan Strategis Nasional (KSN),” jelas Sekjen Kemhan Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto.

Selanjutnya, validasi organisasi TNI AD akan dilaksanakan secara berta-

hap dan berkelanjutan sesuai skala prioritas untuk mendukung tugas pokok, melalui pembangunan Kodam di tiap provinsi dan Kodim di tiap Kabupaten/Kota, Batalyon Kesehatan, Batalyon Nubika, dan satuan-satuan produksi. •

BERIKAN YANG TERBAIK UNTUK PALEMBANG

Ada banyak pencapaian Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Atas semua usahanya ini, pemerintah pusat memberikan apresiasi yang tinggi kepada Wali Kota Palembang, Harnojoyo.



Salah satunya Piala Adipura. Kota Palembang kembali meraih Piala Anugerah Adipura Kategori Kota Metropolitan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk yang ke-13.

Piala itu diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI yang diterima Wali Kota Palembang Harnojoyo, di kantor Kementerian LHK.

Atas penghargaan, Wali Kota Harnojoyo menyatakan syukur dan bangga, sekaligus berterima kasih kepada masyarakat Palembang.

"Kami sangat berterima kasih kepada masyarakat Kota Palembang, yang terus komitmen untuk menjaga lingkungan. Terbukti untuk ke-13 kalinya kita tetap mempertahankan piala Adipura kategori kota Metropolitan ini," kata Harnojoyo.

Ia menyebutkan, tanpa komitmen dan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, tentu Piala Adipura tak mungkin diraih.

"Jadi penghargaan ini sebetulnya ditujukan untuk masyarakat kota Palembang. Dan kami sangat mengapresiasi atas kolaborasi dari masyarakat dan pemerintah yang terus menjaga Kota Palembang tercinta ini," ujar Harnojoyo.

Ia meyakini bahwa Palembang akan mampu mempertahankan bahkan terus meraih prestasi terbaik dalam penataan dan pengelolaan lingkungan.

"Kita akan terus raih kembali dan terus mempertahankan semua ini," ujar Harnojoyo pula.

Sebelumnya Ombudsman Republik Indonesia mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Palembang terkait

standar kepatuhan pelayanan publik.

Menurut Ketua Ombudsman, Muhammad Najih, Pemkot Palembang telah meningkatkan kualitas penyelenggaraan standar kepatuhan pelayanan publik dilaksanakan secara terencana dan terstruktur.

Untuk itu, Ombudsman RI tak ragu mengganjar Palembang dengan peringkat pertama Penganugerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik untuk pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

"Bahkan peringkat keenam se Indonesia. Ini merupakan capaian yang luar biasa. Namun yang tidak kalah penting adalah konsistensi capaian ini agar prestasi yang diraih ini tidak menurun, tetapi malah meningkat," ujar Najih.

Untuk diketahui Kota Palembang meraih nilai pertama dengan nilai



Kami sangat berterima kasih kepada masyarakat Kota Palembang, yang terus komitmen untuk menjaga lingkungan. Terbukti untuk ke-13 kalinya kita tetap mempertahankan piala Adipura kategori kota Metropolitan ini.

91,23. Peringkat kedua Kabupaten Muara Enim, peringkat ketiga Kabupaten Musi Rawas.

Najih juga mengatakan perlunya pemerintah kota mempertimbangkan partisipasi publik dalam pelayanan.

"Karenatanpartisipasimasyarakat, capaian ini juga saya kira tidak bisa diraih dengan baik," imbuhnya.

Wali Kota Palembang, H Harnojojo bersyukur kota ini meraih penghargaan dari Ombudsman RI.

"Ini merupakan upaya dan kerja keras kita bersama dalam kepatuhan

pelayanan publik sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik," kata Harnojojo.

Meski begitu, ia mengimbau jajarannya tidak cepat puas, dan terus memberikan kinerja terbaik.

"Penghargaan ini semoga memoti-



vasi Pemkot Palembang bekerja lebih baik lagi dalam pelayanan publik," ujar Harnojojo.

Yang membanggakan, Pemkot Palembang meraih peringkat pertama dengan total nilai 91,23. Peringkat kedua diraih Kabupaten Musi Rawas, peringkat ketiga Kabupaten Muara Enim.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih dan diterima Wali Kota Palembang, di Gedung Bina Praja, Pemprov Sumsel, Rabu (1/2/2023).

Gubernur Sumsel Herman Deru, Wakil Gubernur Mawardi Yahya turut menyaksikan penyerahan penghargaan itu.

"Yang pastinya kita bersyukur, dan apa yang kita raih ini merupakan upaya dan kerja keras kita bersama dalam

kepatuhan pelayanan publik, sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik," kata Wali Kota Palembang Harnojojo.

Ia mengimbau agar prestasi ini bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan. ASN di lingkungan Pemkot Palembang juga diminta untuk tidak cepat puas dengan hasil tersebut.

"Ini dalam rangka terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur," kata Harnojojo. •rhd/***

MERAWAT DAN MENJAGA ASET SEJARAH

Kota Palembang banyak memiliki aset sejarah berharga yang mengungkapkan kebesaran dan kemajuan di masa lalu di masa Kerajaan Sriwijaya dan Kesultanan Palembang. Sayangnya beberapa aset itu ada yang terbengkalai karena status kepemilikan.

Agar semua aset sejarah itu terselamatkan dan terjaga, Pemkot Palembang turun tangan langsung untuk merawatnya meski mengalami kendala terutama status kepemilikan.

Salah satunya Kampung Kapitan,

salah satu tempat bersejarah keturunan Tionghoa di Kota Palembang kondisinya saat ini memprihatinkan. Saat ini, kampung yang termasuk cagar budaya itu mengalami kerusakan 75 persen. Kerusakan tempat bersejarah itu diketahui terjadi atas laporan

dari keturunan ke-15 dari Mayor Liong Tao Ming Kampung Kapitan, bernama Yulia (60).

Hal ini kemudian ditindaklanjuti Wakil Wali Kota (Wawako) Fitrianti Agustinda, yang meninjau langsung kondisi Kampung Kapitan.

Saat meninjau lokasi, Wawako Fitrianti Agustinda melihat kerusakan memang cukup parah bahkan kondisinya mengkhawatirkan.

"Gentengnya bocor, lantai rusak, pagarnya. Sekitar 75 persen kerusakan. Kami mau membetulkan biaya besar. Genteng saja bisa Rp100 jutaan lebih. Makanya hari ini saya menghubungi khusus Ibu Wawako," kata Yulia.

Yang jadi persoalan, Pemkot Palembang belum bisa berbuat banyak. Penyebabnya, karena aset Kampung Kapitan masih dimiliki keluarga Mayor Liong Tao Ming.

"Kalau sudah diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah baru bisa Pemkot Palembang melakukan renovasi. Karena belum punya pemerintah, baru tercatat sebagai cagar budaya saja," ujar Yulia.

Disisi lain, pihak keluarga Mayor Liong Tao Ming tidak mau menyerahkan aset Kampung Kapitan ke pemerintah, karena khawatir apabila diserahkan tidak bisa lagi beribadah di rumah tersebut.

"Memang saya sendiri yang sekarang menjaga dan tinggal di rumah. Tetapi semua keturunan banyak merantau, tidak mau rumah itu diserahkan. Karena di sana banyak abu keluarga. Kalau kami mau beribadah nanti susah," ungkap Yulia.

Di sisi lain, Yulia mengaku tidak ada pilihan lain dia harus berbicara kepada semua keluarga keturunan Mayor



Liong Tao Ming. Dimana kerusakan rumah yang telah berumur 400 tahun ini harus diperbaiki, kalau tidak akan roboh.

Wawako Fitrianti Agustinda menjelaskan, untuk merenovasi mengeluarkan dana cukup besar dari negara. Apalagi Kampung Kapitan belum dikuasai Pemerintah Kota Palembang.

"Saya sudah arahkan ke Ibu Yulia untuk berbicara dulu dengan pihak keluarga. Kalau semua sudah selesai dan aset sudah dikuasai oleh Pemkot, renovasi menggunakan anggaran bisa kita lakukan," sebut Fitrianti.

Wawako Fitrianti akan berusaha mencari investor atau pihak ketiga. Hal itu untuk menyelamatkan dari ambruknya tempat bersejarah keturunan Tionghoa di Palembang yang berusia 4 abad itu.

Sementara Pemkot Palembang juga akan mendorong percepatan Surat Keputusan cagar budaya Museum AK Gani. Hal ini dikemukakan Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa, usai menerima Kepala Museum AK Gani, GI Priyanti Gani.

Seperti diketahui, Mayjen AK (Adnan Kapau) Gani merupakan salah satu Pahlawan Nasional dari Palembang. Untuk mengenang jasanya, dibangun museum atas namanya.

Hanya saja, kondisi museum itu tak terawat. Seperti gedungnya tidak terawat, catnya terkelupas dan bangunannya mulai keropos. Untuk itulah, Pemkot berinisiatif untuk memperhatikan museum AK Gani.

"Kita menyambut baik kehadiran pengurus museum AK Gani. Pertama kehadiran mereka untuk meminta kesediaan saya dalam lomba mewarnai yang akan diselenggarakan 16 Februari nanti. Selain itu, ada beberapa keinginan yang juga menjadi perhatian kita," ujar Dewa.

Terkait keinginan pengurus mengenai status, Pemkot akan menelusuri status Museum dr AK Gani sebagai cagar budaya milik Pemkot atau milik Pemprov Sumsel.

Kemudian, Pemkot Palembang akan menelusuri administrasi dan mengusulkan penganggaran pembayaran air (PDAM) dan PLN Museum dr. AK. Gani.

"Kita siap membantu kebijakan un-

tuk keberlangsungan Museum dr. AK Gani sesuai prosedur. Sama tadi ada beliau meminta bantuan pembuatan papan nama Museum dr. AK Gani," katanya.

Ia menambahkan, Pemkot juga bersedia membantu pemasangan foto dr

Sementara itu Kepala Museum AK Gani, GI Priyanti Gani mengucapkan terima kasih terhadap respon baik Sekda Kota Palembang, Ratu Dewa.

"Ini angin segar bagi kami setelah 18 tahun tidak ada perhatian dari pemerintah. Alhamdulillah Pemkot Palembang



AK. Gani di sekolah dan mengusulkan Museum dr. AK Gani berfokus dengan rencana pemugaran gedung Museum dr. AK Gani.

"Kalau Museum dr. AK Gani dipastikan menjadi tanggung jawab Pemkot Palembang sebagai cagar budaya wilayah Pemkot Palembang, maka Pemkot Palembang akan ikut bertanggung jawab mengusulkan anggaran, terutama untuk pemugaran Museum dr AK Gani tanpa mengurangi bentuk aslinya," tegas Dewa.

bang pertama kali menerima kami dengan baik. Hasil pertemuan dengan pak Sekda, insya Allah beliau akan memperjuangkan SK Cagar Budaya Museum AK Gani," ungkapnya.

Diakui Priyanti, Pemkot Palembang sangat apresiatif terhadap dr AK Gani yang sudah memberi banyak jasa kepada Sumsel, yang karyanya harus dirawat dengan baik.

"Untuk itu, Pak Sekda minta kepedulian dari semua pihak," katanya. •rhd/**



MEMBANGUN PERTANIAN PENOPANG IKN NUSANTARA

Ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi peluang bagi daerah tersebut meraup banyak peluang ekonomi. Salah satunya pada sektor pertanian, termasuk sektor hortikultura untuk menyediakan buah-buahan untuk penduduk IKN.

Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, menyebut, tuntutan kebutuhan besar beberapa tahun ke depan membuat Benua Etam harus bisa menyiapkan berbagai komoditas hortikultura.

Apalagi, pemerintah pusat terus mempersiapkan pemindahan IKN bukan hanya fokus pada pembangunan perkantoran atau infrastruktur saja, tetapi mendorong percepatan ketersediaan lahan pertanian, terutama berbagai komoditas tanaman pangan dan

hortikultura.

Tak hanya komoditas utama, seperti padi, jagung dan cabai, namun komoditas unggulan yang sudah diekspor seperti pisang kepok.

"Kita (Kaltim) juga menghindari menjual produk dalam bentuk mentah, harus diolah dulu," ungkap Isran Noor di Samarinda, Selasa, 14 Februari 2023.

Menurut mantan Bupati Kutai Timur ini, berbagai komoditas pertanian sedang dikembangkan produksinya, termasuk tanaman hortikultura, meski di Kaltim belum terlalu banyak. Tetapi,

buah-buahan menjadi fokus masa depan menghadapi IKN Nusantara.

"Kebutuhan terhadap hilirisasi produk juga meningkat. Ini peluang yang harus disikapi," ungkapnya.

Tercatat, produksi buah di Kalimantan Timur mengalami peningkatan, di mana pisang dan nanas menjadi tanaman dengan produksinya yang signifikan.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur mencatat sepanjang 2021, petani menghasilkan pisang sebanyak 130.656,14 ton. Produksi ini mengala-



mi peningkatan dibandingkan pada 2020 yang tercatat sebesar 95.527,55 ton atau meningkat 35.128,59 ton (36,77 persen).

Menurut sebarannya, 71,81 persen dari total produksi pisang di Kalimantan Timur berasal dari Kabupaten Kutai Timur.

Pada 2021, Kutai Timur mempunyai 454.004 rumpun pisang dengan produksi per rumpun 206,66 kilogram atau menghasilkan pisang sebanyak 93.826,09 ton. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki pisang terbanyak kedua dengan 267.828 rumpun, di mana produksi per rumpun 57,45 kg dan secara keseluruhan menghasilkan 15.386,60 ton.

Sedangkan untuk nanas, pada 2021, Kalimantan Timur menghasilkan nanas sebanyak 55.170,05 ton atau meningkat 151,05 persen dibandingkan 2020 yang hanya 21.975,65 ton.

Sementara itu melihat dari total produksinya, 96,23 persen berasal dari Kutai Kartanegara.

Pada 2021, Kutai Kartanegara memiliki nanas sebanyak 10.517.910 rumpun di mana rata-rata hasil panen

sebesar 5,05 kg per rumpun atau sekali panen menghasilkan 53.092,4 ton nanas.

Posisi kedua disusul Kutai Timur dengan jumlah nanas sebanyak 512.226 rumpun dan produksi sebesar 3,14 kg per rumpun. Sehingga, pada 2021, Kutai Timur menghasilkan nanas sebanyak 1.608,17 ton.

"Persiapan ketersediaan pangan

serta komoditas hortikultura sangat dinamis dan kompleks, semakin tahun kebutuhannya juga semakin besar, karena bertambahnya jumlah penduduk," terang Isran Noor.

Selain kebutuhan pangan, ketersediaan hortikultura menurut Isran Noor penting untuk dikembangkan.

Dia berharap, sebelum masa jabatannya habis pada 2023 perangkat dae-



• INFO KALIMANTAN TIMUR

rah terus meningkatkan sinergi. Selain itu, harus ada ada sinergi pula antara provinsi dengan kabupaten/kota, sub-sektor dan antarsektor, bahkan sektor pendukung yang lain.

Isran Noor juga menganggap penting dalam pemaksimalan inovasi yang produktif untuk pendapatan petani, terutama menguatkan data pangan yang berkelanjutan, meningkatkan jaminan keamanan dan mutu pangan.

"Penambahan regulasi (aturan) untuk mengurangi laju alih fungsi lahan,

"Petani-petani kita yang ada sekarang ini, rata-rata sudah tua," ungkap Isran Noor.

Menurut Isran Noor, generasi muda lebih menggeluti bekerja di dunia industri dan usaha lain. Pасalnya, pertanian merupakan pekerjaan yang bergelut dengan lumpur dan tidak terlalu menjanjikan untuk hidup layak.

Sementara itu, disisi lain, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur beserta Kabupaten/Kota terus memacu generasi

(SMK Pertanian) hingga perguruan tinggi di Kalimantan Timur.

"Alat mesin pertanian kita sudah canggih-canggih. Jadi petani, generasi muda jangan malu, tidak perlu gengsi jadi petani. Jadilah petani modern, petani milenial," jelasnya.

Isran Noor meyakinkan generasi muda bahwa pemerintah hingga saat ini terus mendorong pengembangan sektor pertanian, terutama tetap memberikan bantuan peralatan, bahkan bibit dan permodalan.



juga perlu diperhatikan. Saya berharap, ada peningkatan produksi, sebab tuntutan ke depan kebutuhan bakal besar," ujarnya.

Isran Noor juga mendorong generasi milenial ke sektor pertanian lantaran Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian di Kalimantan Timur minim. Benua Etam diketahui memiliki wilayah dengan 70 persen perairan, dan 30 persen di antaranya merupakan pusat pertanian. Tetapi, kendala pertanian di Kalimantan Pertanian bukan masalah luasan wilayah, melainkan keterbatasan SDM pertanian.

Regenerasi yang akan melanjutkan usaha di sektor pertanian juga terbilang minim, sehingga hal ini juga perlu diwaspadai.

muda agar tertarik menggeluti dunia pertanian.

"Kami juga harus fokus menciptakan para generasi muda pertanian sebagai aset," ungkap Isran Noor.

Dia mengatakan, Generasi muda Kalimantan Timur seharusnya sebagai generasi penerus, penggerak, dan pelopor pertanian yang inovatif dan kreatif. Generasi muda bisa menjadi petani millennial yang profesional, mampu bersaing dan berwawasan global. Terlebih pada kondisi sekarang, sarana dan peralatan pertanian sudah maju dan canggih.

Dengan mengadopsi pertanian modern memanfaatkan teknologi tinggi, tata kelola pertanian modern juga telah diajarkan sejak pendidikan SMA

"Pertanian prioritas kami, program utama pemerintah untuk menciptakan kemandirian dan kedaulatan pangan bangsa," kata Isran Noor.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, juga mengungkapkan, pasar pertanian Kalimantan Timur akan menjanjikan dengan adanya IKN Nusantara. Hal ini bisa jadi peluang untuk para petani lokal Kalimantan Timur memasarkan produk pertaniannya.

Dari hitung-hitungannya, nantinya bakal ada sekitar 1,5 juta ASN, TNI dan Polri yang pindah ke Kalimantan Timur mengisi pemukiman kawasan IKN Nusantara. Penambahan penduduk tersebut dipastikan membuat kebutuhan pangan meningkat, sehingga menjadi peluang besar bagi para petani untuk

meningkatkan produktivitas.

"Petani Kaltim kami dorong agar terus meningkatkan produktivitas hasil pertaniannya. Karena ke depan kebutuhan hasil pertanian tanaman pangan tentu semakin besar," ungkap Samsun, Rabu, 15 Februari 2023.

Peningkatan jumlah penduduk yang datang ke Kalimantan Timur dapat menjadi peluang besar bagi seluruh petani untuk meningkatkan pemasaran.

Politisi PDI Perjuangan itu berkomitmen mendukung penuh seluruh program yang dicanangkan Pemprov Kaltim dalam menguatkan sektor pertanian tanaman pangan hingga hortikultura.

Untuk meningkatkan produktivitas pertanian, maka pemerintah harus turun tangan dalam mengatasi persoalan para kelompok tani. Terutama terkait persoalan kebutuhan pupuk serta alat dan mesin pertanian.

"Kebutuhan prioritas petani terhadap alsintan juga besar sekali untuk mempermudah produksi hasil panen. Misalnya alsintan bajak kering dan mesin panen," terang Samsun.

Menuju Swasembada Daging

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi, mendorong Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) setempat menggiatkan pelatihan kepada para peternak dalam upaya mewujudkan kemajuan peternakan di Benua Etam menuju swasembada daging.

"Saya sangat setuju dan mengapresiasi kalau DPKH terus memberikan pelatihan-pelatihan kepada para peternak," kata Hadi Mulyadi saat membuka Rapat Konsultasi dan Koordinasi Teknis Daerah dan Forum Perangkat Daerah Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan 2023 se-Kalimantan Timur di Balikpapan, Selasa, 7 Februari 2023.

Hadi Mulyadi menyambut baik pelaksanaan kegiatan yang mengusung dengan tema Bangkit Bersama menuju Kaltim Bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Pemberdayaan Ekonomi Peternak yang Berdaulat itu untuk percepatan pencapaian pembangunan peternakan yang berdaulat

serta meningkatkan perekonomian rakyat, khususnya para peternak.

"Para peternak harus diberikan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan agar mampu berdaya saing untuk menciptakan hewan ternak yang sehat dan layak di konsumsi masyarakat," jelasnya.

Hadi Mulyadi mengharapkan pelatihan yang dilaksanakan tidak sekadar untuk melakukan veteriner kepada hewan, tetapi memiliki visi yang jauh ke

(pelatihan)," ungkapnya.

Hadi Mulyadi juga berharap kepada Dinas Peternakan tidak hanya bertemu dengan peternak, tetapi juga pelajar, baik SMP, SMA, hingga mahasiswa. Sehingga, mereka memiliki cita-cita untuk menjadi peternak yang maju. Mereka juga harus punya cita-cita untuk membangun desanya dan membangun Kalimantan Timur agar lebih maju dengan kemampuan yang ada pada diri mereka.



depan, yaitu membangun Kalimantan Timur menjadi provinsi yang surplus hewannya.

Dia mengatakan cita-cita besar ini harus dibangun kepada para peternak agar mereka punya visi dan misi yang jelas dalam menjalankan usaha.

"Pola pikir positif ini perlu kita bangun. Kata kuncinya adalah pendidikan

Menurut Hadi Mulyadi, seandainya ada 10 sekolah yang didatangi, mungkin ada 10 persennya tertarik dengan peternakan.

"Nanti setiap OPD (Organisasi Perangkat Desa) di kabupaten dan kota di Kaltim bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk memajukan peternak. Ini pekerjaan rumah kita," ungkapnya. •

Lombok International Modest Fashion Festival (LIMOFF) 2023

WUJUDKAN NTB PUSAT FESYEN MUSLIM DUNIA

Nusa Tenggara Barat mulai menggarap industri fesyen untuk bisa menaikkan perekonomian daerah. Salah satu yang digagas adalah Lombok International Modest Fashion Festival (LIMOFF) yang akan diadakan pada 6-9 Juli 2023.

Untuk menuju acara tersebut, Pemerintah Provinsi NTB menggelar Kick off The Launching of Lombok International Modest Fashion Festival (LIMOFF) bertajuk Limoff Making Lombok as The Gateway to Global Market di Hotel Merumatta Senggigi, pertengahan Januari 2023.

Lombok International Modest Fashion Festival (LIMOFF) menjadi momentum untuk memperkenalkan NTB yang

langsung Juli mendatang.

Bang Zul mengungkapkan, NTB mampu menjadi pusat fesyen busana muslim dengan berbagai ciri khas yang dimiliki setiap kabupaten/kota.

Zulkieflimansyah juga mendatangkan tiga kementerian, yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif guna menjalin sinergi untuk mempromosikan Lombok Internasional

Hal itu terbukti di mana kini fesyen menjadi salah satu subsektor ekonomi kreatif di Indonesia.

NTB tidak hanya menawarkan pariwisata alam dan pariwisata olahraga seperti MXGP, World Superbike (WSBK), dan MotoGP di Sirkuit Mandalika, namun juga menawarkan industri fesyen melalui LIMOFF untuk mendorong agar menjadi peluang menaikkan perekonomian daerah.

"Sayang event-event internasional yang ada di NTB jika tidak dilengkapi dengan aneka pilihan produk dan event lainnya," ujar Bang Zul.

Ketua TP PKK NTB, Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, mengatakan, fashion show internasional yang hadir di NTB diharapkan mampu memberikan kesempatan kepada brand lokal untuk bisa diperkenalkan dipenjuru dunia.

Ketua Dekranasda NTB ini mengatakan Lombok International Modest Fashion Festival (LIMOFF) bukan hanya ajang fesyen, tapi juga upaya mendukung industri lokal dan media untuk memamerkan produk mereka yang memiliki kualitas sangat tinggi.

Lombok International Modest Fashion Festival (LIMOFF) juga bisa menjadi suatu kesempatan bagi pengunjung dari berbagai daerah dan luar negeri untuk belajar tentang Pulau Lombok dan keunikan budayanya serta orang-orangnya.

"Para pengunjung diharapkan mendapatkan pemahaman dan memberi apresiasi yang lebih dalam tentang kekayaan warisan budaya Lombok," katanya.

Selain fesyen, Lombok International Modest Fashion Festival (LIMOFF) juga



mempunyai geliat industrialisasi dengan ciri khas yang tidak hanya dari segi pariwisata, tetapi juga dari segi fesyen dan kuliner.

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, mengatakan, NTB dapat mewujudkan The Gateway to Global Market karena hadirnya Lombok International Modest Fashion Festival (LIMOFF) yang mampu mendukung adanya berbagai event global yang akan berlangsung, seperti kejuaraan dunia MXGP yang akan ber-

Modest Fashion Festival (LIMOFF).

"Roadshow ke kementerian ini merupakan sinergi untuk mewujudkan tujuan bersama, yakni menjadikan Indonesia sebagai kiblat mode fesyen dunia dan NTB menjadi salah satu pusat industri ini di Tanah Air," ujar Zulkieflimansyah.

Zulkieflimansyah mengatakan, industri fesyen di NTB terus digenjot eksistensinya karena memiliki potensi ekonomi untuk menawarkan gaya hidup yang terinspirasi dari dunia fesyen.

akan menjadi ajang promosi pariwisata, kerajinan tangan, dan industri kuliner di Lombok. Para pengunjung akan memiliki kesempatan menemukan berbagai aspek budaya dan ekonomi Lombok, sekaligus mendukung bisnis dan perajin lokal.

Niken menambahkan festival tersebut akan menampilkan berbagai kegiatan, seperti peragaan busana, lokakarya dan pameran yang dapat dinikmati semua orang.

"Kegiatan itu menjadi momentum memperkenalkan Provinsi NTB yang mempunyai geliat industrialisasi dengan ciri khas yang tidak hanya dari segi pariwisata, tetapi juga dari segi fesyen dan kuliner," ujarnya.

Dekranasda NTB juga memfasilitasi para desainer untuk bisa menembus pasar internasional, sehingga NTB semakin maju sebagai salah satu pusat industri fesyen.

"Kami mendorong para desainer fesyen di NTB untuk terus mengembangkan diri dan memanfaatkan bahan lokal, terutama kami membantu mempromosikan di tingkat nasional dan internasional," ujar Niken.

Niken mengatakan salah satu bentuk dukungan untuk kemandirian industri busana di NTB yakni mempromosikan fesyen berbahan baku kain tenun khas NTB

dalam ajang Indonesia Fashion Week (IFW) 2023 di Jakarta.

Dalam ajang tahunan tersebut, Dekranasda NTB juga memfasilitasi tiga desainer NTB untuk ikut mempromosikan hasil karyanya. Mereka adalah Ferry Kuncoro, Erina Gallery dan Tenun Lombok By QV.

"Ketiga desainer NTB itu hadir dengan masing-masing busana ready to wear yang super fresh. Mereka berani bersaing dengan ratusan desainer dari berbagai provinsi dan luar negeri yang berlomba-lomba pameran karya dengan signature dan keunggulan masing-masing," ujar Niken.

Menurut dia, program Lombok International Modest Fashion Festival (LIMOFF) merupakan langkah Pemprov NTB agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas dan menekan angka pengangguran dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.

"Kita juga ingin membuka lapangan kerja dalam mewujudkan ekonomi masyarakat NTB yang stabil ke depannya dengan terus mengembangkan industrialisasi, salah satunya industri fesyen," ucap Niken.

Kepala Dinas Perindustrian NTB, Nuryanti,



ing," ujar Niken.

Isteri Gubernur Zulkief-Ilmansyah itu berharap kepada para desainer dan para pelaku fesyen di NTB yang hadir dalam IFW 2023 dapat terinspirasi dari segi kreativitas dalam mengolah dan menciptakan produk fesyen. Terutama karena NTB tengah bersiap menjadi tuan rumah Lombok International Modest Fashion Festival (LIMOFF).

Nuryanti mengatakan, busana belakangan menjadi industri yang menguntungkan di Indonesia karena melihat pertumbuhannya selalu meningkat.

Kini, busana bukan hanya sebagai kebutuhan primer, namun sudah menjadi kebutuhan artistic, sehingga mampu mendorong pertumbuhan industri ini lebih pesat.

Untuk itu, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah merupakan bentuk persiapan NTB sebagai pusat industri busana Muslim yang akan berfokus menjadi pusat busana Muslim internasional.

"NTB ingin mengambil kesempatan tersebut supaya bisa jadi pusat nasional karena potensi industri busana di NTB sangat besar," ucap Ketua Harian Dekranasda NTB ini.

Nuryanti mengatakan Lombok International Modest Fashion Festival (LIMOFF) terdiri atas tiga tahapan kegiatan, yaitu pra-event, main event dan post event. •



The 23th Jakarta International Handicraft Trade Fair PELUANG SULAWESI SELATAN TUNJUKKAN EKSISTENSI

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengambil peluang besar dengan ikut serta dalam pameran bertajuk The 23th Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) 2023.

Pameran yang diselenggarakan oleh Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASHEPI), wadah bagi produsen dan eksportir handicraft Indonesia, menjadi peluang besar bagi Sulawesi Selatan dalam menunjukkan eksistensi seni, kebudayaan, kreativitas, kerajinan, lokalitas, hingga pariwisata.

Sulawesi Selatan bahkan menjadi ikon pameran kerajinan terbesar di Asia Tenggara ini yang digelar di Jakarta Convention Center pada 1-5 Maret 2023.

Pemprov Sulsel mengusung tema besar, yakni "From Smart Village to Global Market" dengan sub-temanya "The Authentic South Sulawesi". Hal ini menandakan lokalitas seni, kerajinan dan budaya Sulsel yang akan didorong untuk menembus pasar internasional.

Hal ini juga menjadi sebuah kebanggaan bagi Sulsel. Sebab, baru kali ini, di bawah kepemimpinan Gubernur Andi

Sudirman Sulaiman, Sulsel terpilih sebagai ikon pameran tersebut.

Sejumlah rangkaian acara, mulai dari pagelaran budaya, kerajinan, dan kuliner yang akan dipamerkan dalam event ini mengedepankan kearifan lokal dari 24 Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan.

Sejumlah produk kerajinan juga dipamerkan dengan menjaga mutu dan kualitas dari produk, termasuk beberapa yang khas dari Sulsel, di antaranya Songkok Recca', sutera, sejumlah kerajinan dari daun lontar, dan sebagainya.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, berkesempatan mendampingi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno; Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki; dan Ketua Umum ASHEPI, Mucshin Ridjan, membuka Inacraft 2023.

Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, Presiden Joko Widodo sangat

menaruh perhatian untuk pameran Inacraft 2023. Sandi juga mengapresiasi Pemprov Sulsel yang menjadi ikon dari pameran Inacraft 2023. Dia mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pameran Inacraft ini.

"Dengan semangat bangga buatan Indonesia dan dengan semangat gerap cepat, geber (gerak bersama) dan gas pol, garap semua potensi online, kita bisa ciptakan peluang-peluang agar produk kita menjadi agent of change untuk membuka peluang usaha dan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi kita," kata Sandi, Rabu, 1 Maret 2023.

Sandi didampingi Andi Sudirman Sulaiman juga meninjau Paviliun Pemprov Sulsel. Sejumlah tenan kabupaten/kota Sulsel dikunjungi untuk melihat produk-produk unggulan yang dipromosikan.

"Ini produk Sulsel luar biasa, berkualitas dunia dan sangat bisa didorong, terutama yang produk sutera dari Soppeng sampai produk kriya seperti keris (badik) dari Bantaeng," ungkap Sandi.

Selain itu, ada pula Songkok Recca dari Bone yang telah mendapatkan penghargaan World Crafts Council (WCC) Award of Excellence for Handicraft of Asia Pasific Region 2022.

Sandi berharap, dalam acara ini diikuti lebih dari 1.200 tenant pengrajin dari seluruh penjuru Indonesia dan beberapa negara, bisa mencapai target penjualan.

"Saya meyakini bahwa target Rp54 miliar yang dicapai tahun lalu bisa kita tingkatkan, sehingga kita bisa mendekat sebelum pandemi Rp140 miliar," ujarnya.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, berharap Inacraft 2023 akan lebih memperkenalkan



sejumlah keunggulan dan ciri khas Sulawesi Selatan yang akan menggeliatkan perekonomian dan ekonomi kreatif.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk melihat sejumlah kerajinan unggulan dan ciri khas Sulsel dalam pameran Inacraft," kata Andi Sudirman Sulaiman.

Selain kerajinan, sejumlah kuliner andalan Sulawesi Selatan juga dihadirkan dalam pameran Inacraft 2023. Di antaranya makanan dari Kota Palopo ada kapurung dan parede, simbole durian; dari Kabupaten Wajo ada lawa ikan danau, lawa udang danau, ikan kering tumbuk, ikan kering bungo, ronto, peppi, dan sejumlah kue tradisional di antaranya barongko, beppa pute, bolu peca, katerisalla, dan sebagainya. Dari Takalar ada sejumlah kue khas seperti bipang dan baruasa, serta lainnya.

Hadir pula sejumlah makanan khas Makassar, di antaranya pallubasa, pisang epe, otak-otak, coto, dan konro. Adapula menu khas Kabupaten Enrekang berupa sokko pulu mandoti, bundu-bundu ayam, dangke bakar. Serta dihadirkan juga sop saudara khas dari Kabupaten Pangkep.

Sementara dari Kabupaten Bone, di antaranya baje canggoreng, beppa kambu, gogoso, kacipo lotong, dan sebagainya.

Selain makanan, juga dihadirkan minuman khas dari Sulsel, di antaranya markisa, dan kopi Toraja.

Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan, sejumlah makanan dan minuman yang dipamerkan dalam Inacraft menjadi kuliner andalan dari Sulsel.

Dalam Inacraft kali ini, Kapal Phinisi menjadi ikon yang disodorkan Pemprov Sulsel. Dengan pertimbangan bahwa Kapal Phinisi sudah mendunia, dan mampu menambah daya promosi Inacraft tidak hanya di Indonesia, tetapi ke seluruh dunia.

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sulawesi Selatan, Naoemi Octarina, menaruh harapan yang cukup besar pada pelaksanaan Inacraft 2023, di mana Sulsel terpilih menjadi ikon. Naoemi optimistis hasil kerajinan Sulsel bisa menembus pasar global.

"Inacraft ini ajang internasional. Dan Sulawesi Selatan bisa menjadi ikon dengan proses yang cukup panjang. Karena

itu, ajang ini harus dimanfaatkan untuk memasarkan produk-produk kita," kata Naoemi, di sela pelaksanaan Inacraft 2023 di Jakarta, Kamis, 2 Maret 2023.

Melibatkan 24 kabupaten kota yang membawa lima produk unggulannya masing-masing, Naoemi berharap agar para pengrajin dan pemerintah daerah di Sulsel bisa belajar dari daerah lain bagaimana meningkatkan kualitas produk kerajinan mereka.

"Kami berharap kualitas kerajinan kita yang saat ini sudah baik, bisa lebih baik lagi dan diminati pasar dunia," ujarnya.

Warisan Budaya Tak Benda

Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu daerah yang memiliki kekayaan potensi budaya. Hingga 2022, sudah 64 karya budaya yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia.

"Sulawesi Selatan begitu kaya dengan potensi budaya, termasuk dengan karya budaya yang telah ditetapkan sebagai

gai Memory of The World (MOW) 2021, dan Pinisi sebagai The Art of Boatbuilding in South Sulawesi: Representatif list of The Intangible Cultural Heritage of Humanity 2017.

"Naskah budaya La Galigo telah diakui UNESCO, bahkan lebih panjang dari pada naskah Mahabharata, yang sebelumnya sebagai naskah terpanjang di dunia," bebernya.

Pemprov Sulsel juga mengapresiasi program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang mengarahkan setiap provinsi mengajukan karya budayanya untuk ditetapkan sebagai WBTB Indonesia.

Untuk 2023, Pemprov Sulsel telah melakukan pengusulan karya budaya untuk ditetapkan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB), di antaranya Pesta adat Jene'-Jene' Sappara, Gantala Jarang, Tari Bondesa, Tammu Taung Pulau Pajenekang, Tari Pajaga Sando Batu, Tenun Toraja, Bahasa Wotu, A'lera, Mattojang Paccekke, Genrang Labobo, Bo-



Warisan Budaya Tak Benda (WBTB). Sejumlah kekayaan potensi budaya menjadi modal besar bagi kami untuk mengembangkan WBTB," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Sulsel, Sukarniaty Kondolele, saat menjadi salah satu narasumber dalam Seminar pada Inacraft 2023 di Merak Room, JCC, Kamis, 2 Maret 2023.

Dua karya budaya dari Sulsel diketahui telah berhasil mendapatkan sertifikat UNESCO, yaitu Naskah La Galigo seba-

sara, dan Nasu Palekko.

Pemprov Sulsel juga terus berkomitmen dalam mempertahankan dalam menjaga WBTB, termasuk dalam menghadirkan kebijakan penggunaan bahasa daerah dalam satuan pendidikan.

"Bapak Gubernur telah mempresentasikan local language di hadapan UNESCO. Pemprov juga telah mengcover di dalam kurikulum (pendidikan) berkaitan dengan pemberdayaan penggunaan local language," jelas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sulsel ini. ●

Perda RTRW Kota Samarinda 2024-2042

UBAH HALUAN JADI INDUSTRI PERDAGANGAN

Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan menjadi masa depan pembangunan di Kalimantan Timur, termasuk di Kota Samarinda. Dalam perencanaan Bappenas, Samarinda menjadi jantung bagi IKN Nusantara yang saat ini sedang dikebut pembangunannya.

Samarinda sebagai kota penyangga, dalam perencanaannya menjadi pusat pengembangan energi baru terbarukan.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, ingin membangun Samarinda menjadi kota dengan pertumbuhan industri jasa dan perdagangan yang unggul. Bahkan, target 20 tahun ke depan, Samarinda bakal menjadi sentral pengembangan

menarik banyak investasi masuk ke Samarinda. Sebab, para investor butuh kepastian tata ruang dan arah pembangunan kota saat hendak berinvestasi.

Untuk itu, kebutuhan merevisi RTRW merupakan faktor penting dalam mendorong percepatan pembangunan kota. Hal ini pula yang melatari Samarinda menghapus peruntukan ruang untuk kegiatan pertambangan batu bara di

"Setelah itu, tidak ada lagi kawasan di Samarinda yang diperuntukan bagi pertambangan. Kami beri kesempatan sampai 2026 kepada pemilik IUP maupun PKP2B untuk melakukan aktivitas. Kami ingin ada transformasi. Samarinda tidak boleh bergantung pada perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui," kata Andi Harun, akhir Februari lalu.

Perubahan itu ditetapkan melalui revisi RTRW Kota Samarinda 2022-2042 yang disahkan menjadi Peraturan Daerah, 17 Februari 2023. Namun, sebelum disahkan, perjalanan revisi RTRW ini sempat berpolemik di DPRD Samarinda. Beberapa fraksi melakukan penolakan.

Fraksi PDI-P menganggap proses revisi RTRW cacat prosedur karena terburu-buru. Namun, penolakan itu tak menghentikan langkah Andi Harun mengetok palu pengesahan. Pasca ditetapkan, tak ada lagi kawasan di Samarinda yang mengakomodasi pertambangan.

Andi Harun mengatakan penghapusan sektor pertambangan dari Kota Samarinda karena dampak selama ini telah banyak merugikan warga kota, misalnya bencana tanah longsor dan banjir.

Dalam sejarah pembuatannya, Perda RTRW Kota Samarinda 2022-2042 telah menjalani proses selama lima tahun yang terbagi menjadi proses Peninjauan Kembali RTRW yang dilaksanakan pada 2018 dan dilanjutkan dari 2019.

Lalu mendapatkan persetujuan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada 13 Desember 2022. Kemudian, dapat dilanjutkan proses penetapan menjadi Perda selambat lambatnya di 13 Februari 2023. Namun, kemudian Raperda ini



industri perdagangan dan jasa berskala regional.

Untuk itu, dia berharap para pelaku usaha bisa menyesuaikan dengan fokus pembangunan ekonomi di Samarinda. Hal itu agar pertumbuhan investasi bisa sejalan dengan fokus pengembangan kota.

"Tentu saya berharap kebijakan ini mendapat dukungan dari masyarakat," kata Andi Harun.

Menurut Andi Harun, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terbaru bakal

dalam RTRW 2024-2042.

Andi Harun sedang mengubah haluan perekonomian Kota Tepian, sebutan lain dari Samarinda, dari yang mengandalkan sumber daya alam fosil atau tak terbarukan menjadi energi terbarukan.

Karena itu, dia memberi tenggat waktu operasi sektor pertambangan batu bara di Samarinda hingga 2026 atau sampai berakhirnya izin pertambangan, baik IUP (Izin Usaha Pertambangan) maupun PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara).

tidak dapat ditetapkan di sidang paripurna DPRD Kota Samarinda hingga 13 Februari 2023.

Sehingga, Andi Harun sebagai kepala daerah mengacu pada regulasi yang ada dengan mengambil alih penetapan itu. Pada masa kepemimpinan Andi Harun, proses penetapan Raperda ini telah bergulir selama hampir 2 tahun.

Andi Harun menuturkan, pada saat menjabat sebagai Wali Kota Samarinda, salah satu cita-citanya adalah Perda RTRW Kota Samarinda dapat disahkan pada akhir 2021. Hal itu menurutnya mempercepat investasi guna meningkatkan lapangan pekerjaan dan mengurangi penduduk miskin.

"Dengan peningkatan investasi, maka akan berdampak pada penciptaan lapangan pekerjaan dan penurunan angka pengangguran, serta mengurangi jumlah penduduk miskin," ucapnya.

Karena itu, menurutnya, Perda RTRW adalah faktor yang sangat penting untuk percepatan investasi sekaligus sebagai dasar kegiatan pemanfaatan ruang. RTRW memberikan kepastian investasi bagi calon investor yang hendak menanamkan modalnya di Samarinda.

Adapun poin-poin dari Perda RTRW Kota Samarinda 2022-2042, yakni luas total Kota Samarinda adalah 71.678,36 hektar.

Luas Kawasan yang direncanakan sebagai kawasan lindung adalah 8.756 hektare atau sebesar 12,22 persen dengan rincian pola ruang Badan Air, Kawasan Perlindungan Setempat dan Ruang Terbuka Hijau.

Lalu, luas kawasan yang direncanakan sebagai Kawasan Budidaya adalah 62.921 ha atau sebesar 87,78 persen. Rinciannya, rincian pola ruang mayornya adalah Kawasan Hortikultura 10.088 ha, Kawasan Perumahan 37.071 hektare, Kawasan Hutan Produksi Tetap 516 ha, Kawasan Perdagangan dan Jasa 7.484 ha, Kawasan Transportasi untuk APT Pranoto 1.562 ha, Kawasan Tanaman Pangan 1.012,36 ha, dan Kawasan Peruntukkan Industri 3.768 ha.

Walaupun persentase pola ruang lindung adalah 12,22 persen, akan tetapi apabila pola ruang lindung ini ditambahkan luas kawasan yang direncanakan tetap sebagai area hijau, yaitu Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultu-

ra, dan Hutan Produksi Tetap, maka persentase area yang menjadi lindung, termasuk pemanfaatan hijau, menjadi 28,42 persen.

Sudah Konsultasi

Pengesahan Perda RTRW Samarinda 2022-2042 tak dipersoalkan Panitia Khusus RTRW DPRD Kalimantan Timur dan menganggap hal tersebut sah saja ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Ketua Pansus RTRW DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, menerangkan, sebelum penetapan RTRW, Pemkot Samarinda telah berkonsultasi ke Pemprov Kalimantan Timur.

"Kota Samarinda sudah melakukan konsultasi bersama provinsi, berharap apa yang mereka konsultasikan itu tidak ada yang berbeda pada saat nanti pengesahan RTRW provinsi," ujar Demmu, 27 Februari 2023.

Sementara itu, Raperda RTRW Kaltim tengah berjalan dan tinggal menunggu jadwal pengesahan melalui rapat

pengesahan, bisa diambil alih gubernur," tegasnya.

Dalam PP 21/2021, apabila RTRW tidak ada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, apabila sudah selesai persetujuan substansi dari Kementerian ATR/BPN, maka pemerintah boleh mengambil alih.

Pengaruh ke DBH

Keputusan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menetapkan Perda RTRW Kota Samarinda 2022-2042 yang didalamnya melarang adanya zona tambang disebut bakal memiliki efek pada Dana Bagi Hasil (DBH) kota Samarinda dari sektor Sumber Daya Alam (SDA) atau batu bara.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Samarinda, Hermanus Barus, mengatakan, pihaknya diundang ke Jakarta untuk melakukan perhitungan DBH, termasuk di dalamnya membahas porsi yang akan didapatkan Kota Tepian jika tidak lagi mejadi daerah penghasil batubara



paripurna DPRD Kaltim.

Demmu menegaskan, jika nantinya ada perbedaan antara RTRW Kaltim dan RTRW Kota Samarinda, maka RTRW Samarinda perlu melakukan penyesuaian.

Pengesahan RTRW dilakukan oleh Pemkot Samarinda juga dianggap bisa terjadi juga di provinsi. Hal itu bisa terjadi jika dalam waktu dua bulan pengesahan juga belum dilakukan DPRD Kaltim setelah substansi dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

"Boleh diambil alih Pemkot, RTRW Kaltim pun bisa diambil alih gubernur, kalau dua bulan DPRD tidak melakukan

Meski tidak lagi menjadi daerah penghasil, Samarinda tetap akan memperoleh DBH batubara. Namun, dengan porsi yang tidak sebanyak daerah penghasil.

"Kami akan dapatnya DBH selaku tanggung," ujarnya.

Kendati demikian, menurutnya masih ada waktu yang panjang sebelum sampai di 2026 bagi Pemkot Samarinda mempersiapkan diri. Jika semua IUP berhenti atau izin tidak dikeluarkan pada 2026, baru pada 2027 Samarinda tidak dapat DBH sebagai daerah penghasil. ●



MINYAK GORENG HARUS TERSEDIA PRODUSEN BISA TETAP LABA

Minyak goreng lagi-lagi jadi soal. Persoalan minyak goreng ini tahun lalu membuat Muhammad Lutfi dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Perdagangan. Awal 2023, jelang puasa dan Lebaran, pasokan minyak goreng harus jadi perhatian jika Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, tak ingin kena masalah besar.

Zulkifli Hasan sendiri sudah menyatakan, pemerintah dan produsen siap meningkatkan tambahan suplai minyak goreng kemasan dan curah sebanyak 450 ribu ton per bulan selama tiga bulan, mulai Februari hingga April 2023. Hal tersebut sebagai upaya agar kebutuhan masyarakat dapat tercukupi selama memasuki puasa hingga Lebaran 2023.

Pria yang akrab disapa Zulhas ini menyebut, jumlah pasokan tersebut meningkat 50 persen dari program Domestic Market Obligation (DMO) bulanan yang dialokasikan sebesar 300 ribu ton per bulan. Produsen minyak goreng juga telah menyatakan komitmennya meningkatkan pasokan DMO minyak goreng di dalam negeri.

"Para pelaku usaha akan melaporkan realisasi di hari Jumat setiap minggunya dengan tembusan kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Selain itu, pelaku usaha juga akan melakukan pembinaan kepada jaringan distribusi masing-masing agar HET (Harga Eceran Tertinggi) diimplementasikan dengan baik," kata Zulhas usai menggelar Rapat Evaluasi Pendistribusian Minyak Goreng Rakyat dengan produsen minyak goreng di Jakarta, Senin, 30 Januari 2023.

Zulhas juga menyampaikan akan memastikan kecukupan suplai minyak goreng ke pasar-pasar rakyat dan ritel-ritel modern di seluruh Indonesia. Selain itu memastikan pendistribusian dan pemenuhan sesuai HET, Kemendag juga akan memonitor dan mengevalu-

asi pelaksanaan pendistribusian minyak goreng, baik kemasan merek Minyakita maupun curah di pasar rakyat maupun ritel modern di seluruh wilayah Indonesia.

Adapun HET minyak goreng di tingkat konsumen sebesar Rp14.000 per liter untuk Minyakita atau Rp15.500 per kilogram untuk minyak goreng curah.

Namun, di tengah upaya menjaga pasokan minyak goreng rakyat, Kemendag menemukan 515 ton stok Minyakita di gudang penyimpanan milik PTBina Karya Prima (BKP) di Marunda, Jakarta Utara, Selasa, 7 Februari 2023.

Dalam sidak yang dilakukan bersama Satgas Pangan Polri itu, diketahui 515 ton stok Minyakita itu yang diproduksi pada Desember 2022 di PT BKP tidak

didistribusikan karena belum mendapatkan Domestic Market Obligation (DMO).

PT BKP sendiri merupakan produsen terbesar Minyakita di Indonesia. Pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag ini merupakan tindak lanjut rapat tata niaga produk minyak goreng rakyat antara Kemendag bersama para pelaku usaha serta rapat dengan Menko Kemaritiman dan Investasi.

Atas temuan tersebut, Zulhas menegaskan agar para pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan Minyakita untuk menaati peraturan perundang-undangan terkait tata kelola program minyak goreng rakyat yang diatur dalam Permendag 49/2022.

"Saat ini kami telah memerintahkan PT BKP untuk segera mendistribusikan ke pasar dengan harga sesuai HET. Pendistribusian ini akan dipantau Ditjen PKTN Kemendag bersama Satgas Pangan. PT BKP sebagai salah satu produsen terbesar Minyakita diharapkan dapat mendistribusikan Minyakita ke pasar, sehingga tidak terjadi isu kelangkaan dan isu Minyakita dengan harga yang tidak sesuai HET di pasar," terangnya.

Zulhas juga menegaskan pendistribusian Minyakita harus segera dilakukan, khususnya ke pasar rakyat di wilayah Pulau Jawa. Selain itu, Kemendag juga akan mengurangi distribusi Minyakita untuk ritel modern dan penjualan daring.

Pengawasan Ketat

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, menegaskan, peredaran dan penjualan minyak goreng rakyat, baik curah maupun kemasan Minyakita akan mendapat perhatian ekstra.

Direktorat
J e n -

deral Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag juga akan melakukan pengawasan intensif terhadap produksi dan penjualan Minyakita di pasar daring.

Pengawasan dilakukan untuk penjualan melalui niaga elektronik (e-commerce) maupun platform media sosial. Sebanyak 6.678 tautan berisi konten penjualan Minyakita sudah diturunkan akibat melanggar aturan.

Berdasarkan pengawasan, PKTN Kemendag telah menurunkan sebanyak 6.678 tautan dari beberapa marketplace (marketplace) serta melakukan pengamanan sebanyak 937 kanton atau

berdasarkan UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU 7/2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah terakhir dengan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja Bab III Paragraf 8 di Sektor Perdagangan.

Ketua Umum Partai Amanat (PAN) itu pun meminta agar pelaku usaha tidak memanfaatkan situasi ketika masyarakat kesulitan mendapatkan minyak goreng rakyat.

Para pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan minyak goreng rakyat merek Minyakita harus menaati peraturan perundang-undangan terkait tata kelola program minyak goreng



11.246 liter dari beberapa pelaku usaha yang menjual melalui media sosial, seperti Facebook dan Instagram.

"Pengawasan ini dilakukan karena semakin banyaknya pelaku usaha yang tidak menaati aturan yang ditetapkan, sehingga menyebabkan ketersediaan minyak goreng rakyat Minyakita berkurang dan harga melebihi batas HET Rp14.000 per liter," kata Zulhas.

Menurut Zulhas, pengawasan dilakukan

rakyat sebagaimana diatur dalam Permendag 49/2022.

"Minyak goreng rakyat dalam bentuk kemasan dengan merek Minyakita tidak boleh dijual melebihi HET Rp14.000 per liter, serta tanpa ada pembatasan penjualan," tegasnya.

Direktur Jenderal PKTN, Veri Anggriono, menambahkan, bagi pelaku usaha yang memperdagangkan Minyakita melalui media sosial dengan harga melebihi HET dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sampai dengan pencabutan perizinan berusaha di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan Pasal 80 PP 80/2019 dan Pasal 23 Permendag 49/2022.

Kementerian Perdagangan akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat agar dapat dilakukan penjualan sesuai dengan HET. Sedangkan, terhadap pelaku usaha yang melakukan penjualan melalui media sosial akan dilakukan pemblokiran akun den-

gan berkoordinasi bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika,” ujarnya.

Untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng rakyat, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan mengeluarkan SE 3/2023 tentang Pedoman Penjualan Minyak Goreng Rakyat. Selain memastikan kembali HET minyak goreng kemasan Rp14.000 per liter dan minyak curah Rp15.500 per kg, aturan ini melarang penjualan minyak goreng rakyat secara bundling.

“Kemendag memastikan ketersediaan minyak goreng menjelang puasa dan Lebaran aman. Untuk memastikan stabilitas harga dan mencegah terjadi-

dengan produk lainnya. Ketiga, penjualan minyak goreng rakyat oleh pengecer kepada konsumen paling banyak 10 kg per orang per hari (untuk minyak goreng curah) dan 2 liter per orang per hari untuk minyak goreng kemasan Minyakita.

“Semua pihak harus mematuhi pedoman penjualan minyak goreng rakyat ini. Kemendag tidak segan akan melakukan pengawasan dan penindakan bagi para pelaku usaha yang mengabaikan peraturan ini,” ujar Kasan.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan, permasalahan kelangkaan salah satunya disebabkan oleh berkurangnya pasokan Domestic Market Obligation

(INSW) mendepositokan 66 persen hak ekspor yang dimiliki eksportir. Dengan begitu, eksportir tidak bisa langsung menggunakan hak ekspor yang dimiliki. Pencairan deposito akan dilakukan secara bertahap sejak 1 Mei 2023, melihat kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban DMO.

Selain itu, Luhut mengatakan akan memberikan ruang pencairan deposito lebih cepat bagi perusahaan yang harus memenuhi kontrak yang sudah ada. Luhut juga meminta seluruh instansi terkait, seperti Satgas Pangan, Kemendag, dan Kemenperin untuk melakukan pengawasan.

Luhut berharap pengawasan dilakukan berbasis data Simirah atau Sistem Informasi Minyak Goreng Curah dan hasil temuan di lapangan terhadap pelaksanaan distribusi. Menurutnya, pengawasan perlu ditingkatkan menjelang Ramadan dan Lebaran.

“Saya minta segala bentuk pelanggaran dapat ditindak tegas. Kemendag mohon untuk meningkatkan insentif pengali Minyakita menjadi 1,5 dan 1,75 untuk kemasan bantal dan pouch/botol untuk menjaga gap dengan minyak curah tetap menarik,” ujar Luhut.

Luhut mengatakan, di tengah situasi yang ada, komunikasi menjadi kunci. Masyarakat harus diberikan informasi yang seluas mungkin terhadap kondisi yang sebenarnya masih terjaga dan melaporkan jika terjadi pelanggaran di lapangan.

Ia meminta kepada Kemendag dan Satgas Pangan untuk membuka jalur hotline yang dapat dihubungi dan ditindaklanjuti laporannya. Luhut mengatakan, Kemenko Marves bersama Kemendag, Kemenperin, dan BPKP akan melakukan perhitungan yang lebih rinci ke depannya terkait sejumlah isu penting. Beberapa di antaranya soal rasio pengali, kewajiban DMO, harga Domestik Price Obligation (DPO), pencairan deposito hingga akhir tahun, dan menyusun langkah antisipasi kelangkaan minyak.

Produsen Minyak Goreng Rugi

Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) sekaligus Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia, Sahat Sinaga, menyatakan,



Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan

nya kenaikan harga, Kemendag perlu mengatur pedoman penjualan minyak goreng rakyat kepada produsen, distributor, hingga pengecer,” ungkap Pelaksana Tugas Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kasan, di Jakarta, Jumat, 10 Februari 2023.

Dalam surat edaran yang dikeluarkan pada 6 Februari 2023 ini disebutkan tiga butir pedoman yang harus ditaati produsen, distributor, hingga pengecer.

Pertama, penjualan minyak goreng rakyat harus mematuhi harga Domestic Price Obligation (DPO) dan HET. Kedua, penjualan minyak goreng rakyat dilarang menggunakan mekanisme bundling

(DMO), terutama dari pasokan Minyakita.

Dalam rapat koordinasi dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Selasa, 7 Februari 2023, Luhut meminta agar pasokan DMO oleh produsen minyak goreng menjadi 50 persen hingga Lebaran nanti. Alokasi per perusahaan ditentukan berdasarkan rata-rata kinerja ekspor perusahaan selama Oktober hingga Desember 2022 secara proporsional dan kepatuhan masing-masing perusahaan terhadap pemenuhan DMO.

Selain itu, Luhut juga meminta agar Kemendag, Kementerian Perindustrian, dan Indonesia National Single Window

produsen minyak goreng mengakui enggan memproduksi Minyakita karena biaya produksi lebih tinggi dari harga jual yang ditetapkan pemerintah. Sementara harga minyak sawit mentah (CPO) global sedang turun, sehingga tidak bisa menutupi kerugian karena memproduksi Minyakita.

Dia mengatakan para produsen minyak goreng enggan memproduksi Minyakita lantaran tidak menyanggupi biaya produksi. Pemerintah juga tidak memberikan subsidi bagi produsen untuk menutupi kekurangan biaya produksi.

"Minyakita ini langka karena mereka tidak ada cuannya," ujar Sahat dalam Konferensi Pers Tantangan dan Perkembangan Industri Hilir Sawit 2023 di Kantor DMSI, Jakarta, Selasa (7/2/2023).

Sahat mengatakan, kerugian yang dirasakan oleh produsen minyak goreng biasanya bisa ditutupi dengan adanya keuntungan dari ekspor minyak sawit. Namun, produsen minyak goreng saat ini enggan untuk melakukan ekspor karena harga CPO sedang turun di pasar global. Beban eksportir juga bertambah dengan adanya biaya Bea Keluar (BK).

"Jadi untuk ekspor CPO sendiri mereka malas, karena harus ada BK dan harga CPO di pasar global sedang anjlok. Tapi kalau mereka tidak ekspor, tidak ada keuntungannya," ujarnya.

Oleh sebab itu, Sahat menyarankan Kementerian Keuangan gotong royong untuk membantu permasalahan ini dengan tidak menetapkan BK untuk sementara waktu.

"Jadi, sementara waktu BK di 0 kan dulu biar pengusaha sawit bisa ekspor tanpa harus dibebani dengan biaya keluar, karena harga ekspor sudah turun, di tambah ada biaya keluar, jelas rugi mereka," tegasnya.

Selain itu, Sahat menuturkan, konsumen minyak goreng sawit premium turun signifikan karena beralih ke Minyakita yang merupakan minyak goreng subsidi. Hal itu menyebabkan permintaan Minyakita membludak.

Sahat mengatakan, konsumen minyak goreng premium pada 2021 masih 1,22 juta ton. Namun, jumlah konsumen tersebut turun menjadi 1 juta ton pada 2022. Tingginya permintaan Minyakita tersebut disebabkan karena harganya yang jauh di bawah minyak

goreng premium yaitu Rp14.000 per liter atau Rp 15.500 per kg. Minyakita juga telah menggunakan kemasan sehingga lebih higienis dibandingkan minyak curah.

Sahat mengatakan, banyaknya konsumen minyak goreng premium yang beralih ke Minyakita juga karena komoditas tersebut dijual di ritel modern. Kondisi itu membuat Minyakita bayak diserap oleh kalangan menengah ke atas.

"Itu yang membuat langka. Jadi mereka yang punya duit itu lebih memilih beli Minyakita daripada minyak premium," ungkapnya.

Ekonom Universitas Indonesia, Vid Adrison, berpendapat, program Bantuan

takan harus jual Rp20.000. Kira-kira gimana, jualan atau tidak? Jual rugi," ujar Vid saat menjadi saksi ahli dalam sidang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Jakarta, Senin (7/2/2023).

Vid mengatakan, pemerintah sebaiknya menyiapkan kompensasi jika ingin menetapkan harga Minyakita sesuai HET. Namun sayangnya, pemerintah tidak memberikan kompensasi tersebut sehingga produsen rugi dan enggan memproduksi Minyakita.

Menurut Vid, kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng murni disebabkan kebijakan pemerintah mengintervensi pasar dengan mengeluarkan peraturan yang berubah-ubah. Hal ini



Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Sahat Sinaga

Langsung Tunai (BLT) minyak goreng lebih baik dibandingkan program Minyakita. Pasalnya, pemerintah menetapkan Minyakita harus dijual sesuai HET yang nilainya lebih rendah dari biaya produksi.

HET Minyakita adalah Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kg. Vid mengatakan, HET tersebut di bawah harga produksi minyak sawit saat ini. Pemerintah sebaiknya menetapkan HET di atas biaya produksi. Dengan demikian, produsen tidak merugi saat harus memproduksi Minyakita.

"Ibaratnya orang sudah jual pecel lele Rp25.000 terus tiba-tiba pemda meny-

dinilai tidak efektif dan menimbulkan ketidakpastian.

"Saya lebih setuju kalau kebijakan yang diambil adalah cash transfer melalui pemberian BLT ke masyarakat, bukan dengan menetapkan HET. Dengan begitu, produsen tetap berproduksi tanpa merugi, sehingga pasokan terjaga. Sementara masyarakat tetap mampu membeli walaupun ada kenaikan harga," jelasnya.

Menurut Vid, program BLT minyak goreng lebih baik untuk menjaga daya beli masyarakat. Selain tidak merugikan produsen, BLT minyak goreng juga lebih tepat sasaran. ●



DETEKSI DINI MELAWAN KANKER

Kanker menjadi penyakit paling mematikan kedua di dunia karena sulit terdeteksi. Prevalensi penyakit kanker di Indonesia pun semakin meningkat setiap tahun.

Data Global Cancer Statistics (GLOBOCAN) menunjukkan, pada 2020, terdapat kasus baru kanker sebanyak 19,3 juta, di mana 10 juta di antaranya menyebabkan kematian.

Sementara di Indonesia, Globocan mencatat terdapat 396.914 kasus baru kanker, di mana 234.511 di antaranya menyebabkan kematian.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menganjurkan seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan deteksi dini atau skrining kesehatan secara berkala. Deteksi dini berpeluang besar untuk meningkatkan kesempatan seseorang menjadi penyintas untuk penyakit tidak menular seperti kanker. Dengan demikian, biaya perawatan, tingkat keparahan, kecacatan, bahkan kematian bisa dikendalikan.

"Kanker itu dapat dikendalikan, angka survival ratenya tinggi, tapi syaratnya harus deteksi dini. Sekitar 90 persen bisa dikendalikan, kalau ditemukan pada stadium lanjut, maka 90 persen akan meninggal," kata Budi Gunadi

Sadikin dalam acara Fun Walk peringatan Hari Kanker Sedunia di Jakarta.

Budi menjelaskan, di Indonesia, sebagian besar pasien yang memeriksakan diri saat kanker sudah dalam stadium lanjut. Akibatnya 90 persen pasien kanker tidak mendapatkan penanganan yang optimal yang berakhir pada kematian. Faktor penyebabnya beragam.

Pertama, masyarakat takut untuk melakukan pemeriksaan karena khawatir dengan keterbatasan dana. Kedua keterbatasan peralatan, sehingga belum banyak fasilitas kesehatan, utamanya di daerah yang mampu melakukan skrining kanker. Ketiga, kurangnya tenaga kesehatan yang berkompeten.

Ketiga faktor tersebut kini tengah menjadi fokus Kementerian Kesehatan untuk direformasi. Reformasi dilakukan dengan melakukan transformasi kesehatan layanan rujukan yang merupakan pilar kedua transformasi kesehatan.

Dari sisi pembiayaan, Budi menyebutkan bahwa saat ini skrining kanker

sudah ditanggung BPJS Kesehatan, sehingga masyarakat bisa memanfaatkannya secara gratis di fasilitas pelayanan kesehatan.

"Misalnya untuk kanker kolorektoral, sekarang untuk laki-laki usia di atas 50 tahun sudah bisa melakukan deteksi dini gratis di fasyankes," ucap Menkes.

Kemudian dari segi peralatan medis, Kemenkes berupaya memenuhinya berdasarkan jenis kanker yang paling banyak diderita masyarakat. Saat ini Kemenkes berupaya memenuhi alat deteksi dini untuk penanganan kanker pada wanita, pria maupun anak.

Alat deteksi dini itu di antaranya mammografi dan USG di 514 kabupaten/kota untuk deteksi dini kanker payudara dan kanker serviks pada perempuan, pemenuhan CT Scan di 514 kabupaten/kota untuk deteksi dini kanker kolorektoral pada laki-laki, serta pemenuhan 10.000 hematoanalyzer untuk mendeteksi kelainan darah putih pada anak-anak.

"Kanker payudara paling banyak diderita perempuan, kami sudah memasang 6.000 USG, mudah-mudahan 10.000 USG bisa kami penuhi tahun ini. Kedua ada serviks, kami sudah wajibkan vaksinasi HPV. Testingnya nanti kami geser dari tes IVA dan papsmear ke HPV DNA, ini untuk pencegahan," jelasnya.

Selain upaya preventif melalui skrining kesehatan, Kemenkes juga mendorong seluruh daerah mampu melakukan perawatan dan pengobatan kanker. Hal ini mengingat banyak pasien kanker yang melakukan pemeriksaan sudah dalam stadium lanjut.

"Kami mendorong agar 514 kabupaten/kota mampu melakukan bedah onkologi dan kemoterapi serta 34 provinsi bisa melakukan radioterapi," ujarnya.

Selanjutnya dari segi tenaga kesehatan, Menkes berupaya mempercepat pemenuhan tenaga kesehatan yang bermutu dan berkualitas di seluruh fasyankes di Indonesia melalui beberapa program khusus, seperti pengiriman dokter spesialis adaptan luar negeri, penugasan khusus, dan program pengampunan.

Ketua Umum Perhimpunan Onkolo-

gi Indonesia (POI), Cosphiadi Irawan, menyebut, pada 2020, setidaknya ada sekitar 10 juta penduduk dunia yang meninggal akibat kanker. Dari tahun ke tahun, jumlah ini dilaporkan terus meningkat dan di tahun 2023 diperkirakan ada sekitar 13 juta kematian akibat penyakit berbahaya ini.

Cosphiadi membeberkan tingginya angka kematian kanker tersebut disebabkan oleh pola hidup yang kurang sehat, seperti konsumsi makanan cepat saji, kurang aktivitas fisik, merokok, dan minum alkohol. Kebiasaan buruk ini diperparah dengan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini. Pada stadium awal, kanker tidak menunjukkan gejala, sehingga seringkali tidak disadari oleh penderita. Akibatnya banyak kasus kanker yang terdeteksi pada stadium lanjut.

"Kebiasaan ini menyumbang hingga 30 persen. Karena itu deteksi dini sangat penting untuk pencegahan," katanya.

Dia pun berharap upaya pemerintah untuk memperkuat deteksi dini penyakit kanker dapat menekan jumlah

kesakitan dan kematian akibat kanker.

"Di Puskesmas nantinya akan ada 10 ribu USG yang akan digunakan untuk deteksi dini kanker payudara, sehingga delay of diagnosis harapannya bisa kita kurangi. Ini tentunya tidak terlepas dari peran teman-teman di rumah sakit, saatnya kita duduk bersama untuk mendukung pemerintah melakukan reformasi layanan kanker yang lebih baik," tegasnya.

Perhimpunan Dokter Spesialis Onkologi Radiasi Indonesia (PORI) bekerja sama dengan Pelayanan Kanker Terpadu Instalasi Pelayanan Onkologi Radiasi RSUPN Cipto Mangunkusumo, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan institusi lainnya juga menyampaikan komitmen untuk membantu pemerintah dalam melakukan edukasi kanker di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

"Karena kami ketahui bahwa yang melakukan pengobatan kanker itu memang urusan hospital, akan tetapi kalo kita melakukan kontrol, maka semua stakeholder dalam satu negara harus ikut bekerja. Yuk lakukan dekteksi dini



Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin

sesuai anjuran pemerintah,” ujar Ketua PORI, Soehartati Gondhowiardjo.

Kerja Sama Atasi kanker

Kementerian Kesehatan menjalin kerja sama dengan The University of Texas MD Anderson Cancer Center untuk mengatasi masalah kanker di Indonesia. Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan kesepakatan kerja atau Memorandum of Understanding

salah satu dari beberapa rumah sakit kanker terkemuka di dunia.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit yang menyebabkan banyak kematian di Indonesia. Bagi perempuan, kanker payudara menjadi penyebab utama kematian.

Budi meminta RS Dharmais bisa memastikan layanan kanker di Indonesia



Direktur Utama RS Dharmais, Soeko Werdi Nindito

(MOU) yang dilaksanakan di Rumah Sakit Kanker Dharmais, 3 Februari 2023.

The University of Texas MD Anderson Cancer Center adalah sebuah rumah sakit dan institusi penelitian kanker yang terkemuka di Amerika Serikat. Berbasis di Houston, Texas, MD Anderson fokus pada pengobatan kanker dan penelitian untuk menemukan obat baru dan metode pengobatan yang lebih efektif. MD Anderson merupakan

ditingkatkan kualitasnya. Menurutny, peningkatan kualitas itu perlu dilakukan karena kenaikan kasus kanker di Indonesia sangat cepat dan menjadi tiga besar penyebab kematian.

Rumah Sakit Kanker Dharmais sebagai National Cancer Center (NCC) Indonesia telah bekerja sama dengan NCC di berbagai negara. Saat ini, RS Kanker Dharmais telah menjadi pengampu nasional jaringan kanker untuk pengembangan layanan kanker, pelatihan dan

pendidikan para ahli kanker di Tanah Air.

RS Kanker Dharmais ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan untuk menjadi pelaksana kerja sama tersebut. Adanya kolaborasi antara Kementerian Kesehatan dan The University of Texas MD Anderson Cancer Center diharapkan pasien kanker dapat lebih mempercayakan pengobatan penyembuhannya di 144 rumah sakit pemerintah Indonesia, khususnya di Rumah Sakit Kanker Dharmais.

Ada enam ruang lingkup kerja sama yang akan dilaksanakan antara Kementerian Kesehatan dengan The University of Texas MD Anderson Cancer Center. Pertama, perencanaan dan pelaksanaan pengendalian kanker. Kedua, dukungan pelatihan, pendidikan dan peningkatan kapasitas.

Ketiga, kunjungan fakultas, cendekiawan, dan administrator. Keempat, organisasi konferensi bersama, simposium, atau pertemuan ilmiah. Kelima, sistem rujukan pasien dari Indonesia ke MD Anderson di Houston, Texas, dan dari MD Anderson ke Indonesia termasuk ke Dharmais National Cancer Center. Keenam, kolaborasi pada program telementoring Proyek ECHO berkoordinasi dengan ECHO Institute di University of New Mexico.

Direktur Utama RS Dharmais, Soeko Werdi Nindito, mengatakan, kerja sama Kemenkes dan MD Anderson meliputi empat hal. Pertama terkait pelayanan, yakni bagaimana Indonesia bisa membandingkan pelayanan kanker dengan MD Anderson. Kedua terkait pendidikan dan pelatihan, di mana pelayanan kanker di MD Anderson tergolong maju, sehingga Indonesia bisa mengirimkan SDM kesehatan ke sana atau MD Anderson mengirimkan SDM ahli ke Indonesia untuk berbagi pengetahuan.

Ketiga adalah penelitian, di mana MD Anderson membantu mengembangkan penelitian terkait kanker di Indonesia. Keempat terkait data, di mana dari kerja sama ini Indonesia diharapkan dapat mengelola data kanker dengan baik, seperti pengelolaan data kanker yang dilakukan negara maju.

“Jadi, bagaimana nanti RS Dharmais sebagai implementasi unit dari Ke-

menterian Kesehatan untuk pelayanan kanker yang bekerja sama dengan MD Anderson, kami akan menguatkan empat hal ini. Satu hal lagi bahwa ada program komprehensif kanker yang sudah dimiliki Indonesia, kami akan integrasikan dengan teknologi yang dimiliki oleh MD Anderson,” ungkap Soeko.

Menurut Soeko, Kementerian Kesehatan menargetkan semua penduduk Indonesia, terutama di daerah terpencil, bisa mendapatkan akses layanan kanker serupa dengan di perkotaan. Sebagai model percontohan dan percepatan target tersebut, Kemenkes jalin kerja sama dengan The University of Texas MD Anderson Cancer Center, serta melakukan kunjungan ke RSUP Ngoerah dan RSUD Bali Mandara.

Soeko mengatakan RS Kanker Dharma sebagai unit pelaksana kerja sama ini akan menindaklanjuti kolaborasi tersebut.

“Kami juga mensosialisasikan kepada MD Anderson bagaimana sistem layanan kanker nanti ke depannya, bahwa ada rumah sakit vertikal Kemenkes di Bali, seperti Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah dan rumah sakit kabupaten/kota seperti Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara yang akan memberikan layanan kanker,” ujar Soeko.

Soeko berharap, layanan kanker bisa diberikan di semua rumah sakit sesuai dengan level-levelnya. Begitu juga dengan layanan jantung, stroke, ginjal, dan lay-

anan ibu dan anak.

“Kerja sama ini dilakukan supaya masyarakat di daerah terpencil lebih cepat dan lebih mudah untuk mendapatkan akses kesehatan yang sama seperti masyarakat di kota besar,” ucapnya.

Senior Vice President Strategy and Business Development di MD Anderson, Chris Mc Kee, mengaku sangat menantikan kerja sama dengan Kementerian Kesehatan dalam hal penanganan penyakit kanker di Indonesia.

“Kanker salah satu penyakit yang menimpa masyarakat Indonesia secara tidak proporsional. Jadi, kami berharap dapat bekerja sama dengan tim di seluruh Indonesia untuk bekerja mencegah terjadinya kanker,” tutur Mc Kee.

Menurutnya, kerja sama ini bertujuan untuk menaikkan level lebih tinggi untuk menyaring lebih banyak pasien kanker serviks dan kanker payudara pada wanita, dan kanker paru-paru pada laki-laki.

Sebar Alat Deteksi Dini

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian

Kesehatan, Eva Susanti, menyatakan Kemenkes sudah menyebarkan alat deteksi dini kanker secara bertahap untuk peningkatan dan pemerataan kemampuan rumah sakit di provinsi maupun kabupaten/kota guna menghadapi penyakit kanker.

“Deteksi dini ini bisa dilakukan di fasilitas kesehatan terdekat. Bisa di puskesmas, klinik, rumah sakit hingga Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL), misalnya di tingkat kabupaten atau kota,” kata Eva di Jakarta, Senin, 13 Februari 2023.

Eva menuturkan alat deteksi dini bagi pemeriksaan kanker yang disediakan itu ditujukan agar penderita kanker mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik. Penyebarannya pun dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan jejaring rumah sakit yang ada di Indonesia.

Guna meningkatkan layanan kesehatan bagi pasien kanker, Kemenkes tidak hanya menyebar alat deteksi dini. Tetapi juga memberikan beasiswa bagi spesialis kanker dan pengadaan pelatihan bagi dokter umum, perawat dan bidan di tingkat FKRTL. Bersama dengan balai pelatihannya, pada tahun ini, Kemenkes turut melakukan pelatihan dan pendidikan ahli kanker di Indonesia.

Eva menambahkan, sembari melibatkan berbagai lintas sektor dalam penyebaran edukasi terkait kanker guna meminimalkan risiko perburukan dalam masyarakat, Kemenkes melatih sekitar 1.500 kader yang nantinya akan diintegrasikan ke dalam layanan posyandu prima.

“Kader-kader inilah yang akan menjangkau masyarakat karena deteksi dini pada umumnya, termasuk kanker, ini akan kami kembangkan dan men-yasar ke usia 15 sampai 59 tahun. Ini yang akan kami dorong, tapi pada 2023 ini target kami masih sekitar 70 persen,” katanya.

Eva membeberkan, rencananya mulai 2023, Kemenkes akan menajamkan deteksi dini kanker leher rahim tidak hanya melalui tes IVA, tetapi juga pemeriksaan HPV yang mengandalkan alat tes PCR yang sudah dimiliki oleh setiap kabupaten/kota. •

Direktur P3TM, Eva Susanti



JANGAN BOSAN KENDALIKAN INFLASI

Dinamika global masih akan menjadi ujian bagi kondisi perekonomian 2023. Perkembangan inflasi yang mencekam di luar negeri patut dimonitor masak-masak oleh Indonesia.

Presiden Joko Widodo bahkan menyebut, saat ini, inflasi menjadi momok perekonomian semua negara. Jika melihat negara lain, tingkat inflasi yang mendera sudah berada pada level yang begitu tinggi.

Jokowi pun cukup bersyukur, kondisi inflasi nasional masih cukup aman di

kisaran 5,51 persen secara tahunan (yoy) pada pengujung 2022. Meski begitu, dirinya mengimbau stakeholder terkait untuk memantau pergerakan inflasi nasional dengan saksama.

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, meminta gubernur menjalankan perannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam mengendalikan inflasi. Tugas tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan menggelar rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) maupun bupati/wali kota di daerahnya.

Rapat tersebut penting untuk mengetahui kondisi inflasi, seperti daerah mana saja yang angka inflasinya tinggi serta jenis komoditas apa saja yang menyebabkan naiknya inflasi. Kemudian, gubernur juga dapat melakukan koordinasi maupun langkah intervensi untuk

mengendalikan inflasi.

"Saya mohon betul kepada rekan-rekan gubernur, baik Bapak/Ibu gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, tolonglah paling tidak sebulan (sekali) rapat mengenai inflasi ini, baik dengan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah), Forkopimda, itu ada rapat itu saja sudah bagus. Kemudian, sekiranya juga rapat (dengan) Satgas Pangan secara detail dan kemudian tolong rapat juga dengan bupati wali kota," kata Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin, 27 Februari 2023.

Tito Karnavian menekankan agar gubernur dapat membantu kabupaten/kota yang angka inflasinya terbilang tinggi. Upaya ini penting dilakukan, terlebih pemerintah provinsi memiliki ke-

mampuan instrumen berupa keuangan maupun kewenangan untuk membantu kabupaten/kota.

Selain itu, gubernur juga dapat memberikan penghargaan kepada bupati/wali kota yang mampu mengendalikan inflasi. Penghargaan tersebut dapat diberikan tiga bulan sekali, sehingga terbangun iklim kompetitif antarbupati maupun wali kota.

“Karena apa? Kami menyampaikan ini karena kami dua kali turun ke rapat koordinasi di provinsi-provinsi, mohon maaf, saya menemukan beberapa provinsi belum pernah ada rapat antara provinsi, kabupaten, dan kota tentang inflasi ini, artinya masing-masing kabupaten/kota bergerak sendiri-sendiri,” ungkapnya.

Mantan Kapolri ini menegaskan, keberhasilan pengendalian inflasi bergantung pada kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga tidak bisa hanya mengandalkan salah satu pihak. Karena itu, pemerintah pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) terus melakukan berbagai upaya pengendalian yang perlu didukung oleh TPID.

Sebagai langkah mengendalikan inflasi di daerah, Tito Karnavian pun meminta pemerintah daerah untuk mewaspadai kenaikan harga empat komoditas, yakni beras, bawang merah, minyak goreng, dan cabai merah.

Berdasarkan data dari BPS, harga empat komoditas itu mengalami kenaikan hampir merata di daerah. Harga beras, misalnya, mengalami kenaikan di 147 kabupaten/kota. Harga bawang merah mengalami kenaikan di 125 kabupaten/kota, serta harga minyak goreng naik di 118 kabupaten/kota. Selain itu, harga cabai merah diketahui juga naik di 96 kabupaten/kota.

“Nah, 4 komoditas ini kita tahu bahwa ada 2 yang memang banyak diatur oleh pemerintah (pusat). Artinya intervensi pemerintah, beras dan minyak goreng. Sedangkan, cabai merah dan bawang merah sebetulnya bisa diatasi daerah, baik dengan gerakan tanam maupun kerja sama antara daerah yang terutama defisit itu mengambil dari yang surplus,” ujar Mendagri.

Kerja sama antara daerah tersebut, seperti yang dicontohkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe. Saat dilakukan pengecekan langsung oleh Presiden

Jokowi, pertengahan Februari lalu, harga komoditas cabai merah dan bawang merah relatif stabil dan berada di bawah harga nasional. Kondisi tersebut dipicu oleh kerja sama Pemkot Lhokseumawe dengan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang memiliki produksi cabai merah dan bawang merah yang cukup.

Di lain sisi, Mendagri juga mengimbau daerah agar mewaspadai komoditas gula pasir konsumsi. Berdasarkan data dari Badan Pangan Nasional (Bapanas), gula pasir konsumsi menjadi salah satu komoditas yang perlu diwaspadai setelah beras dan minyak goreng.



Mendagri mengimbau agar daerah mengaktifkan kembali peran Satgas Pangan Daerah dengan melibatkan Forkopimda. Selain itu, Satgas Pangan Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota tersebut juga diminta untuk menggelar rapat secara rutin. Upaya ini diharapkan dapat membantu pengendalian inflasi di daerah agar lebih optimal.

Tito Karnavian juga menyebut, Presiden Jokowi mengapresiasi upaya pemerintah pusat dan daerah dalam mengendalikan inflasi. Pasalnya, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka inflasi di Januari 2023 sebesar 5,28 persen. Angka ini menurun dari Desember 2022 yang sebesar 5,51 persen.

Tren yang terbilang positif tersebut tidak lepas dari kerja keras pemerintah pusat dan daerah. Di pemerintah pusat, melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, pemerin-

tah secara rutin menggelar Rapat Koordinasi yang melibatkan kementerian/lembaga terkait.

Sementara untuk pengendalian inflasi daerah, Kementerian Dalam Negeri juga mengadakan Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang rutin digelar setiap minggunya. Rakor itu diselenggarakan berdasarkan arahan Presiden Jokowi yang meminta agar penanganan inflasi dilakukan seperti penanganan pandemi Covid-19.

Tito mengatakan, Presiden Jokowi meminta agar upaya pengendalian inflasi terus dilanjutkan. Sebab, Presiden

Jokowi secara rutin memonitor hasil dari Rakor Pengendalian Inflasi Daerah. Bahkan, Presiden tak jarang juga melakukan pengecekan langsung di daerah dan menanyakan langsung kepada kepala daerah terkait mengenai kondisi inflasi di daerah tersebut.

Mendagri mengklaim, pihaknya secara rutin juga melakukan evaluasi penanganan inflasi di daerah. Hal ini tidak lepas dari peran Kemendagri yang memiliki Satuan Tugas Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri, Tomsu Tohir. Tim ini rutin mengecek daerah-daerah dalam mengendalikan inflasi.

“(Tim ini) setiap hari mengecek daerah mana yang melakukan operasi pasar, daerah mana yang melakukan monitoring, dan kemudian melakukan operasi pasar murah. Semua data-datanya ada,” tegas Mendagri.

Selain itu, dalam rangka mengamankan komoditas pangan, pemerintah dae-

rah juga perlu mewaspadaikan faktor cuaca di tengah musim penghujan saat ini. Terutama untuk komoditas utama seperti beras, bawang merah, dan cabai merah. Diperkirakan pada musim penghujan produksi komoditas tersebut akan rendah, sementara permintaan masyarakat tinggi.

Jaga Stabilitas Ketersediaan Barang

Mendagri mengimbau pemerintah daerah agar tak bosan dalam menjaga stabilitas ketersediaan barang, sehingga harga tetap terjangkau. Selain itu, Mendagri juga meminta Pemda untuk rutin mengendalikan inflasi. Sebab kondisi inflasi di Indonesia cenderung dinamis dan dapat berdampak luas kepada masyarakat.

"Target dari Bapak Presiden sebetulnya (angka inflasi) adalah 4 persen.

Terkhusus minyak goreng, berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan, harga minyak goreng curah dan premium relatif stabil. Namun, harga minyak goreng bermerek Minyakita masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Kemudian, dari DMO (domestic market obligation) dari hasil CPO (Crude Palm Oil) itu ditarget produksinya 450 ribu ton sampai dengan April dan sudah terealisasi 182 ribu ton. Dengan realisasi 182 ribu ton, berdasarkan asumsi Kementerian Perdagangan, sepanjang distribusinya lancar maka harga akan turun," ungkapnya.

Untuk itu, jajaran Pemda diminta untuk membantu proses distribusi tersebut. Apalagi, pemerintah juga telah membentuk Satgas yang melibatkan Kemendag dan Satgas Pangan Polri yang

seperti kita menangani COVID-19," ungkap Mendagri dalam Podcast Kabinet dan Sekretariat Kabinet (Podkabs) di kanal YouTube Sekretariat Kabinet, Sabtu, 25 Februari 2023.

Tito mengungkapkan, pihaknya telah menetapkan sembilan langkah panduan daerah untuk melakukan inflasi. Pertama, melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia. Kedua, melaksanakan rapat teknis TPID.

Ketiga, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting. Keempat, melaksanakan gerakan Pencanangan Gerakan Menanam. Kelima, melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait. Keenam, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menaikan barang.

Ketujuh, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan. Kedelapan, merealisasikan belanja tidak terduga (BTT) untuk dukungan pengendalian inflasi. Kesembilan, memberikan bantuan transportasi dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

"Saya membentuk tim dipimpin oleh Irjen dibantu oleh beberapa dirjen. Saya buat piket khusus, anak-anak IPDN yang baru-baru itu, pinter-pinter tapi kan anak-anak yang bertahan kuat dia, piket 24 jam, ada 50 orang. Tiap hari ngecek-ngecek, ngecek kan ada sembilan langkah yang saya buat waktu itu," ujarnya.

Data hasil pantauan tersebut akan diberitakan dalam rapat pengendalian inflasi daerah yang digelar oleh Kemendagri setiap minggunya, yang dihadiri oleh jajaran pemerintah di daerah.

"Itu kami ekspos. Saya buat iklim kompetitif. Kami tampilkan data sepuluh daerah (dengan inflasi) tertinggi, sepuluh daerah (dengan inflasi) terendah," ucapnya.

Menurut Mendagri, daerah-daerah dengan inflasi tertinggi akan diminta menjelaskan kendala yang dihadapi. Sedangkan, daerah-daerah yang berhasil mengendalikan laju inflasinya akan diminta untuk berbagi upaya yang telah dilakukan, sehingga dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya.

"Saya juga konsisten, di daerah-daerah yang inflasi tinggi ya kami datangi. Saya suruh datang ke timnya, meman-



Jadi kita baru mencapai 5,28 persen, kita harus menurunkan Insya Allah dengan kebersamaan bisa mencapai 4 persen inflasi kita. Itu akan sangat baik sekali," ujar Mendagri.

Tito juga meminta Pemda dan semua pihak agar mewaspadaikan kenaikan harga komoditas. Apalagi beberapa pekan mendatang masyarakat akan menyambut datangnya Ramadan dan Lebaran. Kondisi itu diperkirakan akan berdampak pada dinamika inflasi di daerah.

Mendagri mengatakan, di antara empat komoditas yang perlu menjadi perhatian, secara khusus komoditas beras dan minyak goreng perlu diwaspadai secara menyeluruh. Sebab, menurut data BPS, kedua komoditas itu mengalami kenaikan di beberapa daerah.

berfungsi dalam membantu kelancaran distribusi Minyakita ke konsumen.

Amanat Presiden Jokowi

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, terus mengingatkan para kepala daerah untuk menekan laju inflasi di daerah masing-masing karena merupakan amanat Presiden Jokowi agar Mendagri mengelola pengendalian inflasi di tingkat daerah seperti yang dilakukan dalam pengendalian pandemi COVID-19.

"Bapak Presiden, Pak Jokowi pada bulan September memanggil saya ke Istana, 'Pak Tito sebagai Mendagri kendalikan inflasi daerah,' itu perintah beliau. Artinya, saya mengendalikan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Beliau sampaikan, 'bikin (sistem pengendalian)

tau. Tapi jangan sampai ada transaksi, disogok supaya bagus. Kalau ketahuan, kita copot," tegasnya.

Mendagri meyakini, upaya sistematis yang dilakukan pemerintah dalam pengendalian inflasi di daerah tersebut berkontribusi signifikan dalam menekan lanjut inflasi nasional.

"Itu one of the best, negara kita inflasinya dibanding negara lain. Pertumbuhan ekonomi juga kita luar biasa, di tengah kesulitan tahun 2022 (tumbuh) 5,3 persen. Jadi, tim ekonomi kita, termasuk daerah-daerah, juga memberikan sumbangsih bagus," ungkapny.

Optimalkan Produk Dalam Negeri

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, pun mengingatkan kepada pemerintah daerah terkait arahan Presiden Jokowi yang disampaikan pada Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Balikpapan, Kalimantan Timur, 23 Februari 2023.

Menurut Mendagri, setidaknya ada beberapa poin yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, yakni peningkatan konsumsi dan belanja masyarakat, hilirisasi produk, ketersediaan pangan, belanja produk dalam negeri, dan peningkatan iklim investasi.

Terkait poin peningkatan konsumsi dan belanja, Pemda diharapkan bisa meningkatkan ekonomi dengan mendukung kegiatan-kegiatan seni dan olahraga. Selain itu, mempermudah perizinan kegiatan-kegiatan seni dan olahraga dengan tetap memperhatikan aspek keamanan.

Terkait hilirisasi produk, pemerintah tidak hanya mendukung di bidang tambang, tapi juga di bidang perikanan.

"Dari hanya menjual ikan perlu didorong oleh kepala daerah-kepala daerah, investasi baik dalam negeri maupun luar negeri yang bisa melakukan produksi hilirisasi perikanan," ujarnya.

Terkait ketersediaan pangan, Mendagri meminta Pemda terus menjaga keterjangkauan barang dan harga di masyarakat. Pemda diminta untuk melakukan monitoring komoditas pangan, melakukan pengecekan langsung ke lapangan, menjalin kerja sama dengan daerah yang surplus komoditas, hingga memberikan subsidi transportasi pada

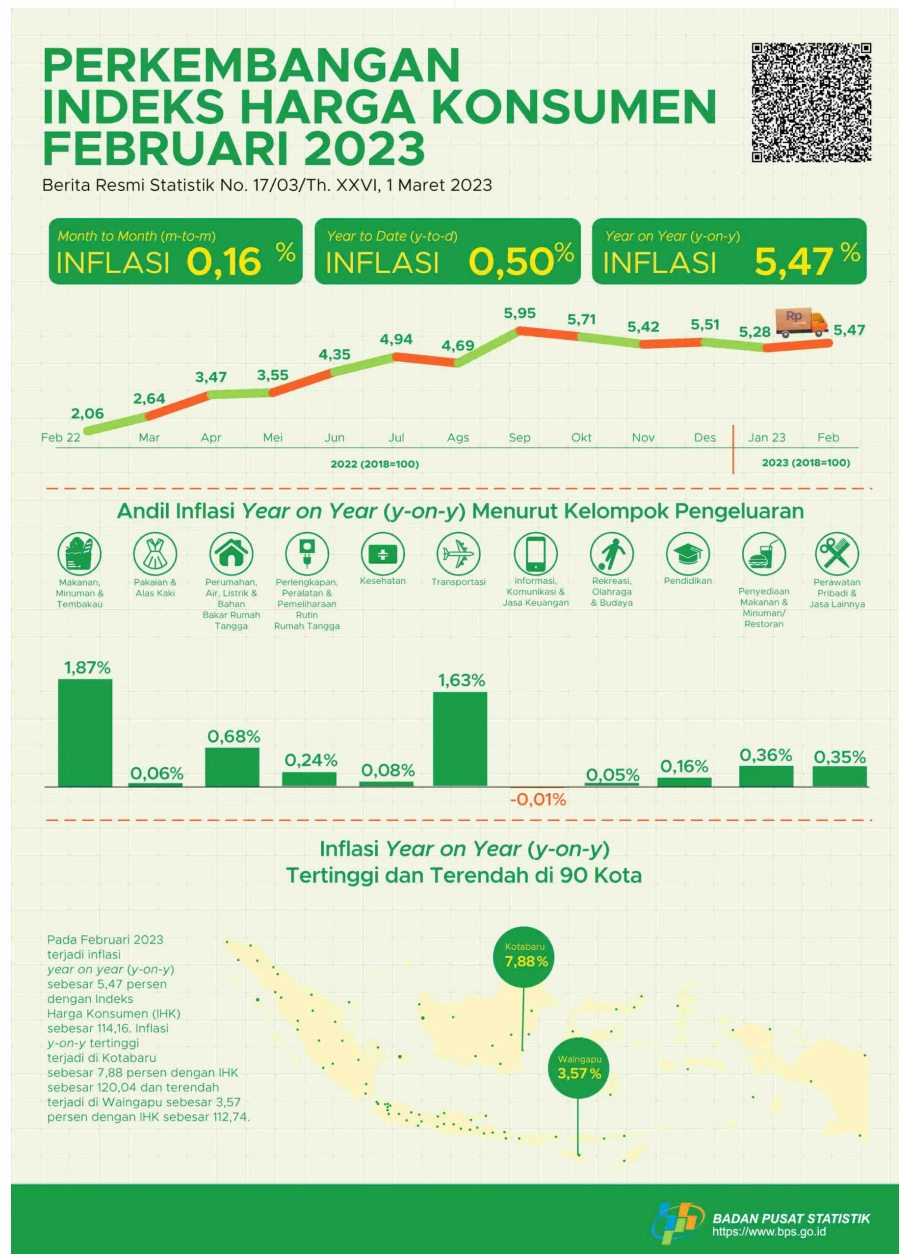
para pelaku usaha.

Kemudian, Mendagri menyinggung peningkatan iklim investasi yang berhubungan dengan perizinan. Sesuai arahan Presiden, Mendagri meminta Pemda untuk menyederhanakan perizinan berusaha dan membuat sistem yang terbebas dari penyuapan (korupsi).

"Tarik menarik antara daerah dengan legislatif di daerah termasuk juga legislatif tingkat pusat, nah ini melibatkan sis-

telah berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk melakukan rapat koordinasi secara hybrid mengenai evaluasi pembelian produk dalam negeri oleh daerah.

"Dalam praktik, kita sudah tahu bagaimana pentingnya mendorong peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. Supaya kita jadi tuan rumah penyedia, produsen di negeri



tem politik, tapi intinya adalah investasi di daerah terutama adalah perizinan berusaha (dipermudah)," tandasnya.

Selanjutnya, terkait penggunaan produk dalam negeri, Pemda perlu menganggarkan 40 persen dari anggaran belanja barang dan jasa. Kemendagri

sendiri dan pemakai di negeri sendiri," katanya.

Berdasarkan data yang dikantongi Kementerian Dalam Negeri per Januari 2023, dari 552 Pemda, baru 257 di antaranya yang telah menayangkan produk di e-Katalog. •



PEMBERANTASAN KORUPSI TAK PERNAH SURUT

Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index Indonesia pada 2022 melorot empat poin menjadi 34 dari sebelumnya 38 pada 2021 atau berada di posisi 110 dari 180 negara yang disurvei. Menurut catatan Transparency International Indonesia (TII), ini merupakan penurunan paling drastis sejak 1995.

Pada 31 Januari 2023, TII merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2022 yang mengacu pada delapan sumber data dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor publik pada 180 negara dan teritori. Skor dari 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih.

Dengan hasil tersebut, Indonesia hanya mampu menaikkan skor IPK sebanyak dua poin dari skor 32 selama satu dekade terakhir sejak 2012. Pada 2021, skor IPK Indonesia adalah 38 dengan peringkat 96.

Di Asia Tenggara, Singapura menjadi negara yang dinilai paling tidak korup dengan skor 83, lalu diikuti Malaysia (47), Timor Leste (42), Vietnam (42), Thailand (36), Indonesia (34), Filipina (33), Laos (31), Kamboja (24), dan Myanmar (23).

Sedangkan di tingkat global, Denmark menduduki peringkat pertama dengan IPK 90, diikuti Finlandia dan Selandia Baru (87), Norwegia (84), Singapura dan Swedia (83), serta Swiss (82). Sementara posisi terendah ada Somalia dengan skor 12, Suriah dan Sudan Selatan (13), serta Venezuela (14).

TII mencatat ada tiga data yang mendorong penurunan skor IPK Indonesia tersebut. Pertama, Political Risk Service (PRS) International Country Risk Guide atau korupsi dalam sistem politik, pembayaran khusus dan suap ekspor impor dan hubungan mencurigakan antara politikus dan pebisnis, yang turun menjadi 35 dari 48 pada 2021.

Kedua, IMD World Competitiveness Yearbook atau suap dan korupsi dalam sistem politik, yang turun lima poin dari 44 menjadi 39. Terakhir, indeks Political and Economic Risk Consultancy (PERC)



Asia Risk Guide turun menjadi 29 dari 32.

Sementara, tiga indeks yang stagnan adalah Global Insight Country Risk Ratings (risiko individu/perusahaan dalam menghadapi praktik korupsi dan suap untuk menjalankan bisnis) pada angka 47, Bertelsmann Foundation Transformation Index (pemberian hukuman pada pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangan dan pemerintah mengendalikan korupsi) pada skor 33, dan Economist Intelligence Unit Country Ratings (prosedur yang jelas dan akuntabilitas dana publik, penyalahgunaan pada sumber daya publik, profesionalisme aparatur sipil, audit independen) tetap pada skor 37.

Selanjutnya, ada dua indeks yang naik, yaitu World Justice Project – Rule of Law Index (pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif, kepolisian, dan militer menggunakan kewenangannya untuk keuntungan pribadi) skornya naik satu menjadi 24 dari 23, dan Varieties of Democracy (kedalaman korupsi politik, korupsi politik di eksekutif, legislatif dan yudikatif, korupsi di birokrasi, korupsi besar dan kecil yang memengaruhi kebijakan pub-

lik) naik dua poin menjadi 24 dari 22.

Berdasarkan analisis TII, indikator ekonomi mengalami tantangan besar antara profesionalitas perusahaan dalam menerapkan sistem antikorupsi dengan kebijakan negara yang melonggarkan kemudahan berinvestasi. Analisis lain adalah dari sisi indikator politik, tidak terjadi perubahan signifikan karena korupsi politik masih marak ditemukan. Selanjutnya, indikator penegakan hukum menunjukkan kebijakan antikorupsi terbukti belum efektif dalam mencegah dan memberantas korupsi.

Presiden Joko Widodo menyebut penurunan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia akan menjadi evaluasi pemerintah. Indeks Persepsi Korupsi juga menjadi masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk terus memperbaiki diri.

Presiden mengakui bahwa IPK menjadi salah satu indeks yang senantiasa dicermati pemerintah sebagai bahan masukan perbaikan pemerintah. Selain IPK, juga Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks Negara Hukum, dan Indeks Daya Saing Global.

“Komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah surut. Upaya pencegahan juga terus dilakukan dengan membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel,” kata Presiden Jokowi dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 7 Februari 2023.

Kepala Negara menjabarkan bahwa pemerintahannya terus berusaha mengembangkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), kemudian sistem perizinan berbasis teknologi informasi terintegrasi pusat dan daerah, yakni Online Single Submission (OSS), serta pengadaan barang dan jasa kementerian/lembaga pemerintahan melalui e-katalog.

Dalam hal penindakan, pemerintah juga telah dan akan terus melakukan pengejaran serta penyitaan terhadap aset-aset obligor BLBI yang tidak kooperatif.

“Aparat penegak hukum telah melakukan penindakan tegas terhadap sejumlah kasus megakorupsi, seperti kasus Asabri dan Jiwasraya. Hal serupa

juga akan dilakukan untuk kasus-kasus yang lainnya,” tegas Jokowi.

Sementara itu, di level hubungan antarnegara, pemerintah juga telah menggunakan kedudukan Keketuaan G20 untuk menyepakati agenda prioritas pemberantasan korupsi akan terus dilakukan. Hal serupa juga akan dilanjutkan dalam peran Keketuaan ASEAN 2023.

“Sebagai Ketua ASEAN, Indonesia akan menguatkan komitmen pemberantasan korupsi dan penegakan hukum

pilih.

Presiden Jokowi juga meyakini penurunan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tidak akan memengaruhi investor untuk berinvestasi di dalam negeri. “Karena investor yang dihitung kan untungnya gede atau enggak, IRR (internal rate of return) berapa, biasanya seperti itu, tapi bahwa itu sedikit memengaruhi, iya,” ujar Presiden.

IRR adalah perhitungan untuk mengukur tingkat pengembalian modal sendiri yang digunakan dalam men-

nakan tiga pendekatan, yaitu pendidikan, kemudian juga pencegahan, dan penindakan. Ini secara simultan dilakukan, karena itu, kalau terjadi penurunan itu di mana?” kata Ma’ruf Amin di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Sabtu, 11 Februari 2023.

Menurutnya, pemerintah juga melakukan berbagai upaya pencegahan melalui pelayanan publik, seperti mendirikan Mal Pelayanan Publik (MPP) guna melayani masyarakat secara cepat. Selain itu, melalui pelayanan yang digital, tanpa bertemu langsung, sehingga cepat, mudah, dan tidak ada celah melakukan pungli. Kemudian, membuat semacam zona integritas di birokrasi, kemudian wilayah bebas korupsi. Semua itu dalam rangka meminimalkan korupsi.

Segera Lakukan Perbaikan

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyatakan, penurunan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 dibandingkan 2021 menjadi kerisauan pemerintah.

Menurutnya, penurunan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tersebut merupakan satu keprihatinan karena pemerintah terdahulu melakukan reformasi saat Indeks Persepsi Korupsi di angka 20 pada 1999. Namun, kemudian setiap tahun naik dan mencapai puncaknya pada 2019 di angka 39.

“Kemudian turun 38, lalu tetap bertahan di 38, dan sekarang turun menjadi 34. Indeks Persepsi Korupsi artinya persepsi masyarakat internasional tentang seberapa besar skor korupsi di Indonesia, berarti kalau dari interval 0-100, kita ada di angka 34,” ujar Mahfud MD kata Mahfud MD, Jumat, 10 Februari 2023.

Selain itu, Mahfud mengatakan, pemerintah akan melakukan perbaikan-perbaikan setelah Indeks Persepsi Korupsi Indonesia turun, meski penurunan tersebut cukup mengejutkan.

Menurut dia, pada indeks penghitungan hasil TII, terdapat delapan lembaga yang menjadi sumber data dan penilaian untuk menilai IPK Indonesia. Dari kedelapan lembaga tersebut, tidak ada lembaga yang biasanya digunakan untuk menjadi sumber dan penilaian IPK Indonesia yakni Forum Ekonomi Dunia (WEF).



di kawasan,” ujarnya.

Oleh karena itu, Presiden mengingatkan kembali seluruh jajaran pemerintahan, baik di pusat maupun daerah, untuk terus memperbaiki sistem administrasi pemerintahan dan sistem pelayanan publik yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, Presiden juga mengingatkan kepada jajaran aparat penegakan hukum untuk melakukan tugasnya dengan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu dan tidak terbang

jalankan suatu usaha, atau dengan kata lain perhitungan untuk mengetahui tingkat efisiensi dari sebuah investasi.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga menegaskan, pemerintah tetap berkomitmen memberantas korupsi meski Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 menunjukkan penurunan sebanyak 4 poin. Pemerintah akan mengkaji penyebab penurunan indeks tersebut.

“Kami tentu akan teliti ya penurunan persepsi korupsi. KPK sendiri menggu-

"Ingin kami sampaikan, dengan tetap menghargai hasil TII itu, memang yang kami temukan itu ada 13 lembaga sigi internasional; yang dipakai untuk Indonesia itu delapan dan yang biasanya dipakai, tahun ini tidak dipakai Indonesia, padahal perbaikan kami menuju ke situ yaitu lembaga sigi yang sangat terkenal, World Economic Forum," jelasnya.

Dia menyebutkan Indonesia mendapat penilaian tinggi di WEF, namun hal itu tidak digunakan dalam perhitungan IPK 2022 oleh TII.

"Di situ (WEF), kita tinggi, tapi tidak dipakai untuk menghitung kali ini. Jadi, tidak apa-apa. Kami hanya ingin menyatakan bahwa itu semua bukan fakta tapi persepsi dan baru terbatas pada hal-hal tertentu," ucapnya.

Selain itu, di sejumlah sektor lain, Indonesia mengalami peningkatan indeks, seperti di sektor demokratisasi, penegakan hukum, dan keadilan. Namun, di beberapa sektor memang terjadi penurunan, seperti di perizinan dan kemudahan berinvestasi.

"Kemudian, adanya kekhawatiran dari investor tentang kepastian hukum, macam-macam, memang itu memengaruhi agak turun. Kalau penegakan hukum, pemberantasan korupsi, demokrasi, itu naik meskipun kecil," katanya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengatakan, penurunan Indeks Persepsi Korupsi ini yang tertinggi, sebab selama pemerintahan reformasi indeksnya naik terus, termasuk era Presiden Jokowi naik secara konsisten, namun tiba-tiba turun.

"Apakah korupsi makin banyak? Bisa ya karena buktinya kita menangkap orang, OTT (operasi tangkap tangan). Tapi sebenarnya kalau peningkatan korupsi itu

sendiri yaitu normal, seperti itu terus sejak dahulu," ungkapnya.

Menurut Mahfud, yang sekarang menjadi masalah kenapa Indeks Persepsi Korupsi turun itu bukan karena penegakan hukum di bidang korupsi. Dia menyebutkan justru karena penegakan hukumnya yang naik.

"Tapi ini secara umum turun karena yang dinilai bukan hanya korupsi, melainkan misalnya perizinan berusaha. Itu orang berpendapat ini banyak kolusi. Mau investasi saja kok sulit. Orang sudah punya izin di satu tempat lalu diberikan izin ke orang lain. Seperti-seperti itu," katanya.

Dengan demikian, yang menjadi masalah adalah birokrasi perizinan. Itulah sebabnya pemerintah lalu mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja dalam bentuk omnibus law agar dalam proses perizinan tidak bertele-tele dan tidak dikerjakan oleh beberapa meja, tetapi satu pintu.

Meski demikian, kata Mahfud, dalam 3 tahun terakhir ini upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan negara sudah luar biasa.

Seperti Kejaksaan Agung yang melakukan amputasi terhadap tangan pemerintah sendiri.

"Orang pemerintah sendiri di-

tangkap semua. Asuransi Jiwasraya, Asabri, Kemhan (Kementerian Pertahanan), menteri dua ditangkap, gubernurnya digelandang, bupati-bupati ditangkap oleh OTT, dan sebagainya. Itu kita pemerintah sudah bersungguh-sungguh memberantas dalam arti tindakan. Akan tetapi, dalam arti administrasi birokrasi kita itu sedang merintis, sekarang kuat-kuatan dengan menyiapkan instrumen hukum yang memungkinkan kita bekerja cepat dan mengontrol cepat," katanya.

Mahfud menegaskan, hampir semua negara mengalami penurunan Indeks Persepsi Korupsi seperti Indonesia.

Menurut Mahfud, pengukuran IPK setiap negara berbeda-beda, tergantung agregasi dari jumlah lembaga survei yang dijadikan acuan.

"Misalnya Timor Leste lebih tinggi dari kita sekarang. Karena hanya di ukur dari empat lembaga survei, sedangkan kita delapan. Tapi enggak apa-apa, itu hak dari TII untuk membuat agregasi dan kami menghargai upaya TII," ujar Mahfud.

Mahfud juga menyebut opini sejumlah pejabat pemerintah tentang operasi tangkap tangan oleh KPK turut memengaruhi penurunan Indeks Persepsi Korupsi.

Sejumlah pejabat kabinet, di antaranya Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, hingga Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyampaikan opini terkait OTT KPK. Luhut sempat berkomenter dirinya tidak ingin Indonesia menjadi negara yang sering melakukan OTT, sedangkan Tito Karnavian menyatakan OTT bukanlah sebuah prestasi.

Mahfud mengatakan mengenai tepat atau tidaknya opini dua menteri itu disampaikan, hal itu sebaiknya dijawab langsung oleh Presiden Jokowi. Namun, opini itu berpengaruh terhadap penurunan IPK Indonesia karena membuat seolah-olah pemerintah tidak mau melakukan OTT terhadap para pelaku korupsi.

Menurut Mahfud, pemerintah akan menyikapi penurunan IPK secara lebih formal. Dia menegaskan pemerintahan Joko Widodo berkomitmen untuk terus memerangi korupsi. ●





REALISASIKAN KEBUTUHAN WARGA HINGGA PELOSOK DESA

Dengan turun langsung dan bertatap muka dengan masyarakat, Pj Bupati Muba, H Apriyadi Mahmud mengetahui persoalan apa saja terjadi di daerah itu khususnya dalam pembangunan infrastruktur. Bahkan untuk menyerap aspirasi tersebut, Apriyadi Mahmud harus menginap di rumah warga.

Seperti saat mengetahui lambatnya pembangunan infrastruktur di Kecamatan Batanghari Leko khususnya di Desa Pengaturan dikeluhkan warga. Hal tersebut membuat keprihatinan Pj Bupati Apriyadi Mahmud yang hadir langsung menyambangi Desa Pengaturan Kecamatan Batanghari Leko, Kamis (23/2/2023).

Kedatangan Pj Bupati Apriyadi Mahmud ini juga banyak membawa bantuan mulai dari sembako hingga pembangunan infrastruktur yang akan dimulai dalam waktu dekat terutama pembangunan jalan Desa Pengaturan, jalan Desa Pingap-Desa Tanah Abang, dan relokasi rumah warga pinggir sungai Batanghari Leko.

"Kami sudah belasan tahun tidak di-

datangi seperti ini. Alhamdulillah hari ini pak Bupati Apriyadi Mahmud datang langsung kesini mendengarkan dan melihat langsung kondisi Desa kami dan Alhamdulillah juga banyak diberi bantuan. Terima kasih pak Bupati Apriyadi dan Pemkab Muba," ungkap tokoh masyarakat Desa Pengaturan Kecamatan Batanghari Leko, Saparuddin.

Lanjutnya, kondisi jalan rusak yang dialami di Desa Pengaturan membuat kendala bagi warga membawa hasil pertanian dan beraktifitas sehari-hari.

"Hari ini terjawab sudah keresahan kami selama ini, Alhamdulillah jalan dan relokasi warga akan dimulai tahun ini," ucapnya.

Ia berharap, bantuan-bantuan untuk warga dan percepatan pembangunan infrastruktur di Desa Pengaturan terus

bergulir setiap tahunnya.

"Kami yakin pak Bupati Apriyadi Mahmud akan memberikan porsi perhatian yang besar untuk warga Batanghari Leko yang kami sadari sangat membutuhkan sentuhan dan bantuan dari pemerintah," ungkap dia.

Senada diungkapkan Kepala Desa Pengaturan, Andri. Ia mengaku, keberadaan Desa Pengaturan yang ada di pelosok atau diujung kecamatan membuat pembangunan desa tersendat.

"Oleh sebab itu kami sangat senang didatangi langsung pak Bupati Apriyadi dan persoalan yang kami alami selama ini terutama soal infrastruktur terjawab sudah dan langsung direalisasikan pak Bupati Apriyadi tahun 2023 ini," ucapnya.

Camat Batanghari Leko, Yulianto MSI

mengatakan kondisi Desa Pengaturan berada di pelosok kecamatan dan separuh warga dari total 800 jiwa berpenghasilan dari pertanian.

"Kehadiran pak Bupati Apriyadi hari ini memberikan semua solusi yang selama ini dikeluhkan warga. Alhamdulillah infrastruktur jalan disini akhirnya tahun ini dibangun dan warga yang tinggal di bantaran sungai difasilitasi relokasi," ujarnya.

Sementara itu, Pj Bupati Apriyadi Mahmud mengatakan kehadiran dirinya beserta jajaran untuk silaturahmi dan berdialog dengan warga Desa Pengaturan Kecamatan Batanghari Leko.

"Sudah menjadi tanggung jawab kami selaku pemerintah untuk hadir dan memberikan solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan warga. Alhamdulillah, tahun ini pembangunan jalan dan relokasi warga bantaran sungai di Desa Pengaturan serta pembukaan lahan perkebunan untuk 24 kelompok tani kita mulai realisasikan," ungkap Apriyadi.

Mantan Kabag Kesra Pemkab Muba ini menambahkan, terkait laporan lambannya pembangunan di Batanghari Leko akan diberikan realisasi bertahap.

"Kita lakukan bertahap, tahun anggaran 2024 sudah kita siapkan untuk pembangunan jerambah yang menghubungkan Desa Tanjung Bali-Desa Pengaturan," terangnya.

Kemudian, di APBD-P 2023 akan dilakukan perbaikan jalan poros Desa Tanah Abang-Desa Pingap-Desa Pengaturan.

"Prinsipnya bertahap persoalan infrastruktur dan kebutuhan lainnya di Batanghari Leko kita tuntaskan dan realisasikan," tandasnya.

Menginap Demi Serap Aspirasi Warga

Selain datang langsung ke desa terpencil, Pj Bupati Muba, Apriyadi Mahmud juga sering menginap di rumah warga untuk dapat menyerap permasalahan yang ada.

Seperti beberapa waktu lalu, puluhan warga dan tokoh masyarakat, tokoh agama serta tokoh pemuda di Desa Pangkalan Bayat Kecamatan Bayung Lencir, Senin (13/2/2023) malam ber-

dialog langsung dengan Pj Bupati Apriyadi Mahmud yang dalam kesempatan itu juga menginap satu malam di kediaman warga.

Tak ingin melewatkan momen berharga tersebut, warga hingga perangkat desa dan perangkat sekolah menyampaikan unek-unek aspirasi kondisi terkini yang dihadapi warga setempat.

Selain masalah infrastruktur jalan, persoalan kurangnya ruang lokal belajar di SMP Negeri 5 yang belasan tahun

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Muba ini juga mengatakan, ia sudah berkoordinasi langsung dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muba untuk mendorong realisasi penambahan dan pembangunan ruang belajar baru di SMP Negeri 5.

"Apalagi sekarang warga sudah menyiapkan hibah lahan untuk pembangunan gedung baru SMP Negeri 5," terangnya.

Apriyadi juga menyebutkan, sejumlah



minim lokal dan berada dibawah satu atap menjadi perhatian serius Pj Bupati Apriyadi Mahmud.

"Inilah alasan saya ingin turun langsung ke masyarakat untuk berdialog. Terus terang kondisi SMPN 5 yang belum mendapatkan alokasi penambahan ruang belajar baru saya ketahui, ini akan langsung kami eksekusi, Insya Allah kalau memungkinkan di APBD-P 2023 atau APBD induk 2024 akan kita tambah tiga ruang belajar dan satu ruang guru," ujar Pj Bupati Apriyadi Mahmud.

pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di Desa-Desa Bayung Lencir pada tahun 2023 ini akan dimasifkan.

"Terutama perbaikan jalan rusak menjadi prioritas di tahun 2023 ini, dengan harapan akses jalan layak dilalui warga," tuturnya.

Sementara itu, Kepala SMP Negeri 5 Pangkalan Bayat Sapran mengucapkan terima kasih atas prioritas khusus Bupati Muba Apriyadi Mahmud membangun dan menambah ruang belajar di SMP Negeri 5. • rhd/***

MANFAATKAN SUMBER ALAM UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dikenal dengan berbagai kekayaan sumber alamnya. Selain kaya dengan minyak dan gas, daerah ini juga dikenal sebagai penghasil karet dan kelapa sawit. Untuk hasil perkebunan ini Pemkab Muba, melalui Pj Bupati Apriyadi Mahmud telah melakukan berbagai terobosan.

Untuk pengolahan karet misalnya, pemerintah akan menyerap hasil perkebunan rakyat untuk memasok kebutuhan aspal jalan. Hal ini juga dilakukan untuk menghidupkan kembali pabrik pengolahan aspal karet yang sempat vakum.

Kepastian operasional pabrik aspal karet tersebut dilakukan setelah tim dari Unit Pusat Penelitian Karet Bogor-Getas menyatakan pabrik pengolahan aspal karet di Kabupaten Muba sudah siap kembali operasional. Hal ini diketahui setelah dilakukan uji laboratorium dan assesment oleh Unit Pusat Penelitian Karet Bogor-Getas.

"22 Februari 2023 beberapa waktu lalu hasil assesment-nya sudah dike-

luarkan. Hasilnya, pabrik pengolahan aspal karet Muba sudah kembali siap operasional," ungkap Peneliti Ahli Muda bidang Teknologi Pasca Panen Unit Pusat Penelitian Karet Bogor-Getas, Asron Ferdian Falaah.

Plt Kepala Dinas PUPR Muba, Mirwan Susanto merinci pelaksanaan penggunaan aspal karet pada proyek perbaikan infrastruktur jalan Merdeka Sekayu akan dimulai pada April 2023 nanti.

"Lelang akan dimulai pertengahan Maret 2023, estimasi pengerjaan akan dimulai April 2023," urainya.

Dari hasil penghitungan, estimasi untuk pembangunan jalan aspal karet di Jalan Merdeka Sekayu akan menyerap sekitar 10 ton karet petani Kabu-

paten Muba.

"Bisa berkemungkinan lebih dari 10 ton, prinsipnya karet yang digunakan untuk campuran aspal nantinya dibeli langsung dari petani karet Muba," jelasnya.

Plt Kadis Perkebunan Muba, Akhmad Toyibir mengatakan kembalinya operasional pabrik aspal karet ini merupakan kabar gembira bagi petani karet Muba.

"Ini kabar gembira, dimana nantinya karet petani Muba bisa terserap maksimal dan memberikan dampak kesejahteraan bagi petani karet Muba," tuturnya.

Ia mengaku, untuk ketersediaan karet lateks yang dibutuhkan nantinya petani karet Muba yang tergabung



dalam UPPB sangat mencukupi.

Pj Bupati Apriyadi Mahmud mengatakan, Pemkab Muba tidak hanya mendorong penggunaan aspal karet menggunakan APBD Muba, tetapi dia akan mendorong proyek nasional seperti jalan tol dan jalan negara yang melintasi Kabupaten Muba untuk menggunakan aspal karet.

"Nanti akan saya dorong juga proyek strategis nasional dan infrastruktur jalan pusat dan Provinsi menggunakan aspal karet yang tentunya memanfaatkan pabrik aspal karet di Muba," tegasnya.

Ia menambahkan, operasional pabrik aspal karet ini selain bermanfaat untuk ketahanan infrastruktur jalan yang lebih baik, juga memberikan dampak kesejahteraan langsung bagi petani karet di Muba.

"Jadi petani karet di Muba tidak susah lagi memasarkan karet mereka, operasional pabrik aspal karet dapat menyerap hasil karet petani," tandasnya.

Bangun Pabrik Minyak Goreng

Sementara untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng di Kabupaten Muba ini, Pj Bupati Muba, Apriyadi telah menggandeng PT Pura Barutama Divisi Engineering untuk menggarap kerjasama pembangunan pabrik mini minyak goreng (Pamigo).

"Mendirikan pabrik minyak goreng ini mimpi saya, Insya Allah kita akan wujudkan mimpi ini. Dan hari ini terjawab, PT Bura Barutama Divisi Engineering rupanya telah menggarap alat mesin pengolahan untuk pabrik mini minyak goreng yang bersinergi dengan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian," ungkap Pj Bupati Apriyadi Mahmud.

Lanjutnya, pendirian Pamigo tersebut berangkat dari keprihatinan dirinya pada saat terjadi kelangkaan minyak goreng (migor).

Beberapa waktu lalu yang sempat menjadi isu nasional. Kemudian, Kabupaten Muba memiliki 350 ribu hektar perkebunan kelapa sawit.

"Potensi bahan bakunya kita sangat banyak, apalagi petani kelapa sawit rakyat di Muba mempunyai TBS yang berkualitas tinggi yang berasal dari program replanting yang telah di inisiasi Bupati Dodi Reza beberapa tahun lalu dan sawit tersebut juga salah satunya

merupakan sawit yang ditanam perdana oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Program PSR pada tahun 2017 di Desa Panca Tunggal Kecamatan Sungai Lilin" terangnya.

Saat ini Pemkab Muba telah menyiapkan lahan seluas 30 hektar di Kecamatan Keluang yang merupakan lahan eks Madec Center untuk menjadi lokasi pabrik minyak goreng (migor).

"Kita sudah siapkan lahan, mesin pengolahan digarap PT Bura Barutama Di-

goreng.

"Ini sangat luar biasa, apalagi dari sisi ketersediaan bahan baku TBS kelapa sawit akan mendorong peningkatan kesejahteraan petani sawit rakyat, kemudian komitmen terus mendorong hilirisasi komoditas kelapa sawit," ucapnya.

Ia menambahkan, saat ini mesin pamigo sedang diuji laboratorium dan ini juga menjadi proyeksi skala prioritas Ditjen Perkebunan Kementan.



visi Engineering. Insya Allah ini bisa terealisasi, harapannya harga migor di Muba lebih murah dan menjadi produk asli lokal Bumi Serasan Sekate," harapnya.

Sementara itu, General Manager Plant PT Pura Barutama Divisi Engineering, Dandy Zulkarnain mengatakan Pj Bupati Apriyadi Mahmud mempunyai misi yang mulia terutama dalam perencanaan pendirian pabrik minyak

"Kalau kami melihat pamigo sudah sangat tepat berada di Muba, apalagi sangat didukung melalui kebijakan pak Bupati Apriyadi," tegasnya.

Selain itu, ia merinci untuk satu unit mesin pamigo dalam waktu sehari bisa melakukan pengolahan 7,5 ton TBS untuk menjadi migor. "Saat ini mesin sedang uji laboratorium," bebernya.

• rhd/***



HATI-HATI MAINKAN BIAYA HAJI

Ibadah haji bisa jadi sesuatu yang memikat pada waktu yang tepat. Termasuk menjelang tahun-tahun politik. Biaya haji yang baru-baru ini disahkan bisa jadi salah satunya.

Pemerintah dan Komisi VIII DPR akhirnya menyepakati besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1444 Hijriyah/2023 Masehi dengan rata-rata Rp90.050.637,26 per jemaah haji reguler.

Angka ini terdiri atas dua komponen, yaitu Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung jemaah dengan rata-rata Rp49.812.700,26 atau 55,3 persen dan penggunaan nilai manfaat per jemaah sebesar Rp40.237.937 atau 44,7 persen. Dengan skema ini, penggunaan dana nilai manfaat keuangan haji secara keseluruhan sebesar Rp8.090.360.327.213,67.

Kesepakatan ini diperoleh setelah Panitia Kerja (Panja) BPIH 1444 H/2023 M melakukan serangkaian diskusi panjang membahas usulan biaya haji pemerintah.

Pada 19 Januari 2023, pemerintah mengajukan usulan BPIH dengan rata-rata sebesar Rp98.893.909,11 per jemaah haji reguler dengan komposisi

Bipih Rp69.193.734,00 atau 70 persen dan nilai manfaat Rp29.700.175,11 atau 30 persen. Dengan skema ini, penggunaan dana nilai manfaat keuangan haji secara keseluruhan sebesar Rp5,9 triliun.

Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, menjelaskan, usulan awal pemerintah sebesar Rp98,89 juta per jemaah berangkat dari pentingnya memperhatikan aspek keadilan dan kesinambungan pengelolaan dana haji dalam kebijakan pemanfaatan hasil pengembangan dana haji atau nilai manfaat.

Karenanya, besaran penggunaan nilai manfaat yang diusulkan saat itu hanya berkisar 30 persen. Namun, setelah melalui serangkaian pembahasan, muncul sejumlah alternatif pemikiran yang perlu dielaborasi dan didiskusikan. Antara lain efisiensi dalam pengelolaan BPIH serta peningkatan Bipih secara gradual untuk mencapai konsep *istiha'ah*.

"Dinamika yang terjadi selama proses pembahasan dengan perbedaan

pendapat di antara kami merupakan cerminan dari wujud demokrasi, sekaligus menunjukkan betapa besar keinginan dan harapan kami untuk senantiasa berupaya meningkatkan pelayanan kepada jemaah haji. Komitmen untuk terus memperjuangkan peningkatan pelayanan kepada jemaah haji ini semoga dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa-masa mendatang," kata Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta, Rabu, 15 Februari 2023.

"Saya bersyukur dengan adanya kebijakan politik bahwa persentase Bipih lebih besar dari nilai manfaat, meski komposisinya belum sepenuhnya ideal. Saya kira ini menjadi momentum kita untuk mengarah pada skema perhajian yang lebih proporsional," ungkapnya.

Yaqut bersyukur, setelah melalui serangkaian pembahasan, ada sejumlah efisiensi yang disepakati. Efisiensi itu antara lain berkenaan anggaran hotel di Makkah, layanan katering dari sebelumnya 3 kali menjadi 2 kali, selisih kurs Dollar (USD) dari estimasi awal

Rp15.300 menjadi Rp15.150, efisiensi biaya sewa pesawat dari USD33.950 menjadi USD32.743.

Termasuk juga bersumber dari keberhasilan negosiasi biaya Masyair yang dilakukan oleh Kementerian Agama dari yang awalnya SAR5.656 menjadi SAR4.567, atau turun signifikan lebih dari SAR1.000. Ada juga penurunan living cost jemaah dari SAR1.500 menjadi SAR750.

Sehingga, dari proses diskusi dan pembahasan itu, jemaah haji tahun ini akan membayar biaya haji rata-rata Rp49,8 juta. Sementara, sebanyak 84.609 jemaah yang sudah melunasi biaya haji pada 2020 tidak perlu membayar tambahan pelunasan. Sebab, itu akan dibebankan pada nilai manfaat dengan kebutuhan anggaran berkisar Rp845 miliar.

Hasil kesepakatan ini selanjutnya akan diusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk diterbitkan Keputusan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Terkait penggunaan nilai manfaat, adik Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf ini mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk melakukan optimalisasi pengelolaan dana haji pada tahun-tahun mendatang. Langkah progresif BPKH sangat diperlukan untuk memastikan dana nilai manfaat yang juga menjadi hak lebih dari 5 juta jemaah haji yang masih mengantre bisa terus berkesinambungan dan bisa digunakan oleh mereka pada saat keberangkatannya.

Saat ini, kata Menag, kemampuan BPKH mengalokasikan nilai manfaat maksimal hanya Rp7,1 triliun. Beruntung, BPKH punya saldo Rp15 triliun hasil pengelolaan 2020 dan 2021 saat tidak ada penyelenggaraan ibadah haji. Pada 2022, saldo itu sudah digunakan untuk menutup pembayaran kenaikan biaya Masyair dan kekurangan lainnya hingga hampir Rp2 triliun. Tahun ini, saldo yang ada juga akan terambil hampir Rp2 triliun.

"Hal ini perlu menjadi perhatian bersama. BPKH harus lebih produktif. Jika skema defisit Rp2 triliun per tahun ini terus berjalan, saldo BPKH bisa habis dalam lima tahun ke depan. Inilah pentingnya mulai memperhatikan keberadi-

lan dan keberlanjutan nilai manfaat. Sebab, anggaran nilai manfaat juga hak jutaan jemaah yang masih antre," tegasnya.

Menag menambahkan, di banding tahun sebelumnya, proses pembahasan BPIH tahun ini bisa berlangsung lebih awal. Sehingga, baik Kemenag maupun Komisi VIII DPR memiliki cukup waktu untuk melakukan telaah atas usulan biaya yang disampaikan.

"Kami sampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR yang terus memberikan perhatian dan dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun," ungkapnya.

Banyak Lansia

Sementara itu, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

fisiknya untuk melakukan sejauh yang tadi kami sampaikan. Saya kira ini penting karena selama ini manasik yang disampaikan lebih kepada bacaan dan doa-doa ternyata ada yang juga penting, yakni kondisi fisik jemaah harus dipersiapkan se-prima mungkin," terangnya.

Arsad menambahkan, tahun ini diperkirakan ada sekitar 64 ribu jemaah lanjut usia (lansia) yang berangkat ke Tanah Suci setelah selama dua tahun Pemerintah Arab Saudi melakukan pembatasan usia jemaah. Maka dari itu, dia meminta kepada pemerintah provinsi untuk memfasilitasi terkait kesehatan jemaahnya.

"Maka ini menjadi penting bagi jemaah haji untuk menjaga kondisi fisiknya, menjaga kesehatannya, termasuk juga mungkin nanti kami mohon bantuan Pak Sekprov ataupun Pak Wali



(PHU) Kementerian Agama meminta jemaah haji tahun ini mempersiapkan kesehatan fisiknya menjelang berangkat ke Tanah Suci.

"Haji adalah ibadah fisik. Jemaah menjalani Mabit (bermalam) di Mina dan melontar Jumrah yang jaraknya kalau pulang pergi itu 14 kilometer dan itu dilakukan minimal 3 hari, maksimal itu 4 hari," kata Direktur Bina Haji Kemenag, Arsad Hidayat, saat meresmikan Asrama Haji Transit Kalimantan Utara di Tarakan, Kamis, 16 Februari 2023.

Arsad menilai, mempersiapkan kesehatan fisik sangat penting bagi jemaah, selain mempersiapkan manasik ibadahnya

"Maka bagi siapa saja yang akan menunaikan ibadah haji mulai melatih

Kota bisa membantu juga memfasilitasi yang terkait bagaimana supaya kesehatan jamaah haji juga bisa lebih baik dan lebih bagus menjelang keberangkatan ke Tanah Suci," ujarnya.

Klaim Keberhasilan

Ketua Panja BPIH Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, menegaskan, meski dilakukan efisiensi harga di berbagai bidang, pihaknya tetap meminta pemerintah melakukan layanan terbaiknya pada jemaah.

Marwan bahkan menyampaikan beberapa usulan dari Panja untuk pemerintah terkait peningkatan pelayanan ini di antaranya terkait pembinaan dan perlindungan terhadap jemaah haji sejak sebelum, pada saat, dan setelah

pelaksanaan ibadah haji.

"Melakukan revisi PMA mengenai rasionalisasi besaran setoran awal pendaftaran haji, menetapkan kebijakan rasionalisasi biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) sesuai dengan kondisi ekonomi secara berkala, mendorong jemaah haji untuk mencicil setoran lunas secara periodik hingga mendekati besaran Bipih pada tahun berjalan agar jemaah tidak terlalu berat pada saat pelunasan, dan mengintensifkan bimbingan manasik terhadap jemaah haji dan manasik khusus bagi jemaah haji lanjut usia dan penyandang disabilitas," ujar Marwan.

Anggota Komisi VIII DPR, Maman Imanulhaq, merasa puas dengan hasil keputusan Panja Haji yang akhirnya

nesia. Pasalnya, selama ini, lebih dari 200 ribu jemaah haji Indonesia mendapatkan makanan dari Thailand, Vietnam, Brasil, dan India.

Menurut Yandri, terobosan Kemenag yang bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dapat memberikan dampak positif bagi industri makanan dan kuliner Indonesia. Sehingga, UMKM maupun pengusaha Indonesia bisa ikut menikmati hasilnya.

Tidak hanya memberikan manfaat bagi pengusaha lokal, terobosan ini juga akan meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji. Dengan makanan katering yang diubah menjadi menu asli Indonesia, jemaah haji akan merasakan pengalaman kuliner yang lebih nikmat dan memuaskan selama

"Jika dicermati lebih seksama, keputusan di DPR sesungguhnya merupakan keputusan yang berorientasi jangka pendek semata dan bercampur muatan politis. Maklum di tahun politik seperti sekarang, di mana pemilu akan digelar tahun depan, tentu DPR tidak ingin popularitasnya anjlok dan kehilangan pamor di masyarakat," ujar Mustolih dalam siaran persnya, Kamis, 16 Februari 2023.

"Sehingga yang dikorbankan adalah kepentingan dari 5,2 juta jemaah haji tunggu yang masa antrenya bisa mencapai 60 tahun mendatang baru berangkat," sambungnya.

Menurut Mustolih, nilai manfaat yang seharusnya menjadi hak mereka diambil lebih dahulu untuk menambal/mensubsidi biaya jemaah haji pada tahun ini. Sehingga, seolah-olah biayanya murah dengan bantuan subsidi biaya berkisar Rp40.237.937 juta per jemaah.

Jika dibandingkan dengan jemaah haji tunggu yang jumlahnya 5,2 juta, mereka hanya diberikan imbal hasil rata-rata Rp2 triliun (20 persen) yang disalurkan melalui virtual account (VA). Jika di-breakdown, nilainya Rp350 ribu per jemaah per tahun.

"Kemenag dan BPKH tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali mengikuti kemauan DPR. Karena DPR punya senjata pamungkas, yakni Pasal 47 ayat 1 UU 8/2019, di mana BPIH harus mendapat persetujuan DPR," tegasnya.

Mustolih menilai, subsidi semacam ini sejatinya tidak memiliki landasan hukum. Sebab, jika merujuk pada UU 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (PKH), pengelolaan dana haji oleh BPKH harus menggunakan sistem syariah, yakni menggunakan akad wakalah. Sehingga, setoran pokok maupun hasil kelolaannya merupakan hak dari jemaah itu sendiri (shohibul maal).

Hal tersebut dipertegas melalui Pasal 13 PP 5/2018 tentang Pelaksanaan UU 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Hal ini dipertegas juga oleh Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI IV Tahun 2012 dan Fatwa DSN MUI Nomor 122/DSN-MUI/DSN/II/2018 tentang Pengelolaan Dana BPIH dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah.

Menurut Mustolih, subsidi dan tam- bal sulam seperti ini sesungguhnya



mampu menurunkan beberapa komponen biaya haji beserta komposisi persentase nilai manfaat dengan Bipih. Sehingga biaya haji yang dibebankan kepada calon jemaah bisa lebih terjangkau.

Maman menambahkan, keputusan ini merupakan bentuk keadilan bagi para calon jemaah haji lunas tunda yang harusnya berangkat ke Tanah Suci pada 2020 dan 2022, namun lantaran pandemi COVID-19 terpaksa keberangkatan haji harus diurungkan. Apalagi mereka pun punya hak lebih nilai manfaat dari rekening virtual jemaah haji sejak tahun pelunasan.

Wakil Ketua MPR, Yandri Susanto, mengapresiasi terobosan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam penyediaan menu katering bagi jemaah haji 2023 yang berasal dari produk dalam negeri dan bercita rasa masakan Indo-

menjalankan ibadah haji.

Jangan Dipolitisasi

Pengamat perhajian Indonesia dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Mustolih Siradj, menilai ada yang perlu diwaspadai pada BPIH 2023. Menurutnya, keputusan dalam rapat kerja Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR pada 15 Februari 2023 dinilai memang sedang berpihak kepada 203 ribu jemaah haji regular yang berangkat pada tahun ini. Sebab, dapat menekan biaya sedemikian rupa, sehingga pelunasan jemaah lebih kecil dari usulan Kemenag.

Bahkan, ada keputusan politik bahwa sekitar 84 ribu jemaah haji lunas tunda 2020 dibebaskan dari biaya pelunasan. Sementara, jemaah lunas tunda 1444 H/2022 M membayar Rp9,4 juta dan jemaah 2023 membayar Rp23,5 juta.

mengadopsi skema Ponzi (Ponzi Scream). Konsep ini digagas oleh Charles Ponzi, pebisnis asal Amerika Serikat, di mana jemaah haji yang lebih dahulu berangkat dibiayai dari uang jemaah yang masih menunggu antrean.

Jika melihat data dari BPKH sejak efektif dibentuk 2017, skema Ponzi memang tidak terhindarkan dengan rinciannya sebagai berikut:

1. Pada 2018, nilai manfaat yang diperoleh BPKH Rp5,7 triliun. Pembagian kepada jemaah haji tunggu Rp777,3 miliar, sedangkan subsidi kepada jemaah haji tahun berjalan menguras dana sebesar Rp6,54 triliun.

2. Pada 2019, nilai manfaat yang diperoleh BPKH Rp7,36 triliun. Pembagian kepada jemaah haji tunggu Rp1,08 triliun, sedangkan subsidi kepada jemaah haji tahun berjalan menggerus dana sebesar Rp6,81 triliun.

3. Pada 2020, nilai manfaat yang diperoleh BPKH Rp7,43 triliun. Pembagian kepada jemaah haji tunggu Rp2 triliun, sedangkan subsidi kepada jemaah haji tahun berjalan 0 karena tidak ada pemberangkatan haji akibat COVID-19.

4. Pada 2021, nilai manfaat yang diperoleh BPKH Rp10,52 triliun. Pembagian kepada jemaah haji tunggu Rp2,5 triliun, sedangkan subsidi kepada jemaah haji tahun berjalan 0 karena tidak ada pemberangkatan haji akibat COVID-19.

5. Pada 2022, nilai manfaat yang diperoleh BPKH Rp10,8 triliun. Pembagian kepada jemaah haji tunggu Rp2,06 triliun, sedangkan subsidi kepada jemaah haji tahun berjalan menggelontorkan dana Rp5,47 triliun. Padahal, kuota haji regular ketika itu hanya 92.825 orang dari total kuota resmi 100.051 yang diberikan Arab Saudi.

6. Sisa cadangan nilai manfaat di BPKH lebih kurang hanya ada Rp15 triliun

Mustolih menegaskan, dari skema itu, yang diuntungkan adalah jemaah haji yang lebih dahulu berangkat. Mereka yang puluhan tahun antre nasibnya terancam 'buntung' karena tidak mendapatkan subsidi karena dananya sudah dikuras dan terpakai lebih dahulu. Apalagi, ada bayang-bayang ancaman inflasi, krisis global, liberalisasi kebijakan haji dan kenaikan pajak di

Arab Saudi dan sebagainya.

Mustolih menambahkan, keberlangsungan nilai manfaat dana haji terancam habis, setidaknya hanya mampu bertahan sampai 2026 atau 2027. Hal ini sebagaimana yang disimulasikan BPKH dan dipaparkan di depan Komisi VIII DPR. Sebab, skema investasi yang didapat selama ini tidak bergerak, hanya di kisaran 6-7,5 persen per tahun.

rangkat. Pada akhirnya pimpinan travel tersebut dihukum masuk bui sampai puluhan tahun.

"Pengelolaan dana haji tidak boleh seperti itu," pesan Mustolih.

Mustolih menyatakan, konsep BPIH 70 persen biaya dipikul jemaah dan 30 persen pembiayaan dari nilai manfaat yang diusulkan Kemenag, harusnya yang digunakan DPR sebagai konsep



Ketua Panja BPIH Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang



Pengamat perhajian Indonesia Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Mustolih Siradj

"Tapi DPR justru tetap memilih melanggengkan dan mempertahankan skema Ponzi," jelasnya.

Mustolih mengingatkan, DPR dan para pemangku kebijakan seharusnya belajar pada praktik skema Ponzi yang pernah digunakan First Travel dan Abu Tour. Sistem subsidi antar jemaah itu tidak bisa bertahan lama dan membuat perusahaan itu ambruk. Akhirnya, mereka tumbang dan ratusan ribu jemaahnya menjerit karena gagal be-

yang ideal berimbang, berkeadilan dan proporsional untuk melindungi hak haji tunggu dan keberlanjutan dana haji.

Hal ini sebenarnya juga diakui oleh Ketua Panja Komisi VIII, sehingga dana haji memiliki nafas panjang. Sayangnya, Komisi VIII mengambil jalan pintas untuk menyenangkan jemaah haji yang berangkat. Padahal, di saat yang sama, kebijakan ini akan menjadi bom waktu yang dalam beberapa tahun ke depan. •



GERILYA PAN JARING SUARA JATENG

Partai Amanat Nasional (PAN) baru saja mengadakan Rapat Koordinasi Nasional di Semarang, 25-28 Februari 2023. Sejumlah keputusan pun dihasilkan, termasuk target Pemilu 2024 meraih 65 kursi di Senayan. Lantas, bagaimana strategi kemenangan tersebut?

Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto, menegaskan, target 65 kursi di Senayan tidak mengada-ada karena sudah dipertimbangkan secara detail, antara lain dengan mencermati jejak kursi yang pernah diperoleh partai berlambang matahari.

Menurut Yandri, saat ini, kursi PAN di DPR RI sebanyak 44 kursi. Tetapi banyak daerah pemilihan yang saat ini tidak ada wakil PAN, tetapi pada masa lalu ada wakil dari PAN, yang artinya ada jejak kursi yang diraih PAN.

Pada empat pemilu sebelum 2019,

PAN selalu menempati posisi lima besar di Senayan. Pada Pemilu 1999, PAN meraih suara 7,1 persen dengan 34 kursi; Pemilu 2004 meraih 6,4 persen suara dengan 53 kursi; Pemilu 2009 meraih 6,0 persen suara dengan 43 kursi; dan pemilu 2014 meraih 7,6 persen suara dengan 48 kursi.

Sementara, pada Pemilu 2019, PAN meraih 9,57 juta suara atau 6,8 persen dengan 44 kursi. Meski terjadi peningkatan jumlah suara, tapi secara persentase, PAN hanya menempati posisi 8 dari 9 fraksi di Senayan atau hanya unggul dari PPP.

"Kami berharap PAN akan kembali berjaya lagi dengan memenangkan

65 kursi di parlemen," tegas Yandri, Rabu, 1 Maret 2023.

Yandri menjelaskan, dalam empat edisi pemilu sebelum 2019, Jawa Tengah selalu menyumbang 8 kursi bagi PAN di Senayan. Namun, untuk Pemilu 2019, hasilnya adalah nol alias tak ada kursi sama sekali yang dimenangkan.

Maka, untuk merebut kembali kursi yang hilang itu, Yandri menyebutkan bahwa Ketua Umum PAN, Zulkifi Hasan, akan turun gunung. Zulhas akan pindah daerah pemilihan dari Dapil I Lampung ke Dapil I Jawa Tengah yang meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kendal, dan

Salatiga.

"Ketua Umum akan memimpin pertarungan di Jawa Tengah. Ada juga caleg mantan kapolda, purnawirawan, artis, dan lainnya. Kami akan mengembalikan 8 jumlah kursi PAN DPR RI," ucap Yandri.

Politisi PAN, Guspardi Gaus, bahkan menyebutkan, dalam rangka membirukan Jateng, PAN siap berkolaborasi dengan Nahdlatul Ulama (NU), meski selama ini PAN memang lebih identik dengan Muhammadiyah ketimbang NU.

Akan tetapi, menurut Guspardi, kerja sama ini dapat meningkatkan basis massa PAN di Jawa Tengah. Terlebih, Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, telah merestui para kadernya untuk memilih PAN dengan menyebut bahwa warga NU tidak haram pilih PAN.

"Dampak (ucapan Ketum PBNU) sangat positif bagi PAN karena Jawa Tengah basisnya Nahdliyin selain Jawa Timur," kata Guspari.

Endorse Ganjar Pranowo

Pada Rakornas di Semarang, akhir Februari lalu, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, menyiratkan pesan mendukung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Dalam sambutan pada acara yang dihadiri Presiden Joko Widodo itu, Zulhas mengapresiasi kehadiran Ganjar Pranowo.

"Terima kasih Pak Ganjar, rambutnya sudah memutih secara alami dan ada kerutan di wajah. Itu seperti tanda-tanda yang diungkap Pak Presiden, itu karena beliau bekerja keras untuk rakyat agar rakyat bisa makmur dan sejahtera," ujar Zulhas.

Selain itu, di akhir sambutannya, Zulhas juga menyampaikan pantun yang berisi pujian untuk Ganjar Pranowo dan Menteri BUMN, Erick Thohir, yang membuat suasana semakin ger-geran.

"Pak Jokowi, saya punya pantun. Jalan-jalan ke Simpang Lima. Jangan lupa beli lunpia. Kalau Ganjar dan Erick sudah bersama. Insya Allah Indonesia tambah jaya," kata Zulkifli disambut riuh tepuk tangan seluruh kader PAN.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan dalam Rakornas Pemenangan Pemilu 2024 PAN mengaku jika dirinya sempat bertanya-tanya mengenai alasan PAN memilih Jawa Tengah, sebagai lokasi digelarnya rakornas. Jokowi menduga hal tersebut adalah strategi PAN untuk mendekati Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

"Jawabannya saya sudah punya sekarang, jawabannya sudah punya. Strateginya, oh ini strategi, sudah,

Kristiyanto, menyatakan, dukungan PAN kepada Ganjar Pranowo menjadi calon presiden merupakan pergeseran demokrasi substansial ke demokrasi elektoral dan bertujuan mendongkrak elektoral partai.

"Banyak motif mencalonkan seseorang dalam demokrasi elektoral, itu ada motif untuk mendongkrak elektoral partai tersebut, ada motif sebagai jalan pintas karena tidak melakukan kaderisasi di internal partai," kata Hasto di Gedung Sekolah Partai PDIP,



mendekati pak Ganjar. Mendekati bupati wali kota dialihkan semuanya," kata Jokowi.

Jokowi menilai strategi dilakukan PAN ini sudah benar. Menurutnya, Jawa Tengah adalah basis suara pendukung Ganjar Pranowo.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto

Jakarta Selatan, Kamis, 2 Maret 2023.

Menurut Hasto, bagi PDIP, pencalonan kader partai lain sebagai calon presiden menyentuh etika politik. "Yang penting kita belajar bahwa pelembagaan partai itu sangat penting dan merupakan pilihan yang paling rasional, paling baik di dalam

mendidik kader dari internal partai,” ujar Hasto.

Ketika disinggung mengenai ada atau tidaknya komunikasi yang dilakukan oleh PAN kepada PDIP terkait dukungan kepada Ganjar Pranowo untuk menjadi calon presiden, Hasto mengatakan bahwa belum ada komunikasi mengenai pencalonan presiden dan wakil presiden di antara PDIP dengan PAN.

Menurut pendiri lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, PAN sengaja memilih Ganjar Pranowo karena ada maksud lain, yakni terkait suara Jawa Tengah. Sehingga, PAN men-

kondisi serupa di Pemilu 2024.

“Ya, PAN memang dituntut untuk berjuang lebih keras agar bisa mengembalikan perolehan kursi DPR yang pernah didapatkan di Jawa Tengah seperti dalam pemilu sebelumnya,” kata Surokim kepada Info Indonesia, Rabu, 8 Maret 2023.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura (UTM) ini menilai, tidak adanya kursi di Jawa Tengah yang berhasil diraih PAN merupakan suatu peristiwa aneh.

Hal itu layaknya pukulan telak bagi PAN. Maka, dalam pandangan Surok-

nya peluang untuk merebut kembali kursinya yang hilang dan menjadikan Jawa Tengah sebagai wilayah yang harus direbut kembali,” ujar Surokim.

Analisis Politik dari Universitas Andalas (Unand), Asrinaldi, menyebut, gerilya politik yang dilakukan PAN di Jawa Tengah untuk menunjukkan eksistensi partai di wilayah yang menjadi basis pendukung PDIP.

“Apa yang dilakukan PAN jelas ingin menunjukkan eksistensinya, sekaligus mencari dukungan masyarakat di daerah yang biasa dikuasai PDIP,” ujar Asrinaldi kepada Info Indonesia, Kamis, 9 Maret 2023.

Asrinaldi menyebutkan, dengan mengambil keuntungan atas kemajuan teknologi informasi seperti sekarang, PAN dapat dengan mudah menyebarluaskan program-program partainya, sehingga mampu menjangkau dukungan masyarakat Jawa Tengah yang non-PDIP.

“Dengan kemudahan informasi hari ini, apa yang dilakukan PAN ini tentu menjadikan partainya sebagai alternatif pilihan bagi masyarakat Jawa Tengah. Karena tidak semua masyarakat Jawa Tengah yang ke PDIP pilihannya. Jadi, PAN masuk ke segmen mereka yang berkategori swing voters,” jelasnya.

Kendati begitu, Asrinaldi menilai, PAN tetap berpeluang untuk meraih suara di Jawa Tengah walaupun tidak sebanyak suara PDIP. Maka, Asrinaldi melihat, sosok Ganjar Pranowo bisa menjadi andalan PAN guna mendongkrak perolehan suara pemilih di Jawa Tengah.

“Tentu akan lebih baik figur Ganjar Pranowo dijadikan vote getter, kalau memang tidak didukung oleh PDIP, dan ini cukup signifikan menambah suara PAN di Jawa Tengah,” paparnya.

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, melihat bahwa penyumbang suara terbesar dalam Pemilu memang masih tersebar luas di wilayah Jawa, terutama Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah.

Adib menganggap, yang coba diusahakan oleh PAN guna meraih suara dalam Pemilu 2024 merupakan hal



Direktur Eksekutif SSC, Surokim Abdussalam

gendorse Ganjar Pranowo di basis massanya di Jawa Tengah.

PAN berharap dengan mengendorse Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024, bisa meraup banyak suara di Jawa Tengah. “Kemarin itu, 2019, PAN nol kursi. Dia (PAN) pasti mengharapkan akan mendapatkan kursi di Jawa Tengah dengan mengendorse Ganjar,” kata Hendri Satrio.

Analisis politik dari Surabaya Survey Center (SSC), Surokim Abdussalam, menilai, PAN masih berpeluang untuk bisa meraih suara pemilih di Jawa Tengah. Namun, untuk meraih suara pemilih di Jawa Tengah, PAN harus mengeluarkan strategi politik baru.

Menurut Surokim, perolehan kursi legislatif sempat terlepas dari PAN pada 2019 di Jawa Tengah, kini harus menjadi pemicu semangat kader di internal partai untuk tidak mendulang

im, dengan menggelar Rapat Kerja Nasional di Semarang, akhir Februari lalu, itu adalah suatu hal yang tepat yang dilakukan PAN demi memikat suara pemilih di Jawa Tengah.

“Strategi menggarap (pemilih) Jawa Tengah dengan serius ini saya pikir sudah tepat dan sangat strategis bagi PAN agar kembali bisa mendapat kepercayaan, kembali mendapat kursi di wilayah dengan jumlah pemilih terbesar ke-3 di Jawa,” paparnya.

Keputusan PAN merapat ke Ganjar Pranowo juga dianggap sebagai satu keputusan yang bisa menjadikan PAN mampu meraih lumbung suara pemilih di Jawa Tengah.

“Memang perlu shortcut dengan strategi menggandeng tokoh lokal, seperti Mas Ganjar Pranowo untuk menarik perhatian pemilih Jawa Tengah. PAN menurut saya masih pu-

realistis dengan berusaha membidik suara pemilih di Jawa Tengah.

"Tidak berlebihan kalau memang PAN itu berusaha membidik Jawa Tengah. Makanya kalau bicara soal politik kan realistis, mana lumbung suara yang perlu diserang? Bahkan banyak yang mengatakan kalau suara Jawa diraih secara maksimal, bisa menguasai pertarungan pilpres bahkan legislatif," ujar Adib kepada Info Indonesia, Senin, 6 Maret 2023.

Adib menyebutkan, jika PAN juga memperoleh suara di DKI Jakarta dan Banten saja sudah mampu mengumpulkan puluhan juta suara pemilih. Akan tetapi, hal tersebut juga harus disertai dengan strategi pengusungan calon yang tepat.

"Ketika ingin menaklukkan lumbung suara, saya kira strategi yang harus dilakukan apa? Ya jual siapa yang lagi populer di daerah itu. Makanya tepat kalau saya pikir PAN harus menjual Ganjar Pranowo," ungkap Adib.

Oleh karena itu, Adib menilai, apa yang dilakukan PAN saat ini merupakan langkah yang umum dilakukan setiap Parpol peserta Pemilu 2024. Hal tersebut sebagai metode yang mampu menaikkan elektoral PAN di Pemilu 2024.

"Saya kira juga apa yang dilakukan oleh PAN tidak jauh berbeda dengan partai yang lain, berusaha menaklukkan inti sumber suara itu berada. Makanya saya kira wajar dan memang harus dibidik oleh PAN untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas," terangnya.

Masih Dipertimbangkan

Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, mengatakan usulan kader di Jawa Tengah yang menginginkan Ganjar Pranowo sebagai Capres diterima dengan baik oleh DPP PAN. Hal itu sebagai bentuk penerimaan aspirasi oleh pengurus pusat terhadap kader-kadernya di daerah untuk ikut serta dalam kontestasi Pilpres 2024.

"PAN Jawa Tengah mengusulkan Mas Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024. DPP PAN menerima dengan senang hati karena itu aspirasi kader PAN di Jawa Tengah," ujar Yoga saat

diwawancara Info Indonesia di Jakarta, Rabu, 8 Maret 2023.

Atas keinginan tersebut, Yoga menjelaskan, nantinya proposal pengusungan Ganjar Pranowo sebagai Capres dari PAN akan ditetapkan terlebih dahulu oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, sebelum diajukan ke Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

PAN tidak ingin secara individual menetapkan siapa pasangan calon yang nantinya dijagokan dalam kontestasi Pilpres 2024. PAN ingin membuka ruang diskusi terlebih dahulu dengan partai politik lain yang tergabung dalam KIB.

"PAN akan memutuskan paslon bersama Golkar dan PPP. Tidak mungkin sendirian karena PAN bergabung di KIB. Nanti kita lihat perkembangannya," ungkap Yoga.

Yoga mengungkapkan, pasca kehilangan kursi DPR di Jawa Tengah pada Pemilu 2019, kini kader partai berlambang matahari telah bangkit untuk kembali memperoleh kursi di Senayan serta menambah jumlah kursi di DPRD.

"PAN di Pemi-

lu 2019 kehilangan 8 kursi DPR di Jawa Tengah. Itu tsunami politik bagi PAN. Kader PAN Jawa Tengah mulai bangkit dan optimis untuk mengembalikan lagi 8 kursi DPR dan menambah kursi di daerah," ungkapnya.

Untuk itu, Yoga menerangkan, PAN saat ini tengah melakukan berbagai persiapan guna penguatan dari sisi internal partai, baik yang nantinya akan duduk di Senayan hingga tingkat DPRD.

"Saat ini, PAN Jateng melakukan konsolidasi organisasi, menyusun struktur kepengurusan sampai tingkat desa, serta menyusun calon legislatif un-

tuk tingkat DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota," papar Yoga.

Yoga menambahkan, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, juga telah memberi instruksi agar kadernya memperjuangkan aspirasi rakyat, terutama yang sampai saat ini belum terpenuhi oleh pemerintah pusat.

Menurutnya, hal tersebut dapat segera direalisasikan dengan memasifkan program-program PAN yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya yang berada di garis ekonomi menengah ke bawah.

"Oleh ketua umum PAN, Zulkifli Hasan agar kader PAN, terutama di legislatif untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dan membuat program-program yang dibutuhkan rakyat. Semoga saja PAN dapat memberi manfaat buat masyarakat Jawa Tengah," tuturnya. •



Wakil Ketua Umum PAN,
Yandri Susanto



TRANSFORMASI PSSI DI TANGAN ERICK THOHIR

PSSI bisa apa? Pertanyaan itu kerap menjadi sindiran masyarakat Indonesia melihat prestasi sepak bola yang tak kunjung membaik, bahkan menunjukkan kemunduran. Pertanyaan itu kini jadi tugas Erick Thohir untuk menjawabnya dengan memperbaiki prestasi sepak bola dari hulu hingga hilirnya.

Erick Thohir, sang Menteri BUMN, sesuai harapan banyak pencinta sepak bola nasional, akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023-2027 dalam Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Shangri-La, Jakarta, 16 Februari 2023.

Mendapatkan 64 suara saat KLB, Erick Thohir unggul telak atas lawan terkuatnya Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti, yang hanya didukung oleh 22 suara voters.

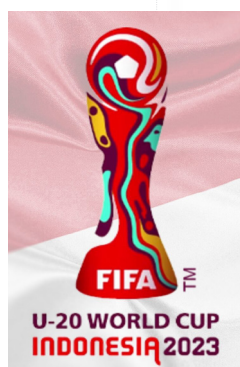
Erick Thohir akan didampingi dua Wakil Ketua Umum PSSI hingga empat tahun ke depan yang pemilihannya diwarnai aksi

protes dan penuh drama.

Pada pemilihan pertama, Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali, memperoleh suara terbanyak, yakni 66 suara. Sementara, Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, meraih 63 suara, dan Ratu Tisha Destria meraih 41 suara. Namun, pemilihan Wakil Ketua Umum PSSI dianulir karena dianggap ada kecurangan dan sepakat untuk diulang.

Pada pemilihan ulang, Ratu Tisha Destria berbalik meraih suara terbanyak dengan dukungan 54 voters. Lalu, Yunus Nusi meraih suara terbanyak kedua dengan 53 suara dan Zainudin Amali hanya 44 suara. Namun,

Yunus Nusi kemudian menyatakan mundur sebagai Wakil Ketua Umum



PSSI dan digantikan Zainudin Amali.

Selain itu, Erick Thohir juga akan bekerja sama dengan 12 Komite Eksekutif (Exco) PSSI, yakni Eko Setiawan, Endri Erawan, Juni Rahman, Muhammad, Rudi Yulianto, Sumardji, Vivin Cahyani, Pieter Tanuri, Arya Mahendra, Khairul Anwar, Ahmad Riyadh, dan Hasnuryadi Sulaiman.

Usai diumumkan sebagai Ketua Umum PSSI, Erick pun langsung mengunggah foto di akun Instagramnya. Ia juga berterima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan pemegang suara.

"Insya Allah sama-sama kita benahi sepak bola Indonesia," kata Erick.

Bagi Erick, belum ada kemenangan apapun dengan terpilihnya menjadi Ketua Umum PSSI karena persepakbolaan Indonesia masih membutuhkan kerja keras dan kerja sama semua pihak.

Erick menyebutkan, meraih kemenangan merupakan perjalanan yang terjal. Kemenangan menurutnya adalah ketika suporter sepak bola bisa pergi menikmati tim kesayangannya, tanpa harus merasa ketakutan. Kemenangan ini juga berarti ketika Indonesia mampu mencetak jago-jago muda terbaik yang membawa Indonesia bersaing di level internasional.

"Kemenangan juga adalah ketika kita bisa melihat senyum setiap warga negara Indonesia saat melihat Tim Nasional sukses membawa pulang piala. Arti kemenangan, untuk saya, bukanlah menduduki jabatan ketua umum PSSI," ujar mantan Presiden Inter Milan ini.

Usai KLB, Erick Thohir dan para pengurus baru PSSI menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi memberikan dukungan untuk transformasi sepak bola Tanah Air.

Menurut Erick, Presiden Jokowi akan mendukung perubahan sepak bola Indonesia. Beberapa yang akan dilakukan pemerintah antara lain membangun training center (TC) untuk Tim Nasional serta lapangan.

Erick Thohir mengatakan masuknya dia ke induk olahraga sepak bola nasional itu bukan bentuk intervensi pemerintah. Dirinya dan para pengurus lain merupakan para pencinta sepak bola sehingga tertarik membenahi PSSI. Dia juga menyatakan diri bukan orang baru

yang berkecimpung dalam olahraga ini.

"Kami mau bekerja sama, bukan intervensi. Kalau intervensi itu memaksa," kata Erick saat konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 20 Februari 2023.

Dia juga mengatakan jika pemerintah mengintervensi PSSI, maka akan ada ancaman pembekuan oleh FIFA. Namun menurutnya, Presiden FIFA, Gianni Infantino, malah memberikan surat yang menyatakan dukungannya memimpin PSSI.

Dalam dua pekan berikutnya setelah dilantik sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir melakukan sejumlah pertemuan dengan berbagai pihak dalam sepak bola nasional, mulai dari wasit, suporter, hingga klub-klub peserta liga Indonesia.

Menpora Pilih PSSI

Menteri Pemuda dan Olahraga, Zai-

nudin Amali, yang terpilih sebagai Wakil Ketua Umum I PSSI memutuskan untuk fokus mengurus sepak bola dan menanggalkan jabatan yang sudah diembannya sejak 2019.

Zainudin Amali mengaku Presiden Joko Widodo telah mengizinkan dirinya fokus dan konsentrasi mengurus sepak bola nasional setelah terpilih sebagai Wakil Ketua Umum I PSSI.

"Itu dipahami beliau dan beliau menyampaikan kepada saya, saya diizinkan fokus pada sepak bola mendampingi Pak Erick Thohir (Ketum PSSI)," kata Zainudin Amali, 20 Februari 2023.

Zainudin Amali pun akhir mengantarkan surat pengunduran diri secara resmi sebagai Menpora kepada Menteri Sekretariat Negara, Pratikno, Kamis, 9 Maret 2023.

"Dan tentu itu masih berupa surat. Memang saya harus ketemu Bapak



Presiden, beliau sekarang tidak ada (di Istana) maka kemungkinan saya dijadwalkan hari Senin (13/2/2023) akan bertemu dengan Pak Presiden,” ungkap Zainudin Amali.

“Kan teman-teman menanyakan kapan akan mengantarkan suratnya, hari ini tanggal 9 (Maret), hari Kamis, saya sudah antarkan. Tinggal tunggu saja, kan keputusannya ada di Bapak Presiden, bukan di saya,” sambungnya.

Zainudin Amali, kembali mengungkapkan alasannya mengundurkan diri adalah demi mengurus sepak bola. Menurutnya, tidak etis baginya sebagai Menpora yang mengurus semua cabang olahraga, hanya berfokus pada satu cabang.

Zainudin Amali juga mengaku punya tugas besar lainnya, yaitu melaksanakan

petinggi klub, baik yang berkompetisi di Liga 1 maupun Liga 2 yang berlokasi di salah satu hotel di pusat Kota Surabaya, 4 Maret 2023.

Wakil Ketua Umum PSSI, Ratu Tisha Destria, menyampaikan hasil kesepakatan pertama dari sarasehan itu ialah memberikan slot waktu yang eksklusif bagi klub Liga 1 dan Liga 2. Jadwal Liga 1 akan dimulai pada Juli 2023 dan berakhir pada April 2024. Sedangkan, Liga 2 dimulai pada November 2023 dan berakhir Juni 2024.

Dengan demikian, bisa dipastikan dari jadwal tersebut, masyarakat Indonesia dapat menikmati pertandingan sepak bola selama satu tahun penuh. Selain bisa menjadi hiburan bagi penikmat bola, hal itu juga diklaim akan berdampak bagus bagi kesejahteraan klub

klub. Dengan begitu pertandingan akan berjalan dalam tiga putaran, dengan total 271 pertandingan.

Pada putaran pertama akan menggunakan sistem “double round robin” atau kompetisi penuh kandang-tandang dengan total 90 pertandingan. Artinya, setiap klub akan bertanding sebanyak 10 kali pada putaran pertama.

Kemudian, pada putaran kedua akan menerapkan format “single round robin” dan akan mempertemukan klub-klub yang berbeda grup pada putaran pertama. Total, pada putaran ini ada 108 laga, dan masing-masing klub akan menjalani 12 pertandingan.

Selanjutnya, pada putaran ketiga akan diambil klub yang masuk delapan besar dan masuk kategori 10 kecil. Bagi klub-klub yang masuk babak delapan besar, akan dibagi lagi dalam beberapa tahap, hingga nanti akan mendapatkan siapa yang menjadi juara Liga 1.

Dimulai dari fase grup, yang akan dibagi dari delapan menjadi dua grup. Pada fase ini kembali menerapkan sistem “double round robin” di setiap grup. Dengan begitu setiap klub bermain enam kali pertandingan.

Nantinya, dari hasil fase grup itu, akan dipertemukan lagi untuk menentukan posisi delapan hingga satu. Peringkat terakhir dari masing-masing grup akan saling bertemu dalam dua leg untuk menentukan siapa yang akan menempati posisi tujuh dan delapan.

Begitu juga peringkat ketiga dari masing-masing grup akan dipertemukan dalam dua leg untuk mendapatkan siapa yang menempati posisi lima dan enam. Hal sama juga diterapkan untuk posisi kedua grup, yang bakal diadu dalam dua leg untuk menentukan siapa yang berhak menempati posisi ketiga.

Dengan begitu, untuk posisi pertama masing-masing grup, bakal saling berhadapan juga dalam dua leg untuk menentukan siapa yang menjadi juara.

Terkait klub-klub yang masuk kelompok 10 kecil, akan diterapkan format satu grup dengan sistem “single round robin”. Artinya setiap klub bertemu satu kali. Dengan demikian, masing-masing klub akan menjalani sembilan pertandingan. Kemudian nantinya, tiga tim terbawah pada fase ini terdegradasi ke Liga 2 pada musim 2024-2025.



Inpres 3/2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional.

“Yang sekarang sedang dalam proses disempurnakan, yaitu tentang percepatan pembangunan sepak bola nasional jadi masih tetap di lingkungan olahraga, tapi fokus ke salah satu cabang olahraga,” ungkap Amali.

Sarasehan Sepak Bola

Berbekal memahami keruwetan sepak bola Indonesia, Erick menggagas sarasehan sepak bola yang bisa dikatakan menjadi wadah klub-klub untuk berdiskusi dan menyepakati hal-hal krusial apa yang menjadi penghambat kemajuan industri bola.

Ruang diskusi itu akhirnya menjadi ajang curahan hati (curhat) bagi para

serta pemain.

Hasil kesepakatan kedua, mengenai perizinan yang terpusat dari kepolisian untuk menyelenggarakan pertandingan. Dengan begitu, segala hal izin pertandingan akan diurus secara terpusat yang nantinya akan diturunkan oleh Polri hingga tingkat bawah.

Selain jadwal dan perizinan, ada pula perubahan nama kompetisi yang akan digelar pada musim 2023/2024, yakni Liga 1 akan berubah menjadi Liga Indonesia, sedangkan Liga 2 diubah menjadi Liga Nusantara.

Sementara, format kompetisi baru ada dua opsi yang ditawarkan PSSI kepada para petinggi klub. Opsi pertama, Liga Indonesia (Liga 1) akan dibagi dalam tiga grup, yang masing-masing dihuni enam

Sedangkan opsi yang kedua, PSSI membaginya dalam babak reguler dan final series.

Untuk babak reguler, 18 klub bakal bermain dengan sistem "double round robin" alias kandang-tandang. Totalnya ada 306 pertandingan dalam 34 pekan. Rencananya fase ini akan digelar pada 14 Juli 2023 hingga 3 April 2024. Nantinya, empat tim teratas pada fase ini akan melaju ke babak final series, sedangkan peringkat tiga terbawah akan terdegradasi ke Liga Nusantara (Liga 2) pada musim 2024-2025.

Pada final series, akan menerapkan sistem "knock-out" (gugur) dengan satu pertandingan. Peringkat pertama akan berhadapan dengan posisi keempat, sedangkan posisi kedua bakal melawan posisi ketiga pada fase ini. Peringkat pertama dan kedua berhak menjadi tuan rumah untuk babak ini.

Pemenangnya, akan melaju ke partai final yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Periode ini rencananya akan digelar pada 20-27 April 2024.

Erick Thohir berharap Sarasehan Sepak Bola menjadi awal transformasi Liga Indonesia.

"Kita ingin memastikan sepak bola kita bertransformasi menjadi lebih bersih dan berprestasi. Tidak mungkin kita punya timnas yang kuat kalau liganya tidak kuat," kata Erick Thohir.

Erick mengaku merasa keberatan jika liga Indonesia berada di posisi bawah.

"Sebagai kekuatan ekonomi di Asia Tenggara, saya sangat merasa keberatan ketika kita dibilang liga yang tidak bagus di Asia Tenggara dan berada di posisi bawah. Tetangga kita Thailand di klaim nomor satu, kenapa kita enggak," ujarnya.

Oleh karena itu, pembenahan secara menyeluruh harus dijalankan, tidak hanya di klubnya dan kompetisinya, tapi juga dengan suporternya.

Sebab itu, pihaknya mengimbau agar semua pihak harus berani membongkar dan punya nyali kalau mau membuat sepak bola Indonesia nomor satu.

"Harus, tapi tidak bisa hanya saya. Kalau hanya saya pun pesimistis. Pemerintah, PSSI, dan FIFA bersatu harus jadi bagian penting harus bersama-sama, tapi

kalau hari ini saya merasakan getaran bersatu saya optimistis," ujarnya.

Misalnya, menurut dia, bentuk keberanian itu jangan sampai sebelum peluit berbunyi kita sudah tahu skornya. "Kemudian, terkait jam tanding jangan terlalu malam, yang akan membuat para suporter sulit pulang ke rumah, sehingga ada tingkat kriminalitas di jalanan. Ini yang harus jadi bagian penting kita harus memberi solusi pada mereka," katanya.

Begitu juga terkait kepastian jadwal, pemilik klub juga tidak boleh didiamkan jalan sendiri tanpa kepastian jadwal.

"Bapak Presiden Jokowi mengatakan bahwa yang namanya izin pertandingan harus dikeluarkan. Karena itu kita mengusulkan untuk liga ke depan ini jadwalnya," ucapnya.

Kalau liga sekarang, menurut dia, di-

11 Juni 2023.

Erick mengatakan, Timnas Indonesia memiliki peluang untuk lolos penyisihan grup sepanjang seluruh pemain dan pelatih memiliki keyakinan untuk lolos.

"Saya harap suporter Indonesia dapat menjadi napas tambahan. 2X45 menit dengan skala level yang lebih tinggi mendukung penuh prestasi kita, bukan mencemooh, pada saat tersungkur," kata Erick Thohir.

Erick Thohir diketahui akan memimpin panitia pelaksana lokal (LOC) Piala Dunia U-20 demi memotong jalur birokrasi agar persiapan turnamen bergengsi itu lebih efektif.

Menurutnya, dengan menjadi pemimpin LOC, diharapkan kerja sama dengan Indonesia FIFA U-20 World Cup Organizing Committee (INAFOC) akan



rinya belum bisa berbuat banyak karena masih bagian dari kepengurusan kemarin. "Tapi besok harus diperbaiki, ini mengapa jadwal itu harus konkret, kita juga harus punya jadwal tanding timnas," kata Erick.

"Tetapi, jangan saya yang tentukan, klub yang menentukan saya hanya beri proposal mereka yang menentukan," ucapnya.

Momentum Piala Dunia U-20

Erick Thohir mengatakan Piala Dunia U-20 yang digelar di Indonesia bisa menjadi momen kebangkitan sepak bola nasional. PSSI menargetkan peningkatan prestasi Timnas Indonesia U-20 dan kesuksesan penyelenggaraan Piala Dunia U-20 yang akan bergulir 25 Mei hingga

terus erat. Hal tersebut penting karena Indonesia tidak ingin dicap gagal sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.

"Piala Dunia U-20 adalah saat kita menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik, yang sukses menyelenggarakan kompetisi dengan kualitas terbaik. Tidak boleh gagal," tutur Erick.

Selain itu, dengan mengetuai LOC, Erick yakin dapat membantu transparansi soal anggaran kegiatan. "Supaya kita semua tertib, mana budget pemerintah dan budget sponsor, baik yang berasal dari sponsor FIFA maupun sponsor lokal. Tidak boleh tercampur. Hanya saja, soal opening dan closing ceremony, kami menyerahkannya ke INAFOC," kata Erick. ●



TREN PARIWISATA INDONESIA 2023 DIPREDIKSI BAKAL POPULER

Setelah pandemi Covid-19, kelihatannya keinginan masyarakat untuk pergi berlibur semakin tinggi.

Meskipun banyak prediksi bahwa akan terjadi resesi pada tahun 2023, namun minat wisata di Indonesia tetap besar. Banyak tren pariwisata di Indonesia yang diprediksi akan semakin berkembang pada tahun 2023.

Pada tahun 2023, tren pariwisata di Indonesia diperkirakan akan tumbuh lebih pesat dibandingkan dengan tahun 2022.

Hal ini terjadi karena pemerintah berusaha untuk memulihkan industri

pariwisata yang terdampak akibat pandemi. Bahkan, Menparekraf, Sandiaga Uno, mengatakan bahwa akan ada tren-tren terbaru yang lebih beragam.

Berikut ini daftar tren pariwisata Indonesia 2023, kamu suka yang mana?

1. Culture Immersion

Pada tahun 2022, popularitas culture immersion di Indonesia mulai meningkat. Puluhan desa wisata dikembangkan untuk menawarkan pengalaman wisatawan untuk berinteraksi langsung dengan penduduk setempat dan mempelajari budaya mereka.

Culture immersion adalah jenis liburan di mana wisatawan mengunjungi tempat yang sangat berbeda dari tempat tinggal mereka untuk mempelajari budaya masyarakat

setempat. Konsep ini dipercaya dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat lokal.

Wisatawan dapat mengunjungi desa wisata yang telah dikembangkan sebagai tempat wisata dan menginap di sana selama dua atau tiga hari. Selanjutnya, mereka dapat mengikuti aktivitas warga lokal.

Gaya wisata ini menawarkan pengalaman yang baru dan dapat memberikan pengetahuan yang berharga.

Beberapa rekomendasi desa wisata yang dapat dikunjungi adalah Desa Pujon di Malang, Desa Kete Kesu di Toraja, Desa Penglipuran di Bali, dan Desa Nglanggeran di Yogyakarta. Setiap desa wisata menawarkan pengalaman yang berbeda, termasuk pemandangan alam, budaya, dan kerajinan lokal yang menarik.

Dengan banyaknya pilihan desa wisata dan paket perjalanan yang tersedia, culture immersion diprediksi akan menjadi tren populer di Indonesia.

Liburan semacam ini tidak hanya memberikan manfaat bagi wisatawan, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat lokal.

2. Wellness Tourism

Pada tahun 2022, tren wellness tourism telah menjadi topik yang banyak dibahas di media sosial. Wellness tourism adalah jenis wisata yang bertujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan pribadi, baik dari segi fisik, mental, spiritual, maupun lingkungan.

Destinasi wellness tourism umumnya terletak di tempat yang kaya akan budaya lokal dan keindahan alam, yang dapat memperdalam pengala-





• INFO WISATA

man spiritual para wisatawan. Bali, Indonesia, adalah salah satu tempat yang populer untuk melakukan wellness tourism, dengan banyaknya resor dan pusat meditasi yang menawarkan pengalaman kesehatan dan relaksasi.

Pemerintah Indonesia juga merencanakan kota-kota seperti Yogyakarta dan Solo untuk menjadi destinasi wellness tourism di masa depan.

Wisata wellness tourism ini menawarkan alternatif yang bermanfaat bagi mereka yang ingin berlibur sambil

merawat kesehatan fisik dan mental mereka. Tidak hanya menikmati atraksi wisata atau makanan lokal, namun juga dapat memberikan pengalaman positif bagi kesehatan yang dapat membantu mengatasi kelelahan dari rutinitas sehari-hari.

Jadi, jika Anda merasa lelah dengan pekerjaan sehari-hari, cobalah untuk melakukan wellness tourism agar dapat kembali segar dan siap menghadapi kehidupan di tengah hiruk-pikuk perkotaan.

3. Work from Destination

Sejak wabah Covid-19 melanda dunia, banyak aspek kehidupan masyarakat yang mengalami perubahan. Tak hanya pola hidup di rumah, kebiasaan bekerja juga mengalami transformasi signifikan.

Ketika pandemi merebak, hampir semua aktivitas masyarakat termasuk bekerja, direkomendasikan untuk dilakukan dari rumah dengan istilah work from home (WFH). Meskipun saat ini kehidupan telah kembali normal,



gaya bekerja WFH masih banyak digemari.

Tidak hanya itu, saat ini telah muncul tren baru yaitu work from destination.

Mayoritas pekerja jarak jauh yang bekerja dari tempat-tempat wisata berasal dari industri kreatif dan IT. Sebenarnya, tren ini telah digemari beberapa tahun belakangan ini dan bukanlah hal baru.

Salah satu tempat yang populer untuk bekerja dari destinasi adalah

Pulau Bali.

Bahkan, pada bulan Januari 2021, Sandiaga Uno menyatakan bahwa work from destination akan dikembangkan di Indonesia untuk beberapa tahun ke depan.

Keberadaan digital nomad, sebutan untuk pekerja work from destination, diklaim dapat membantu perekonomian daerah karena mereka dapat bekerja dari berbagai tempat. Dengan begitu, diharapkan para pengelola wisata dapat menyediakan fasilitas untuk para digital nomad.

Jika Anda tertarik mengikuti tren work from destination, tak perlu khawatir. Saat ini sudah banyak kafe yang menyediakan fasilitas kantor lengkap. Sehingga, Anda masih dapat menikmati liburan sambil tetap bekerja.

4. Off Grid Travel

Salah satu tren wisata yang diprediksi akan populer di tahun 2023 adalah off grid travel. Gaya wisata ini menawarkan pengalaman

sendiri adalah perjalanan wisata yang diambil di luar jalur wisata biasa dengan tujuan mencapai tempat wisata yang baru.

Tren ini menawarkan pengalaman baru bagi para wisatawan untuk membersihkan pikiran dan melepaskan penat dengan menikmati alam tanpa perlu khawatir dengan kondisi alam bebas.

Banyak orang menyukai tren off grid travel karena memberikan manfaat yang positif bagi kesejahteraan diri. Para wisatawan dapat fokus pada kesejahteraan diri tanpa harus memikirkan pekerjaan di perkotaan, sehingga dapat merasakan perasaan yang lebih bahagia dan positif.

Selain itu, off grid travel juga memungkinkan para wisatawan untuk membangun pertemanan baru dan menikmati keindahan alam. Pengalaman seperti ini sangat cocok bagi para pencinta tantangan dan pengalaman baru, terutama mereka yang menyukai wisata alam.



berlibur di alam bebas tanpa harus memiliki keterampilan bertahan hidup yang tinggi.

Off grid travel memberikan penginapan yang nyaman, tetapi tetap mempertahankan suasana alam bebas yang autentik. Konsep off grid travel

Dalam kesimpulannya, tren wisata 2023 umumnya menawarkan ketenangan dan relaksasi bagi para wisatawan. Off grid travel menjadi pilihan yang menarik bagi mereka yang ingin menikmati keindahan alam bebas, namun tetap nyaman selama berlibur. •



Media sosial dibuat heboh dengan pernyataan YouTuber Gita Savitri yang menyebut tidak punya anak bikin awet muda, karena tidak akan stres mendengar teriakan anak-anak. Bahkan dia bisa tidur nyenyak selama delapan jam dalam sehari.

HEBOH GITA SAVITRI, 5 ARTIS INI JUGA TERNYATA MEMILIH CHILDFREE

Hal tersebut diucapkan Gita Savitri setelah menjawab pujian dari salah satu warganet yang menyebut dirinya lebih awet muda padahal sudah usia 30 tahun, sedangkan dirinya terlihat cepat tua di usia 24 tahun.

Diketahui Gita Savitri memang memutuskan untuk tidak punya anak atau childfree, keputusan itu diutarakannya pada 2021 lalu.

Salah satu akun @itsmei**** yang awalnya menuliskan rasa irinya kepada Gita Savitri yang tampak muda dibandingkan dirinya yang baru berusia 24 tahun.

"Aku yang umur 24 tahun kalah sama kak Git, padahal udah umur 30 tahun. Awet muda banget si," tulisnya, Senin 6 Februari 2023.

Gita Savitri pun menjawab, jika keputusan childfree merupakan salah satu anti penuaan alami, sehingga memengaruhi wajahnya yang awet muda.

"Not having kids is, indeed natural anti aging. You can sleep for 8 hours every day, no stress hearing kids screaming. And when you finally got wrinkles, you have the money to pay for botox (Tidak punya anak adalah memang anti penuaan alami. Kamu bisa tidur selama 8 jam setiap hari, tanpa stres mendengar anak-anak berteriak. Dan kapan kamu akhirnya mendapatkan kerutan, kamu memilikinya uang untuk membayar botox)," ungkap dia.

Lalu apa yang dimaksud dengan istilah Child-free?

Istilah childfree, menurut laman HeylawEdu adalah keputusan seseorang ataupun pasangan untuk tidak memiliki keturunan atau tidak memiliki anak.

Selain itu, menurut

Oxford Dictionary istilah childfree merupakan suatu kondisi di mana seseorang atau pasangan tidak memiliki anak karena alasan utama yaitu pilihan.

Istilah childfree juga banya dikenal atau lebih familiar di kalangan para feminis dan dalam agenda-agenda feminisme. Menurut buku yang berjudul "Feminisme dan pemberdayaan perempuan dalam Timbangan Islam" yang ditulis oleh Siti Muslikhati, dijelaskan bahwa feminisme merupakan suatu gerakan yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender secara kuantitatif.

Artinya, pria maupun wanita harus saling berperan, baik itu dalam maupun di luar rumah.

Keputusan Childfree ini digunakan oleh seorang perempuan, untuk memilih kebebasannya untuk menjadi seorang ibu maupun mengalami proses hamil hingga melahirkan.

Sejatinya keputusan perempuan untuk childfree merupakan keputusan personal, meskipun masih dinilai tabu di Indonesia.

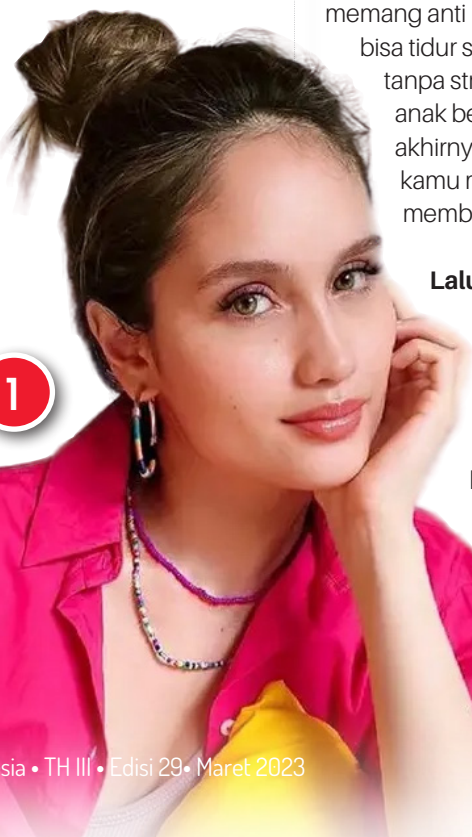
Dampak Childfree

Keputusan Childfree seorang perempuan maupun pasangan, rupanya dapat berdampak pada sisi biologis atau kesehatan. Ada beberapa dampak kesehatan yang dapat dirasakan ketika seorang perempuan maupun pasangan menjalani pernikahan untuk childfree.

Menurut sebuah penelitian, perempuan yang tidak memiliki anak akan memiliki risiko untuk kesehatan yang lebih buruk di kemudian hari, juga meningkatkan risiko kematian dini.

Keputusan tidak memiliki anak, juga meningkatkan risiko terkena kanker payudara. Ketika seorang perempuan hamil serta menyusui, risiko dari terkena kanker payudara akan berkurang sebab terjadi perubahan hormonal ketika menjalani fase hamil serta menyusui.

Ketika seorang perempuan hamil,



1

maka akan mengalami peningkatan progesteron serta mengalami penurunan estrogen, sehingga hal tersebutlah yang membuat perempuan hamil bisa lebih terlindungi dari risiko rerkena kanker.

Selain Gita Savitri, 5 artis ini juga memiliki childfree

1. CINTA LAURA

Aktris cantik Cinta Laura memang belum menikah. Namun sebelum mengucapkan janji pernikahan, dia mengaku, sudah memutuskan tidak akan memiliki anak jika menikah kelak.

Dikatakan Cinta Laura, banyak anak-anak tidak memiliki dan tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Dimana anak-anak di berbagai belahan dunia ini merasakan kekurangan kasih sayang dari orang tuanya.

Alih-alih ingin seperti wanita pada umumnya yang ingin merasakan memiliki sebuah keturunan dan anak, Cinta Laura justru mengaku dengan energi serta pola pikirnya yang ada saat ini untuk lebih memilih mengadopsi anak-anak terlantar.

Bahkan dirinya yakin bisa dengan sangat mencintai serta menyayangi anak adopsinya tersebut layaknya masih sayang ibu kandung terhadap anak sendiri.

"Kalau aku bisa mengadopsi anak yang sekarang nggak punya siapapun yang menjaga mereka, nggak punya siapapun yang menyayangi mereka, banyak anak-anak terlantar," tegasnya.



2. ANYA DWINOV

Anya Dwinov memang masih melajang. Namun dia mengaku sebagai childfree meski dia nanti menikah. Dia mengaku, tidak bisa menjamin akan melahirkan anak dengan sempurna, baik secara fisik maupun karakter.

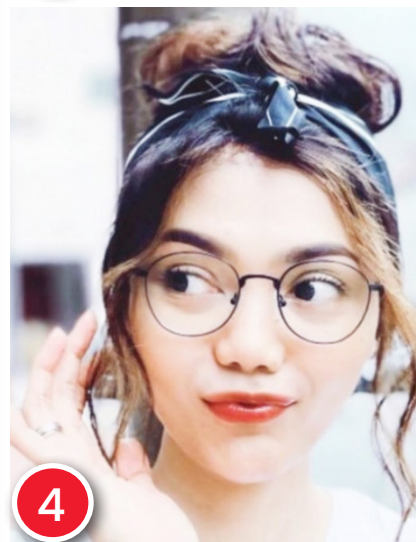
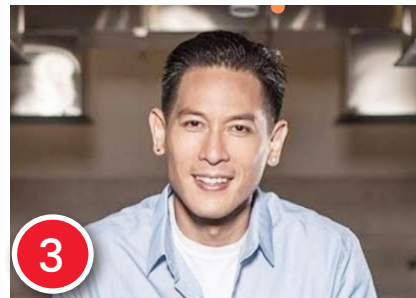
"Tidak ada alasan, kenapa gue harus

menambah dunia ini dengan anak gue. Misalnya terjadi yang terburuk, Tuhan memberikan gue cobaan diberi anak tidak sempurna. Terus pertanggungjawaban gue bagaimana?" ujarnya dikutip dari Rumpi, pada Juli 2022.

3. CHEF JUNA

Chef Juna mengaku, juga tidak ingin memiliki anak. Dia menyebut, pemikirannya sejak kecil memang sudah berbeda. Belum lagi, dia punya latar belakang keluarga broken home. Karena itu, dia menegaskan, menikah dan mempunyai anak bukan prioritas utama dalam hidupnya.

"Menikah tidak harus. Punya anak juga tidak harus. Bahkan tidak pernah mau membebani hidup dengan kata harus," ujarnya saat menjadi bintang tamu channel YouTube PUELLA ID,



pada Agustus 2021.

4. RINA NOSE

Komedian Rina Nose memilih untuk tidak memiliki anak dalam pernikahannya dengan Jossy Vallaza Aartsen. Keputusan itu, diambilnya berdasarkan kesepakatan bersama sang suami.

"Kami sudah happy dengan berdua. Tanpa anak pun kami sudah happy," katanya saat tampil di channel YouTube Melaney Ricardo, pada 16 September 2022.

Rina menilai, punya anak bisa menimbulkan masalah baru dalam hidupnya. "Hidup sudah banyak masalah nih.

Nanti kalau punya anak akan menambah masalah pasti. Kadang netizen atau fans bilang, ayo dong punya anak pasti cantik dan lucu. Masalahnya, punya anak bukan buat lucu-lucuan. Lucunya sementara paling berapa tahun, habis itu problem muncul," tuturnya.

5. LEONY VITRIA

Pada Desember 2021, Leony Vitria Hartanti mengungkapkan keinginannya untuk tidak menikah dan punya



anak. Dia beralasan, ingin menjalani hidup seperti keinginan dan kata hatinya.

Keputusan itu, diakui sang aktris, sudah diungkapkannya pada orangtuanya dan mereka tak menentangnya.

"Dari usia 26 atau 27, aku sudah kasih statement ke orangtua, 'Jangan mengharapkan cucu dari saya ya. Soalnya, aku enggak mau punya anak.' Jadi, aku kasih mereka anjing tiga ekor untuk jadi cucu mereka," ungkapnya dari channel YouTube Sophie Navita TV, pertengahan Desember 2021. ●

TUNA
Gunawan Effendi

ni soal tuna ikan, bukan tunawisma, tunakarya, tunanetra, atau tunagrahita.

Tuna ikan berasal dari bahasa Spanyol yang diserap dari kosa kata Arab, *al tun*, sejak masa Andalusia Islam atau malah sebelumnya. Sedangkan tuna untuk wisma hingga grahita berasal dari bahasa sansekerta asal anak benua India, kurang atau tanpa.

Titik temunya, yang terbanyak menangkap ikan tuna di Samudera Hindia ternyata bangsa yang tergabung dalam Uni Eropa. Sudah jelas bangsa Eropa menyukai tuna sejak dulu kala. Boleh jadi Eropa mengalami tuna-tuna, kekurangan ikan yang bobotnya dapat tumbuh hingga mendekati 200 kg per ekor itu. Melebihi rata-rata berat tubuh manusia.

Maka, armada laut Eropa, yang sejak masa kolonial sudah menjelajahi Samudera Hindia, terus berkelanjutan hingga Abad XXI. Yang di Abad XXI ini, armada tuna Uni Eropa merambah Samudera Hindia hingga menjadi keluhan bangsa-bangsa Afrika dan Asia yang memiliki pesisir di lautan itu.

Batas Samudera Hindia di barat adalah pesisir timur Afrika. Sedangkan di timur adalah pesisir barat dan utara Australia. Samudera Hindia juga terbelah menjadi bagian selatan dan utara garis khatulistiwa, kawasan tropis. Jadi, tuna di Samudera Hindia dikenal juga dengan *tropical tuna*.

Tropical tuna terdiri dari berbagai jenis, mulai yang terbesar: tongkol mata belo (*bigeye tuna*, *Thunnus obesus*) dan madidihiang atau tuna sirip kuning (*yellowfin tuna*, *Thunnus albacares*) yang keduanya bisa tumbuh bobotnya hingga lebih dari 150 kg per ekor juga yang lebih kecil seperti cakalang (*skipjack*, *Katsuwonus pelamis*), hingga yang terkecil: tongkol lisong (*bullet tuna*, *Auxis rochei*) yang paling besar akan mencapai panjang sekitar 50 cm saja.

Nah, tata kelola dan regulasi penangkapan tuna di Samudera Hindia itu diatur oleh lembaga bernama Indian Ocean Tuna Commission (IOTC, Komisi Tuna Samudera Hindia). Sejak terbentuk pada 1993, Indonesia menjadi anggota aktif IOTC. Dalam sesi pertemuan IOTC yang berlangsung di Mombasa, Kenya pada awal Januari 2023 terungkaplah siapa penangkap tuna terbanyak di Samudera Hindia itu pada tiga tahun terakhir, 2020-2022. Ya Uni Eropa, terutama armada Spanyol (tempat Port Vigo pelabuhan ikan terbesar

di dunia berada), dan Prancis yang menjangkit 243.001 ton aneka tuna tropis pada 2021 saja.

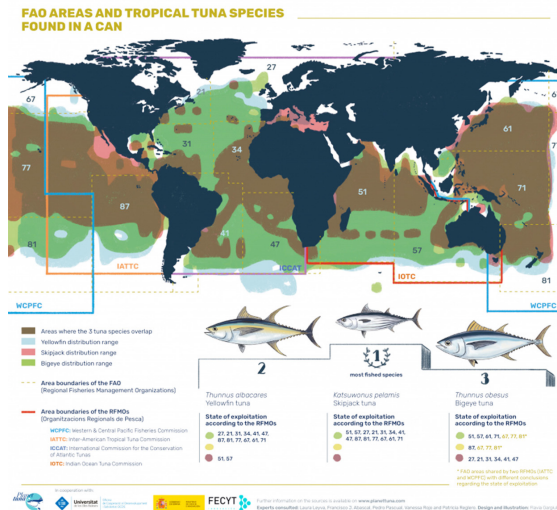
Data lain dari IOTC menunjukkan, untuk madidihang (*yellowfin tuna*) saja, tangkapan armada Eropa pada 2019 dan 2020 mendekati 80 ribu ton per tahun. Bandingkan dengan Indonesia, negara penangkap ikan nomor dua di dunia, hanya sanggup menangkap madidihang tak sampai 40 ribu ton per tahun. Masih kalah dari negara IOTC lain seperti Sri Lanka, Seychelles, Maladewa, Iran, dan Oman yang tangkapannya sudah di atas 40 ribu ton. Poin pentingnya, penangkapan madidihang di Samudera Hindia mencapai hampir setengah juta (500 ribu) ton sudah jauh melampaui ambang batas kelangsungan ikan itu di Samudera Hindia yang direkomendasikan IOTC pada 2015, jangan sampai melebihi 100 ribu ton per tahun.

Mengapa armada Uni Eropa sanggup menangkap begitu banyak ikan di Samudera Hindia? Jawabnya, mereka menggunakan alat penggiring ikan (fish aggregating devices, FAD) yang sebenarnya biasa disebut rumpon layang di kalangan nelayan tradisional atau gurem sejak berabad-abad silam. Namun, armada tuna Uni Eropa mengadopsi FAD rumpon itu dengan tambahan perangkat berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Rumpon layang tradisional yang biasanya hanya menggunakan kain rombeng atau jarik un-

tuk memikat tuna, oleh armada Uni Eropa dipasang alat lebih mutakhir seperti pelacak posisi (*global positioning system*, GPS) dan sinyal satelit yang memungkinkan letak setiap rumpon terlacak seketika, bersama dengan *depth sounder* yang memungkinkan kapal penangkap tuna mengetahui volume ikan di sekitar perangkat tersebut. Jumlah rumpon mutakhir yang semakin banyak membuat situasi tidak terkendali. Maka Indonesia bersama 10 negara pesisir Samudera Hindia di Afrika dan Asia mendesak penghentian penggunaan rumpon FAD itu. Ringkasnya, berhasil!

Tapi, jika masih asing dengan kisah ini, itulah tanda-tanda bangsa kita yang nenek moyangnya pelaut ulung itu terlalu sibuk di darat dan udara. Sementara di laut, sudah tertinggal jauh. Pada saat bangsa ini menghadapi ancaman *stunting*, kita bagaikan tunaaksara dan tunawicara mengenai ikan tuna. ●





Kebakaran Depo Plumpang

PECAT DIRUT PERTAMINA

Kebakaran Depo Pertamina di Plumpang, Koja, Jakarta Utara, 2 Maret 2023, menjadi penghakiman bagi Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati. Dari insiden yang merenggut 19 nyawa itu, Nicke layak untuk dievaluasi, bahkan dicopot dari jabatan.



Sejak Nicke menjabat orang nomor satu di perusahaan migas pelat merah pada 30 Agustus 2018, tercatat sudah enam kali terjadi kebakaran depo dan kilang minyak Pertamina.

Selain kebakaran Depo Pertamina Plumpang, awal Maret 2023, insiden sebelumnya terjadi di Kilang Minyak di Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam waktu yang cukup berdekatan, yakni pada 4 Maret dan 15 Mei 2022.

Pada 2021, terjadi tiga kebakaran kilang minyak di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kejadian pertama tahun itu dimulai di Kilang Minyak Balongan, Indramayu, Jawa Barat, pada 29 Maret 2021. Lalu, disusul kebakaran Kilang

kerugian materiil.

Akademisi Universitas Sahid Jakarta itu menilai, Nicke harus diberi punishment. Jika tidak, publik dapat menduga bahwa Nicke merupakan titipan dari orang kuat di negeri ini.

"Saya kira Dirut dapat dicopot segera. Tidak tanggung-tanggung, taruhannya nyawa manusia, dan tidak sedikit," kata Saiful di Jakarta, Senin, 6 Maret 2023.

Menurut Saiful, kebakaran Depo yang sudah enam kali di era Nicke jelas membuat publik resah. Bahkan, selain merugikan masyarakat, juga mengurangi performa kinerja Pertamina. Bahkan, kalau terus-menerus dibiarkan akan semakin menggerus

tamina sebagai pucuk pimpinan dari Pertamina," kata Fahmy, Sabtu, 4 Februari 2023.

Fahmy sempat menyoroti perilaku Nicke Widyawati yang tidak muncul saat insiden kebakaran terjadi. Padahal, Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono; Pangdam Jaya, Mayjen TNI Untung Budiharto; dan Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, muncul ke publik.

"Tapi Dirut Pertamina tidak ada," kata dia.

Fahmy juga menyoroti Nicke Widyawati yang tidak hadir saat Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menteri BUMN Erick Thohir melakukan peninjauan.

Fahmy menilai, hal itu menunjukkan bahwa Pertamina tidak punya empati untuk menangani korban akibat kebakaran yang terjadi.

"Hanya mementingkan bahwa pasokan tidak terganggu. Saya kira enggak pas juga," tutur Fahmy.

Fahmy menilai kebakaran itu merupakan insiden yang paling dahsyat karena merenggut nyawa sebanyak 17 orang meninggal dan 50 orang yang luka-luka. Dia juga menilai bahwa kejadian yang berulang ini membuktikan bahwa Pertamina tidak menerapkan sistem tata kelola pengamanannya.

"Itu tidak sesuai dengan standar internasional (sistem keamanannya). Karena aset yang strategis dan berisiko tinggi seperti kilang dan depo itu mustinya memiliki pengamanan yang sangat ketat. Dan harusnya zero accident," kata Fahmy.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, berpendapat, kebakaran Depo Pertamina Plumpang merupakan alarm bagus Menteri BUMN, Erick Thohir, untuk memberi pelajaran bagi Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Direktur Utara Pertamina, Nicke Widyawati, dengan cara mencopot mereka dari jabatannya karena gagal dalam bekerja.

"Menteri BUMN jangan cari alasan lagi untuk mempertahankan Komut dan Dirut Pertamina ini. Sudah terbukti, kebakaran terus menerus ini tanda bahwa mereka tidak layak dipertahankan. Harus dicopot," tegas Aktivis 98



Minyak di Cilacap, Jawa Tengah, pada 11 Juni dan 13 November 2021.

Depo Pertamina Plumpang sendiri sebelumnya juga pernah terbakar pada 2009. Insiden kebakaran terjadi pada Minggu, 18 Januari 2009, sekitar pukul 21.15 WIB.

Pada saat itu, kebakaran terjadi di tanki bernomor 24 di Depo Pertamina Plumpang yang mengakibatkan satu orang petugas keamanan Pertamina tewas. Polisi menyebut penyebab kebakaran itu karena human error.

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPH-KI), Saiful Anam, menyebut, Nicke Widyawati harus bertanggung jawab atas kebakaran Depo Pertamina Plumpang yang menimbulkan banyak korban jiwa dan luka-luka, hingga

keuntungan yang diperoleh Pertamina, yang pada akhirnya rakyat terkena dampak, harga BBM naik.

Pendapat senada juga sebelumnya disampaikan pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi. Dia meminta, sebagai bentuk tanggung jawab, Nicke Widyawati harus mundur dari jabatannya.

Fahmy Radhi melihat kurangnya empati dari pihak PT Pertamina atas kebakaran yang terjadi di Depo Pertamina Plumpang.

"Atau Pak Erick (Menteri BUMN Erick Thohir) harus mencopot Dirut Pertamina. Karena 17 nyawa ini, saya kira ini tragedi kemanusiaan. Siapa yang bertanggung jawab terhadap 17 nyawa tadi? Ya saya kita Dirut Per-

itu kepada wartawan, Senin, 6 Maret 2023.

Uchok menyampaikan, apabila pengawasan yang dilakukan oleh Komisaris Pertamina terus dilakukan, peristiwa kebakaran Depo Plumpang, tidak mungkin terjadi. Nahasnya, kebakaran ini merenggut nyawa manusia dan kerugian lainnya yang dialami oleh masyarakat sekeliling.

Khusus Ahok, Uchok menilai, mantan Gubernur DKI Jakarta itu seolah sudah kehilangan taring selama jadi Komisaris Utama Pertamina karena tidak ada lagi suara lantang ke para direksi Pertamina.

"Ini berarti selama jadi Komut Pertamina ini, selama ini kerjanya tidak ada pengawasan. Terkesan hanya makan gaji buta. Enggak ada lagi tarungnya," sindir Uchok.

Oleh karena itu, sanksi pencopotan terhadap Ahok layak diberikan, termasuk pencopotan Dirut Pertamina yang selama menjabat sudah enam kali kilang minyak terbakar.

"Nicke seolah tidak mengevaluasi semua kilang minyak. Sudah beberapa kali lho terbakar. Kalau Ahok, tampaknya alpa dalam mengawasi kerja Direksi Pertamina, khususnya dalam mengelola kilang minyak," tegas Uchok.

Untuk meningkatkan kinerja dan mengamankan semua aset Pertamina, kata Uchok, sudah sepantasnya Direksi dan Komisaris Pertamina dievaluasi menyeluruh. Mereka yang tak layak karena kompetensinya rendah sudah seharusnya diganti.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai, insiden kebakaran dahsyat Depo Pertamina Plumpang yang telah memakan korban jiwa seharusnya dijadikan momentum bagi Menteri BUMN, Erick Thohir, untuk mengevaluasi besar-besaran di Pertamina. Termasuk, berani memecat Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati, dan Komisaris Utama, Basuki Tjahaja Purnama.

Ujang menilai, jika ada kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak di perusahaan BUMN, maka pimpinannya harus bertanggung jawab dan siap dievaluasi ataupun diberhentikan.

Sebab, kesalahan yang berulang-ulang sama saja sebuah kelalaian.

"Bukan hanya evaluasi, tapi pecat dong Dirutnya," kata Ujang Komarudin kepada wartawan, Selasa, 7 Maret 2023.

Menurut Ujang, sudah enam kali kilang minyak kebakaran, tapi terkesan tidak ada yang bertanggung

saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai kebakaran Depo Pertamina Plumpang yang merupakan insiden berulang.

"Kalau saya selalu bilang kan, saya sudah pernah copot Direksi Pertamina. Kalau saya mesti copot lagi, ya saya copot lagi. Tetapi penyelesaiannya itu kan tidak hanya saling menyalahkan,"



jawab secara moral. Karena itu, pemecatan Nicke Widyawati dan Basuki Tjahaja Purnama perlu dilakukan oleh Menteri BUMN.

"Karena enam kali terjadi insiden, bahkan meledak, dan ini seolah-olah tidak ada yang bertanggung jawab, tidak ada apa-apa, ini tentu berbahaya," ucapnya.

Sinyal pencopotan direksi Pertamina sebelumnya juga sempat disinggung Menteri BUMN, Erick Thohir, buntut dari kebakaran Depo Pertamina Plumpang.

Ketua Umum PSSI 2023-2027 itu menyinggung pencopotan tersebut

kata Erick saat menjenguk korban kebakaran yang dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta Selatan, Sabtu, 4 Maret 2023.

Menurut Erick Thohir, perusahaan BUMN seperti Pertamina, MIND ID, dan PLN harus membentuk tim risiko bisnis. Tim tersebut tidak hanya di bagian keuangan, tetapi juga di bagian operasional secara menyeluruh.

"Karena ini ada aset vital nasional. Saya akan review, saya sudah minta investigasi, dan pasti kita lihat apakah ada perbaikan untuk jangka menengah," tegasnya.

Erick mengatakan bahwa kini ia

tengah fokus berbenah melakukan perbaikan untuk BUMN, termasuk Pertamina.

"Saya sudah pernah copot direksi. Kalau perlu mencopot, saya lakukan lagi. Tetapi konteksnya justru perbaikan. Tadi yang dipertanyakan sistem bisnis risiko. Percuma kita copot-copot orang, tapi tidak memberikan solusi secara menyeluruh," imbuhnya.

Erick Thohir pun akhirnya mencopot Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina, Dedi Sunardi, buntut insiden kebakaran di Depo Pertamina Plumpang. Hal tersebut sesuai keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina nomor SK-43/MBU/03/2023 tentang pemberhentian anggota direksi perusahaan perseroan (Persero) PT Pertamina, 8 Maret 2023.

VP Corporate Communication Pertamina, Fajar Djoko Santoso, menyampaikan, Dedi Sunardi telah menyelesaikan tugasnya sebagai Direktur Penunjang Bisnis Pertamina yang telah dijabat sejak 3 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN nomor SK-142/MBU/05/2021.

Selanjutnya, jabatan Direktur Penunjang Bisnis Perusahaan Pertamina akan dirangkaptugaskan oleh Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina, Erry Widiastono, sampai dengan diangkatnya Direktur Penunjang Bisnis Perusahaan Pertamina yang definitif.

"Kami sebagai perusahaan mengucapkan terima kasih atas dedikasi tenaga dan pikiran Beliau selama memangku jabatan tersebut," kata Fajar.

Janjikan Evaluasi

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, menyatakan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat yang terdampak dan keluarga korban, serta para korban yang menjalani perawatan atas terjadinya kebakaran Depo Pertamina Plumpang.

Nicke mengatakan, Pertamina terus memantau dan memberikan penanganan ter-

baik, serta juga kepada keluarga yang ditinggalkan Pertamina juga memberikan perhatian yang sangat besar.

Nicke menambahkan, Pertamina juga bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh biaya kepada korban yang menjalani perawatan sampai dengan dinyatakan sembuh dan bisa pulang serta beraktivitas seperti biasa.

Dia mengaku Pertamina bertanggung jawab sepenuhnya atas biaya pengobatan dan santunan kepada korban kebakaran Depo Plumpang.

"Dalam hal ini kami ingin menyampaikan komitmen Pertamina untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh biaya pengobatan dan juga santunan kepada korban yang meninggal," ujar Nicke Widyawati dalam konferensi pers di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta, Sabtu, 4 Maret 2023.

Nicke Widyawati juga menjanjikan segera melakukan evaluasi menyeluruh agar

insiden kebakaran fasilitas bahan bakar minyak milik perseroan tak lagi terulang.

Pertamina telah membentuk tim gabungan dengan anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga dan fungsi terkait untuk melakukan investigasi penyebab terjadinya insiden kebakaran di Depo Plumpang.

"Kami akan melakukan evaluasi dan refleksi menyeluruh di internal demi menghindari kejadian serupa terulang," kata Nicke.

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution, memastikan stok dan distribusi BBM di wilayah Jawa bagian Barat terpenuhi dengan baik pasca-terjadinya insiden di Depo Pertamina Plumpang.

Alfian mengatakan, sejak kejadian pihaknya gerak cepat mengaktifkan skema distribusi Regular, Alternative, dan Emergency (RAE) atau skema penyaluran alternatif, dengan bantuan suplai dari Terminal BBM (TBBM) Tanjung Gerem, TBBM Cikampek, TBBM Ujung Berung dan TBBM Balongan.

"Kebutuhan BBM untuk wilayah Jawa Bagian Barat secara keseluruhan di suplai dari 7 terminal BBM. Saat ini stok dan penyaluran dalam kondisi aman. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir," jelas Alfian lewat keterangannya di Jakarta,

Senin, 6
Ma-



ret 2023.

Alvian mengatakan, dari sisi pasokan produk, rata-rata ketahanan stok (coverage days) BBM jenis gasoline (Pertalite, Pertamax, dan Pertamina Turbo) untuk wilayah Jawa Bagian Barat masih berada di angka 18 hari. Sedangkan, BBM jenis gasoil (Biosolar, Dexlite, dan Pertamina Dex) masih berada di angka 17 hari.

Evaluasi Pertamina

Ketua Komisi VI DPR, Faisol Reza, meminta PT Pertamina untuk menata ulang dan melakukan evaluasi terhadap posisi depo BBM yang berdekatan dengan pemukiman warga. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, seperti peristiwa kebakaran Depo Pertamina Plumpang.

Selain itu, Politisi Fraksi PKB ini meminta Pertamina untuk memperhatikan kelayakan infrastruktur Depo Pertamina Plumpang dan melakukan peremajaan infrastruktur agar kejadian serupa tidak terulang.

"Tidak apa-apa spending lebih besar, tapi demi keselamatan dan citra Pertamina, sebaiknya ini dilakukan se-maksimal mungkin," tegas dia.

Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS, Nevi Zuairina, memastikan, fraksinya akan memanggil Menteri BUMN Erick Thohir dan jajaran direksi Pertamina pimpinan Nicke Widyawati, untuk meminta keterangan ihwal insiden Depo Pertamina Plumpang. Bahkan, bila perlu akan bentuk Panitia Kerja Investigasi.

Menurut Nevi, penjelasan dari Menteri BUMN hingga Dirut Pertamina menjadi penting karena kejadian ini telah merenggut nyawa dan membuat banyaknya korban berjatuhan.

"Ini persoalannya sudah merenggut nyawa dan korbannya banyak. SOP Pertamina ketika terjadi kecelakaan perlu di investigasi, harusnya zero accident, kalau ada harus zero korban," kata Nevi kepada wartawan, Senin, 6 Maret 2023.

Di sisi lain, Nevi berharap, Pertamina dapat memberikan kepastian distribusi BBM terjamin suplai ke SPBU-SPBU khususnya di Jakarta. Pasaunya, depo Pertamina Plumpang ini mensuplai 20 persen kebutuhan BBM Indonesia.

"Mendesak Pertamina untuk menjelaskan perkara ini secara terbuka," jelasnya.

Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO), Anggawira, mengatakan, menjadi wajar ketika banyak pihak yang mempertanyakan komitmen Pertamina terhadap aspek Health, Safety, Security, and Environment (HSSE).

Menurut Anggawira, bukan hanya Plumpang, dalam tiga tahun terakhir, tercatat ada enam kilang dan/atau depo Pertamina terbakar.

"Saya rasa dengan berbagai insiden yang terjadi ini, harus ada tindakan dengan mengeluarkan kebijakan atau terobosan masif untuk mengatasi persoalan HSSE ini. Ini berlaku bukan hanya untuk Pertamina, tapi untuk seluruh pelaku industri gas dan minyak bumi," kata Anggawira dalam keterangannya, Senin, 6 Maret 2023.

Anggawira menambahkan, perlunya buffer zone atau zona penyangga di setiap depot Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebab, depo BBM merupakan

area berbahaya yang di sekelilingnya terdapat zat-zat yang mudah terbakar.

"Menurut saya, buffer zone itu sebagai sabuk pengaman di area depo BBM berada. Adanya buffer zone merupakan bagian dari aspek HSSE di sekitar wilayah tangki timbun yang rentan dengan risiko kebakaran. Lahan di sekeliling lokasi depo BBM bisa dibebaskan dan dimanfaatkan sebagai area penghijauan," ujar Komisaris Utama PT Krakatau Pipe Industries ini.

Sekjen BPP HIPMI ini menilai, sekarang Pertamina sudah bergerak cepat untuk menanggulangi insiden kebakaran tersebut, utamanya berfokus pada korban.

Hal ini sudah merupakan prosedur mitigasi ketika kecelakaan terjadi. Namun, perlu adanya evaluasi, sehingga terobosan yang bisa menguatkan aspek HSSE.

"Jangan sampai kejadian ini bisa terulang kembali dan perlu diperhatikan jika insiden ini terjadi kembali bagaimana prosedur penyelamatan sebagai standarnya untuk meminimalisir dampaknya," terangnya. •

Area pemukiman di sekitar Depo Pertamina Plumpang

■ Area pemukiman ■ Lokasi kebakaran



Sumber: Bappeda DKI Jakarta

BBC



ANIES BASWEDAN HARUS BERTANGGUNG JAWAB

Insiden Kebakaran yang terjadi di Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara, 2 Maret 2023, menyeret nama mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Bakal Calon Presiden dari Koalisi Perubahan ini disebut ikut bertanggung jawab atas kejadian yang menyebabkan 19 nyawa melayang dan puluhan lainnya luka-luka.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dinilai punya andil dalam insiden kebakaran Depo Pertamina Plumpang karena memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada warga Kampung Tanah Merah pada 2021. Pemberian IMB tersebut adalah sebagai bentuk realisasi dari janji kampanye Anies Baswedan pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

Namun, janji pemberian IMB untuk warga Kampung Tanah Merah kala itu sempat mendapatkan pertentangan dari Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta 2014-2017 yang juga lawan Anies Baswedan di Pilgub DKI 2017.

Dalam video yang kemudian viral di media sosial, Ahok, sapaan Basuki Tjahaja Purnama, mengingatkan Anies Baswedan agar tidak ada janji-janji politik yang dibuat-buat saat berkampanye.

Terlebih, soal ingin membebaskan warga Tanah Merah dari sengketa.

Kala itu, Anies membuat janji kepada warga Tanah Merah yang menginginkan sertifikat tanah di sekitar Depo Pertamina Plumpang.

Mendengar janji tersebut, Ahok pun langsung menentang, pasalnya tanah yang ditempati oleh warga Tanah Merah milik PT Pertamina dan tidak boleh dibangun permukiman warga.

"Biasanya, calon ini kan saya bilang dia enggak kuasai data. Saya bilang Pak Anies, tim suksesnya minta saja data sama kita. Kita kan open data. Jangan sampai karena datanya dibohongi dari timses atau bukan dibohongi lah, karena datanya tidak benar, akhirnya menyampaikan sesuatu melakukan yang merugikan dan mempermalukan sendiri akhirnya," kata Ahok.

Dalam kampanyenya kala itu, Anies

Baswedan melakukan dialog dengan warga Tanah Merah. Dalam dialog tersebut, dia disodorkan kontrak politik dari warga, jika berhasil menang pada 15 Februari 2017. Kontrak politik itu berisi tuntutan warga agar Anies Baswedan memenuhi hak dan memberikan perlindungan bagi warga Tanah Merah. Salah satunya, warga Tanah Merah minta untuk melegalkan kepemilikan tanah, karena mereka telah menetap selama lebih dari 20 tahun.

Jika Anies Baswedan menandatangani kontrak politik itu, warga Tanah Merah menjamin akan mendukung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Anies pun menandatangani. Di hadapan warga, dia berjanji akan melaksanakan kontrak politik itu jika berhasil memenangkan Pilgub DKI Jakarta pada 15 Februari 2017.

Menurut Anies, IMB kawasan Kampung Tanah Merah merupakan penertiban perizinan berbentuk kawasan yang pertama kali di Indonesia.

"Izin mendirikan bangunan sebagai satu kawasan. Bukan diberikan per bangunan, tapi diberikan per Rukun Tetangga (RT), satu RT dalam satu kawasan ini pertama kali di Indonesia ada IMB berbentuk kawasan," kata Anies dalam sambutannya di Kampung Tanah Merah, 16 Oktober 2021.

Pada kesempatan itu, Anies menyerahkan secara simbolis sertifikat izin mendirikan bangunan kawasan kepada belasan perwakilan warga Kampung Tanah Merah.

IMB kawasan tersebut, kata Anies, merupakan solusi dari Pemprov DKI Jakarta atas persoalan masyarakat yang menghadapi kesulitan mengakses berbagai perizinan bangunan.

IMB era Anies sempat diungkit oleh anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak. Menurutnya, lahan di sekitar Depo Pertamina di Plumpang seharusnya tidak boleh dihuni oleh masyarakat. Selain berbahaya, lahan tersebut juga merupakan milik Pertamina.

Gilbert pun mengkritik IMB yang dike-

luarkan Anies yang melanggar peraturan. Dia menuding IMB yang diberikan ke warga Tanah Merah itu semata-mata hanya dipakai untuk janji kampanye.

Menurutnya, dengan adanya korban kebakaran, sepatutnya warga direlokasi agar terhindar dari musibah yang berulang di kemudian hari.

"Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan Anies sewaktu menjabat, membuat persoalan bertambah rumit, karena terlihat lebih mementingkan terpilih jadi gubernur dengan janji kampanye walau harus menabrak aturan. Kesalahan ini tidak sepatutnya berulang," imbuh dia.

Hal senada juga diungkapkan Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta lainnya, Jhonny Simanjuntak, yang menyebut awal mula penerbitan IMB kawasan itu terjadi saat Pilgub DKI Jakarta 2017. Menurutnya, saat itu, Anies Baswedan yang masih berstatus calon gubernur menjanjikan kepemilikan lahan kepada warga di sekitar Depo Pertamina Plumpang.

Janji ini, kata Jhonny, tertuang dalam pakta integritas yang ditandatangani oleh Anies Baswedan saat itu. Janji Anies saat itu tidak mudah untuk terealisasi ketika

dia terpilih menjadi gubernur DKI melalui Pilkada 2017. Sebab, lahan di sekitar Depo Plumpang itu milik Pertamina.

Di satu sisi, pemberian hak atas lahan di sana juga berhubungan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Karena tak bisa memberikan apa yang dijanjikan, kepada warga di sekitar Depo Pertamina Plumpang, Anies lantas menerbitkan IMB kawasan.

Menurut Jhonny, pemberian IMB kawasan itu merupakan hal yang sia-sia. Pasalnya, tanpa IMB kawasan tersebut, warga pun telah mendirikan bangunan sendiri.

Jadi Pertanyaan

Pengamat tata kota, Yayat Supriatna, mengatakan, sebenarnya seseorang tak bisa memiliki IMB sebelum memiliki sertifikat hak milik (SHM).

"Mana boleh (punya IMB sebelum punya sertifikat lahan). Enggak bisa," kata Yayat dikutip dari Kompas.com, Senin (6/3/2023).

Yayat pun mempertanyakan proses penerbitan IMB warga Kampung Tanah Merah oleh Pemprov DKI Ja-



karta. Dia yakin ada prosedur yang salah terhadap penerbitan IMB di kawasan itu.

"Karena IMB itu persyaratannya dibangun di atas tanah milik sendiri atau atas nama sendiri. Ini enggak punya sertifikat, tapi dibangun di atas tanah milik orang lain, enggak bisa," ujarnya.

Menurut Yayat, selama puluhan tahun, lahan di kawasan Tanah Merah masih bersengketa terlepas dari lokasinya yang begitu dekat dengan objek vital berisiko tinggi. Sengketa yang belum terurai itulah yang menyebabkan rencana penataan pasca-kebakaran Depo Pertamina Plumpang pada 2009

Sejauh ini, apabila merujuk pada laman informasi geospasial (BHUMI) milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), penggunaan dan tipe hak yang ada di lahan tersebut tertulis "kosong". Artinya, lahan tersebut adalah lahan negara, yang menurut PP 18/2021, tidak ada yang memiliki hak atas tanah tersebut.

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, menyatakan, apabila mengacu pada Rencana Induk Jakarta 1965-1985, pembangunan depo yang berjarak lima kilometer dari Pelabuhan Tanjung Priok itu pun sudah



Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga

mandek.

"Karena ada sengketa tanah, masterplan untuk menata itu pada 2009 menggantung, bagaimana mau menyelesaikan kalau tanahnya tidak jelas milik siapa dan proyek penataannya untuk siapa," kata Yayat menyinggung rencana Gubernur DKI Jakarta saat itu, Fauzi Bowo, untuk merelokasi warga.

Depo Plumpang sendiri telah beroperasi sejak 1974. Namun menurut Yayat, muncul tumpang tindih klaim hak kepemilikan lahan di sekitarnya antara Pertamina, badan usaha lain, dan masyarakat.

Pertamina mengklaim lahan di sekitar depo tersebut sebagai milik mereka, namun Yayat menyebut kepemilikan itu tidak bisa dibuktikan. Pertamina sempat membebaskan lahan itu pada 1992, namun warga menggugat upaya itu dan memenangkan gugatan di pengadilan.

sesuai. Sebab, waktu itu di sekitar depo masih tanah kosong dan rawa, tidak ada permukiman.

Keberadaan depo kemudian memancing kedatangan para pekerja dan penunjangnya, seperti warung makan, kontrakan, dan pasar. Perlahan tapi pasti, hal itu membentuk permukiman ilegal dan legal yang memadati area sekitar, terutama pada 1985-1998 dan 2000-an sampai sekarang.

Hal itu lalu dibiarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bahkan "diputihkan, diakui, dilegalkan" dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) DKI Jakarta. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta yang berlaku saat ini pun telah menetapkan sisi utara depo, yang kini terbakar, sebagai zona kuning yang berarti boleh didirikan hunian.

Sesuatu yang ilegal itu akhirnya menjadi legal karena ada proses administratif

dan proses politik yang mau tidak mau mengakui keberadaan mereka (warga). Pergantian gubernur dan janji-janji politiknya juga turut ambil bagian dalam perjalanan panjang kawasan ini.

Terkait IMB, Nirwono Yoga berujar bahwa kepemilikan IMB kawasan di Kampung Tanah Merah tidak serta merta menjadikan lahan tersebut milik warga setempat.

"Warga harus bisa menunjukkan sertifikat hak milik, bukan hak guna bangunan, atas kepemilikan sah atas tanah yang didiami mereka," tutur Nirwono.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Sarjoko, membenarkan alasan pihaknya menerbitkan IMB kawasan itu pada 2021.

Sarjoko menyebutkan, penerbitan IMB kawasan di sekitar Depo Pertamina Plumpang tersebut guna memenuhi kebutuhan warga yang bertempat tinggal di sekitar area tersebut.

"Untuk IMB yang pernah diberikan, itu kan sebenarnya hanya semata dukungan supaya kebutuhan layanan dasar di sana bisa terpenuhi," ujarnya kepada awak media, Selasa, 7 Maret 2023.

Sarjoko mencontohkan, sejumlah kebutuhan layanan dasar tersebut seperti akses terhadap jalan serta air bersih. Dengan demikian, usai terbitnya IMB kawasan, warga yang menempati lahan Pertamina itu bisa mendapat akses terhadap jalan serta air bersih.

Jangan Hanya Menyalahkan Anies

Ketua DPP Partai NasDem, Taufik Basari alias Tobas, membela Anies Baswedan dengan mengatakan tak patut disalahkan karena menerbitkan IMB ke warga yang menempati pemukiman dekat Depo Pertamina Plumpang. Dia mengajak setiap pihak saat ini mencari solusi terhadap masalah pemukiman di daerah Depo Pertamina Plumpang, bukan malah saling menyalahkan.

"Kita tidak bisa menyalahkan siapa, tidak. Yang harus kita lakukan ke depan adalah mencari solusi masalah ini. Solusinya harus win-win solution," ungkap Tobas, Rabu, 8 Maret 2023.

Tobas mengatakan, warga tak bisa disalahkan begitu juga dengan Anies yang menerbitkan IMB karena untuk menjamin hak-hak warga. Dia berpen-

dapat, masalah dasar di kawasan Depo Pertamina Plumpang adalah tata kelola ruang kota yang salah.

"Jadi problem mendasar dari persoalan ini adalah persoalan tata ruang pembangunan tata ruang kota yang dari dahulu kala dari sejak 70-an akhir itu sudah semrawut dari awal," ujar anggota Komisi III DPR itu.

Dia menjelaskan, dahulu daerah sekitar Depo Pertamina Plumpang masih lahan sawah dan rawa-rawa. Baru, pada 1970-an mulai banyak pembangunan di daerah situ, termasuk Depo Pertamina.

Ketua DPW NasDem DKI Jakarta, Nurcahyo, juga membela Anies Baswedan usai dituding jadi salah satu faktor adanya korban kebakaran dari warga sekitar.

Dia menyatakan jika Anies hanya meneruskan kebijakan Joko Widodo yang kala itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang pernah membuatkan KTP untuk warga di wilayah tersebut.

"Yang diterbitkan izinnya pun kalau tidak salah adalah IMB Kawasan, menurut saya itu justru langkah yang tepat. Karena ini meneruskan apa yang sudah dilakukan pak Jokowi sebagai Gubernur pendahulunya dengan menerbitkan KTP," ujar Nurcahyo dikutip dari Suara.com, Rabu, 8 Maret 2023.

Nurcahyo memaparkan kalau sebelum diterbitkan IMB kawasan, warga di sana mengeluhkan sulitnya memperoleh sejumlah hak seperti air bersih hingga perbaikan jalan. Padahal, mereka sudah terdaftar sebagai warga DKI Jakarta karena memiliki KTP.

Maka dari itu, dia menilai kalau Anies memiliki visi yang sama dengan Jokowi ketika dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta, yakni menyejahterakan warganya.

"KTP dari Jokowi, IMB dari Anies. Itu tanda Jokowi, Anies sevisi dalam rangka kepentingan rakyat. Janganlah menjadi polemik sehingga terkesan tidak berempati bagi yang terkena musibah," ujarnya.

Sasaran Politisasi

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai, kebakaran yang menelan korban jiwa itu tidak sepenuhnya kesalahan gubernur sebelumnya. Jika ditarik ke belakang, kata Trubus, sejumlah nama ikut andil dalam pemberian warga Tanah

Merah menempati zona berbahaya dan status kepemilikan lahannya belum jelas.

Trubus pun turut menyinggung Joko Widodo yang saat itu menjadi Gubernur DKI Jakarta yang juga membagikan KTP pada warga Tanah Merah sebagai bagian dari kontrak politik. Baru kemudian diikuti Anies yang menerbitkan IMB kawasan yang sifatnya sementara. Penerbitan IMB itu pun, kata dia, merupakan jalan tengah agar warga setempat tetap bisa mengakses kebutuhan dasar.

"Jadi apa yang dilakukan Pak Anies

mang selama ini mereka (warga Tanah Merah) dipolitisasi oleh mereka-mereka itu dengan janji-janji agar mereka memberikan suara," kata Trubus.

Menurut dia, buntut dari kebakaran ini semakin memperlihatkan secara jelas ketidakharmonisan eksekutif dan legislatif dalam mencari solusi untuk warga Tanah Merah. Trubus berujar, gubernur seperti jalan sendiri sehingga kebingungan sendiri.

"Padahal, DPRD bisa interpelasi, memberikan teguran atau langkah politik lain-



Ketua DPP Partai NasDem, Taufik Basari



Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak

itu sebetulnya hanya sementara untuk memberikan ruang pada masyarakat agar bisa tinggal sementara di sana," kata Trubus, Selasa, 7 Maret 2023.

Tak hanya eksekutif, Trubus juga menyoroti peran DPRD DKI Jakarta yang pasif dalam penyelesaian masalah ini. Padahal, tugas DPRD adalah sebagai pengawas kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"DPRD ini ada juga sebagian para wakilnya berasal dari wilayah itu. Jadi, me-

nya untuk menekan gubernur untuk menyelesaikan persoalan itu," kata dia.

Di sisi lain, Trubus juga mengatakan PT Pertamina seharusnya sejak awal proaktif dengan ikut berkolaborasi dengan Pemprov DKI agar masyarakat tidak tinggal di atas lahan yang diklaim milik mereka. Padahal, kebakaran yang hebat sebelumnya juga pernah terjadi di lokasi yang sama pada 2009. Penyelesaian seharusnya sudah disepakati pada saat itu. ●

JANJI RELOKASI MASIH DIKAJI

Tersedia dua pilihan sebagai solusi atas insiden kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, yang terjadi pada 3 Maret 2023. Warga sekitar yang direlokasi atau obyek vital milik negara yang dipindahkan ke tempat lain.

Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo kepada jajarannya saat meninjau posko pengungsian di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Rasela, Rawa Badak Selatan, Jakarta, Minggu, 5 Maret 2023.

"Saya sudah perintahkan kepada Menteri BUMN dan juga Gubernur DKI untuk segera mencari solusi dari kejadian yang terjadi di Plumpang. Terutama karena ini memang zona yang bahaya, tidak bisa lagi ditinggali, tetapi

ambil oleh pihak terkait dalam waktu dekat.

Tidak hanya TBBM Pertamina Plumpang, Presiden juga menegaskan bahwa seluruh zona berbahaya yang ada di Indonesia juga harus dilakukan evaluasi dan audit. Hal tersebut penting dilakukan karena berkaitan dengan keselamatan masyarakat.

Menteri BUMN, Erick Thohir, mengumumkan bahwa Depo Pertamina Plumpang yang akan direlokasi ke tanah milik PT Pelindo. Erick mengaku

Erick mengatakan pemindahan Depo Pertamina Plumpang merupakan langkah untuk menindaklanjuti kesepakatan rapat yang sudah dilaksanakan antara Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, dan dihadiri Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Wamen BUMN I Pahala Mansury, serta Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

Kesepakatannya bahwa setelah rapat tersebut, masing-masing pihak mulai menggelar rapat secara sendiri-sendiri untuk memberikan solusi.

"Pertama, tentu arahan bapak Presiden solusi untuk melayani dan melindungi rakyat. Karena itu Pertamina memastikan perlindungan kepada rakyat sekitar, terutama korban-korban yang sudah terkena kita akan rawat dan kita pastikan akan penyewaan rumah bagi mereka, serta mendorong dan membantu kehidupan mereka untuk beberapa bulan ke depan sampai ada kepastian keputusan lainnya," kata Erick.

Maka dari itu, BUMN memastikan dan menginginkan dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat, mengingat hal ini merupakan bagian dari perlindungan masyarakat yang didorong oleh Presiden.

BUMN juga meyakini bahwa keselamatan masyarakat juga merupakan hal yang penting, sehingga Pertamina akan membuat zona aman atau buffer zone di sekitar objek-objek vital nasional Pertamina, tidak hanya di Plumpang, namun juga di lokasi-lokasi lainnya, seperti Balongan maupun Semarang.

"Khusus untuk di Plumpang, kurang lebih jarak buffer zone 50 meter dari pagar. Hal ini tentunya menjadi solusi bersama yang kami harapkan dukungan dari pemerintah daerah serta



harus ada solusinya," ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media.

Menurut Presiden, ada sejumlah pilihan yang dapat diambil untuk mengatasi kejadian tersebut, mulai dari relokasi TBBM hingga relokasi warga sekitar TBBM Pertamina. Presiden pun menyerahkan keputusan tersebut di-

sudah berkoordinasi dengan Pelindo di mana lahannya akan siap dibangun akhir 2024.

Erick menjelaskan, pembangunan depo baru membutuhkan waktu hingga 2,5 tahun.

"Artinya masih ada waktu sekitar 3,5 tahun," kata Erick dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 6 Maret 2023.

masyarakat, karena keamanan menjadi hal yang prioritas bagi kita semua,” kata Erick.

Pendapat berbeda disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang menilai warga sekitar Depo Pertamina Plumpang yang harus pindah.

Menurutnya, tempat yang ditinggali warga di sekitar Depo Pertamina Plumpang adalah buffer zone atau zona rawan.

Luhut menilai sejak Depo Plumpang dibangun, kawasan di sekitarnya memang disisakan untuk area khusus buffer zone dan bukan merupakan tanah kosong untuk dibangun permukiman. Luhut menegaskan pemindahan seharusnya dilakukan pada hunian warga, bukan pada lokasi Depo Plumpang.

“Jangan dibalik ya. Plumpang itu sudah dibuat di sana ada daerah kosong atau buffer zone untuk tidak ada kejadian. Jangan ini disuruh pindah. Orang yang tidak berhak di situ yang disuruh pindah. Kita harus jernih melihat ini, karena itu daerah kosong itu bukan tanah kosong, memang dari dulu disiapkan itu,” kata Luhut, Senin, 6 Maret 2023.

Meski begitu, Luhut menyatakan harus ada solusi untuk relokasi bangunan pemukiman di sekitar Depo Plumpang. Di sisi lain, Luhut mengemukakan pihak-pihak yang sejak dahulu memberikan izin untuk masyarakat tinggal di sekitar buffer zone Depo Plumpang.

“Yang berikan izin itu tidak benar, tanggung jawab lah berapa nyawa orang yang meninggal itu,” tegas Luhut.

Luhut juga bilang jangan sampai urusan pemindahan masyarakat sekitar Plumpang jadi ajang mencari popularitas dari pihak pengambil keputusan. “Pemerintah harus cari jalan keluar, tidak boleh membuat popularitas di situ. Tidak boleh,” kata Luhut.

Menurutnya, bila buffer zone ditempati untuk permukiman memang sangat rawan kebakaran. “Karena bisa saja pipa di sini bocor, belum ketahuan. Nah, gas itu kan bisa terbang, kalau ada api bisa terbakar. Itu yang terjadi sekarang,” ujar Luhut.

Lahan Reklamasi

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menawarkan bekas lahan reklamasi seluas 32 hektare untuk lokasi pembangunan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina pengganti Plumpang.

Komisaris Pelindo, Jodi Mahardi, memperkirakan kebutuhan untuk pembangunan depo BBM Pertamina sekitar 30 ha. Perusahaan sendiri memiliki dua bidang lahan yang bisa dimanfaatkan.

“Mungkin untuk pengembangan pertama enggak sampai 32 ha. Kalau kebutuhan Pertamina di luar terminal

“Pada prinsipnya Pelindo siap mengikuti arahan Pemerintah dan terbuka terhadap opsi pemindahan ke pelabuhan. Untuk selanjutnya, kami akan menunggu pembicaraan lebih lanjut antara Pertamina dan Pelindo,” terangnya.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, mengatakan pihaknya masih melakukan pengkajian terkait relokasi Depo Pertamina Plumpang. Pertamina saat ini masih melakukan kajian dalam berbagai aspek, termasuk berbagai pilihan yang bisa ditempuh pasca insiden kebakaran yang menelan 19



kami hitung kira-kira 30 ha,” ujar Jodi.

Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo, Ali Mulyono, mengungkapkan perusahaan tengah mengerjakan pembangunan lanjutan pada Terminal New Priok, di mana terdapat area yang diperuntukkan sebagai product terminal. Area tersebut dipertimbangkan sebagai lokasi baru depo Pertamina, di mana lahan itu akan siap pada 2024.

“Lokasi product terminal yang kami siapkan nantinya terletak tepat di waterfront, sehingga akan memudahkan bongkar muat minyak dan gas dari kapal ke terminal dan sebaliknya,” kata Ali, Selasa, 7 Maret 2023.

Ali mengatakan, Jalan Tol Cibitung-Cilincing (JTCC) serta New Priok Eastern Access (NPEA) akan menambah kemudahan akses langsung dari New Priok menuju kawasan industri di Cibitung dan Cikarang.

nyawa.

“Semua perlu dikaji, segala opsinya,” kata dia.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menilai relokasi Terminal BBM bisa saja dilakukan. Hanya saja keputusan relokasi tidak bisa dibuat secara reaktif dan membutuhkan kajian teknis.

Relokasi Depo Pertamina Plumpang juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Perlu ada berbagai persiapan, kajian teknis, kajian kelayakan, perizinan, lelang hingga konstruksi.

“Waktunya panjang dan beresiko,” kata Fabby.

Sehingga, Fabby menilai pilihan yang tepat dengan membuat jarak aman antara Terminal BBM Pertamina dengan pemukiman warga. Apalagi, lahan yang dijadikan pemukiman war-

ga Tanah Merah tersebut sebenarnya memang milik Pertamina.

"Tanah di Plumpang itu milik Pertamina dan tanah itu jadi sengketa karena masyarakat yang sudah kadung masuk dan membangun di sana," kata dia.

Pilihan Terbaik

Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, mengungkapkan, dalam proses pengambilan keputusan terkesan mengemuka pendapat bahwa jatuhnya korban adalah kesalahan penduduk tinggal di daerah buffer zone yang diklaim

melakukan upaya serius untuk memperbaiki sistem keamanan yang diterapkan. Akibatnya kebakaran beruntun Kilang Minyak dan Depo BBM milik Pertamina berulang, yang kali ini merenggut 19 nyawa penduduk.

Dalam kondisi saat ini, opsi pemindahan Depo Pertamina Plumpang disebutnya sebagai opsi yang tepat dan cepat dengan mempertimbangkan beberapa alasan.

Pertama, penyulut kebakaran berawal dari Depo Pertamina Plumpang, bukan rumah Penduduk. Kedua, opsi pemindahan Depo Pertamina dapat



Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan

milik Pertamina. Namun, hampir tidak mengemuka pendapat yang mempertanyakan mengapa kebakaran dahsyat terjadi.

"Tentunya kalau kebakaran itu tidak terjadi, maka tidak ada korban berjatuhan. Faktanya, kebakaran itu berawal dari Depo Pertamina Plumpang yang menyambar sejumlah rumah penduduk," ujar Fahmy di Kampus UGM, Senin, 6 Maret 2023.

Fahmy berpendapat, kebakaran yang ketiga kali di Depo Pertamina Plumpang dan Kilang Minyak Pertamina mengindiskan bahwa sistem keamanan (Safety System) amat buruk. Sistem keamanan di bawah International Standard yang mensyaratkan zero accidents bagi aset strategis dan risiko tinggi.

Dia menilai, Pertamina tidak tampak

diputuskan secara cepat oleh direksi Pertamina. Sedangkan keputusan relokasi kawasan penduduk lebih lama karena melibatkan beberapa pihak, yakni Pertamina, Pemprov DKI Jakarta, dan warga. Ketiga, saat ini lokasi Depo Pertamina Plumpang sudah sangat tidak layak, lantaran berada di tengah kawasan penduduk padat.

"Tidak tersedia buffer water cukup yang dibutuhkan untuk proses pendinginan pipa. Pendistribusian BBM dari kilang ke Depo menggunakan pipa yang sebagian melewati kawasan penduduk, sehingga saat pipa terbakar pasti akan menyebabkan kebakaran rumah penduduk di sekitarnya. Dengan alasan tersebut, maka hanya satu kata Pindahkan Depo Pertamina Plumpang dengan segera," ungkap nya.

Ketua Komisi D DKI Jakarta, Ida Mahmudah, mendesak agar warga sekitar Depo Plumpang bisa direlokasi ke tempat yang lebih aman. Hal itu diusulkan setelah Komisi D DPRD DKI Jakarta meninjau langsung lokasi kebakaran Depo Plumpang.

"Ya saya kemarin kebetulan ke lapangan. Jadi memang dia nempel betul rumah penduduk ini, nempel betul dengan pagar Pertamina. Ini tidak berbicara apakah depo mau dipindahkan oleh Pak Erick atau tidak, pindah ini kan butuh waktu, berapa tahun pemindahan itu. Nah, berbicara butuh waktu ini warga yang memang rumahnya sudah habis kan butuh tempat yang memang layak," ungkap Ida Mahmudah, Rabu, 8 Maret 2023.

Ida mengatakan, sebenarnya ada dua pilihan lokasi yang bisa dijadikan tempat relokasi bagi warga, yakni Rusunawa Nagrak dan Wisma Atlet. Namun, saat Ida berdialog, warga menolak usul untuk direlokasi ke Rusunawa Nagrak karena lokasinya yang jauh.

"Nah, begitu (bicara) Wisma Atlet, Pak Heru juga mengatakan 'ya sudah, nanti saya komunikasi lagi dengan warga saya'. Nah, ini kan memungkinkan kalau memang mereka mau di Wisma Atlet. Wisma Atlet ini seperti apartemen, seperti hotel," tuturnya.

Kemudian, sebagai jalan tengah, politikus PDIP ini pun mengusulkan agar dibangun rusun baru khusus bagi warga Plumpang. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki lahan di Jalan Yos Sudarso, Jakarta Utara, yang bisa dijadikan lokasi rusun.

"Dananya dari mana? CSR Pertamina dong. Boleh tidak? Boleh. Kita sudah punya lahan, kita tinggal minta sama CSR Pertamina untuk membangun rusunawa yang memang kelasnya seperti hotel atau apartemen. Bisa ke sana," tuturnya.

Ida mengatakan, rusun ini bisa menjadi alternatif tempat tinggal sementara bagi warga Plumpang selama Pertamina melakukan penataan ulang. Namun, warga sebaiknya bisa dibiarkan memilih untuk menetap permanen di sana atau kembali lagi ke rumah mereka. ●

info indonesia

www.infoindonesia.id

Network

INFO PASANG
ZULFAHMI
+62 813 8019 6507
IKLAN



Lautan informasi di dunia maya melalui jaringan internet memberikan banyak referensi **INFO** kepada masyarakat Sumsel

Koran Cetak Info Indonesia



JAKARTA
Jl. Raya Kalibata No. 8
Jakarta Selatan (12750)

Telp : 021-79196781
Email : redaksi@infoindonesia.id

PECAT DIRUT PERTAMINA

**ANIES BASWEDAN HARUS
BERTANGGUNG JAWAB**

